

PELABUHAN BERKELANJUTAN LANGKAH MENUJU MASA DEPAN HIJAU





PELABUHAN BERKELANJUTAN LANGKAH MENUJU MASA DEPAN HIJAU

Laporan "Pelabuhan Berkelanjutan" menyoroti transformasi yang dilakukan PT Pelindo Terminal Petikemas untuk membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dalam laporan ini, Pelindo menyampaikan berbagai inisiatif dan program yang dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Dari penggunaan teknologi ramah lingkungan hingga pendekatan inklusif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, tiap langkah yang diambil merupakan cerminan komitmen perusahaan terhadap pelabuhan berkelanjutan dan masa depan yang hijau.

The "Sustainable Ports" report highlights the transformation that PT Pelindo Terminal Petikemas is undertaking to build a greener and more sustainable future. In this report, Pelindo presents various initiatives and programs designed to reduce environmental impact, improve operational efficiency, and create long-term value for all stakeholders. From the use of environmentally friendly technologies to an inclusive approach to the welfare of surrounding communities, each step taken reflects the company's commitment to sustainable ports and a green future.

Daftar Isi

Table of Content

Penjelasan Tema Theme Explanation	1	 TATA KELOLA KEBERLANJUTAN Sustainable Governance	55	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Issues with Implementing Sustainable Finance	83			
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Tahun 2023 Sustainability Performance Overview 2023	4		Prinsip Tata Kelola Governance Principles	58	 KINERJA KEBERLANJUTAN Sustainable Performance	85		
Tentang Laporan Keberlanjutan About The Sustainability Report	6		Struktur Tata Kelola Governance Structure	60		88		
Penjelasan Direksi Board of Directors' Explanation	12		Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	61		102		
 PROFIL PERUSAHAAN Company Profile	23		Dewan Komisaris Board of Commissioners	62		116		
	Informasi dan Identitas Perusahaan Information and Corporate Identity	24	Direksi Board of Directors	63		 INDEKS KONTEN GRI STANDARD 2021 GRI Standards 2021 Content Index	156	
	Sekilas SPTP SPTP Overview	25	Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Pelaporan Keberlanjutan Role of the Highest Governance Body in Sustainability Reporting	64	 DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI POJK 51/2017 List of Disclosures According to POJK 51/2017		159	
	Jejak Langkah Perusahaan Company Milestones	26	Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan Development of Sustainable Finance Competence	65			 VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN Written Verification from an Independence Party	161
	Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Values	27	Manajemen Risiko Risk Management	67				 TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA Response to previous Year's Report Feedback
Kegiatan Usaha Business Activities	30	Kode Etik Code of Ethics	72	 LEMBAR UMPAN BALIK Feedback Sheet				
Bidang Usaha dan Layanan Business Fields and Services	31	Sistem Pengaduan Pelanggaran Whistleblowing System	75					
Skala Perusahaan Company Scale	33	Komunikasi Masalah Penting/Kritis, serta Mekanisme untuk Mencari Nasihat dan Mengemukakan Masalah Communication of Critical Issues and Mechanisms for Seeking Advice and Raising Concerns	76					
Struktur Organisasi Organizational Structure	34	Benturan Kepentingan Conflict of Interest	77					
Wilayah Kerja Operational Areas	36	Rasio Kompensasi Total Tahunan Annual Total Compensation Ratio	78					
Grup Usaha Business Group	38	Kebijakan Antigratifikasi dan Antikorupsi Anti-Bribery and Anti- Corruption Policy	78					
Informasi Mengenai Karyawan Employee Information	39	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Relations	80					
Rantai Pasokan Supply Chain	40							
Keanggotaan dalam Asosiasi Membership in Associations	47							
Inisiatif Eksternal External Initiatives	48							



Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Tahun 2023 [OJK B.1, B.2, B.3]

Sustainability Performance Overview 2023 [OJK B.1, B.2, B.3]

Deskripsi Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
ASPEK EKONOMI / ECONOMIC ASPECTS				
Total operasi Total operations	Wilayah Operasional Operational Area	15	15	22
Kuantitas produk/jasa yang disediakan Quantity of products/services provided	Jenis produk Types of products	• Stevedoring • Haulage • Pelayanan Dermaga • Receiving Delivery • Jasa Penumpukan • Pelayanan Jasa Terkait Lainnya	• Stevedoring • Haulage • Pelayanan Dermaga • Receiving Delivery • Jasa Penumpukan • Pelayanan Jasa Terkait Lainnya	• Stevedoring • Haulage • Pelayanan Dermaga • Receiving Delivery • Jasa Penumpukan • Pelayanan Jasa Terkait Lainnya
Produk ramah lingkungan Produk ramah lingkungan	Jenis Produk Type of Products	-	-	-
Pendapatan Operasi Operating Income	Juta Rupiah Million Rupiah	12.736.418	11.274.072	7.408.000
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Current Year	Juta Rupiah Million Rupiah	2.205.055	1.572.235	1.163.978
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Juta Rupiah Million Rupiah	4.988.202	7.150.242	9.017.9757
Jumlah Ekuitas Total Equity	Juta Rupiah Million Rupiah	13.670.361	11.546.208	7.289.915
Jumlah Aset Total Assets	Juta Rupiah Million Rupiah	18.658.563	18.696.450	16.307.890
Pelibatan pihak lokal yang Berkaitan dengan Proses Bisnis Keuangan Berkelanjutan. Involvement of local parties related to Sustainable Finance Business Processes	Jumlah pemasok lokal/nasional Number of local/national suppliers	36 dari/ from 37 (97,30%)	194 dari/ from 195 (99,49%)	4 dari/ from 4 (100%)

Deskripsi Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
ASPEK LINGKUNGAN / ENVIRONMENTAL ASPECTS				
Biaya langganan listrik Electricity subscription fee	Miliar Rupiah Billion Rupiah	170,18	141,91	-
Biaya bahan bakar Fuel costs	Miliar Rupiah Billion Rupiah	535,92	471,81	-
Beban langganan air Water Subscription Expenses	Miliar Rupiah Billion Rupiah	7,31	5,74	-
Keanekaragaman Hayati Biodiversity	Kegiatan prolingkungan Pro-environmental activities	Penanam 1.000 mangrove, penanaman pohon di 14 terminal petikemas, dan penghijauan terminal 2 New Makassar Planting 1,000 mangroves, planting trees at 14 container terminals, and greening Terminal 2 New Makassar	Penanaman pohon di 14 terminal petikemas, penanaman mangrove seluas 5 Ha di Bangkalah Tree planting at 14 container terminals, mangrove planting covering 5 hectares in Bangkalah	-
ASPEK SOSIAL / SOCIAL ASPECTS				
Total pegawai Total employees	Orang Person	7.625	8.660	5.779
Biaya pendidikan dan pelatihan pegawai Employee education and training costs	Jutaan Rupiah Millions Rupiah	47.968	-	-
Dana TJSL TJSL Fund	Jutaan Rupiah Millions Rupiah	20.250	9.058	9.587
Kinerja K3 (Cedera berat dan Fatal) OHS Performance (Serious and Fatal Injuries)	Kasus Case	1	0	-
Insiden diskriminasi Incidents of discrimination	Kasus Case	Nihil	Nihil	Nihil

Tentang Laporan Keberlanjutan

About The Sustainability Report

PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas transparansi dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, yaitu menyelaraskan antara pencapaian aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam menjalankan usaha. Sejalan dengan komitmen itu, maka setiap tahun Perseroan menerbitkan Laporan Keberlanjutan sebagai bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan PT Pelindo Terminal Petikemas.

Laporan ini berisi kebijakan, tantangan, pencapaian kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan beserta dampaknya selama periode 1 Januari-31 Desember 2023. Untuk kinerja ekonomi laporan mencakup pencapaian PT Pelindo Terminal Petikemas dan Entitas Anaknya sebagaimana disampaikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor Independen. Sedangkan untuk kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola yang disajikan dalam laporan ini hanya mencakup PT Pelindo Terminal Petikemas. Pelaporan tentang ketiga kinerja tersebut sekaligus merupakan upaya Perseroan mendukung pencapaian tujuan pembangunan global, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs), yang telah diadopsi Indonesia menjadi SDGs Indonesia (<http://sdgsindonesia.or.id/>). Laporan sebelumnya terbit pada September 2023. (GRI 2-2)

Data keuangan dalam laporan ini menggunakan mata uang Rupiah, kecuali diindikasikan lain. Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Data kuantitatif dalam laporan ini disajikan dengan menggunakan prinsip daya banding (*comparability*) dalam tiga tahun berturut-turut. Dengan demikian, pengguna laporan dapat melakukan analisis tren tentang kinerja keberlanjutan Perseroan.

Rujukan Laporan dan Pernyataan Penggunaan

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan

PT Pelindo Terminal Petikemas, or SPTP, is committed to continuously improving the quality of transparency in implementing the principle of sustainability, namely aligning the achievement of economic, environmental, and social aspects in running a business. In line with this commitment, every year the company publishes a sustainability report as an integral part of the annual report of PT Pelindo Terminal Petikemas.

This report contains policies, challenges, and achievements of economic, social, and environmental performance along with their impacts during the period 1 January-31 December 2023. For economic performance, the report covers the achievements of PT Pelindo Terminal Petikemas and its subsidiaries as stated in the company's consolidated financial statements, which have been audited by an independent auditor. Meanwhile, the environmental, social, and governance performance presented in this report only covers PT Pelindo Terminal Petikemas. Reporting on these three performances is also an effort by the company to support the achievement of global development goals, namely the Sustainable Development Goals (SDGs), which have been adopted by Indonesia as the Indonesian SDGs (<http://sdgsindonesia.or.id/>). Previous report published on September 2023. (GRI 2-2)

The financial data in this report uses Rupiah currency, unless otherwise indicated. The report is prepared in two languages, namely Indonesian and English. Quantitative data in this report are presented using the principle of comparability for three consecutive years. Thus, users of the report can conduct trend analysis on the company's sustainability performance.

Report References and Statement of Use

This report is prepared based on Financial Services Authority Regulation No.51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers,

Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan, dan GRI Universal Standards 2021 (*GRI Standards*). Dalam statusnya bukan sebagai lembaga jasa keuangan, emiten maupun perusahaan publik, SPTP tidak terkena kewajiban untuk mengadopsi dan menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan, yang di dalamnya mengatur tentang keharusan perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan. Namun demikian, sebagai bentuk apresiasi atas keberadaan peraturan tersebut, sekaligus karena spirit di dalamnya selaras dengan semangat keberlanjutan yang dimiliki Perseroan, maka POJK Keuangan menjadi rujukan penyusunan laporan ini.

Sementara itu, *GRI Standards* yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) – lembaga yang dibentuk oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan—diadopsi sebagai rujukan karena merupakan panduan internasional yang paling banyak dipakai di tingkat global. Sesuai pernyataan penggunaan yang disediakan *GRI Standards*, SPTP telah melaporkan informasi yang dikutip pada indeks konten GRI untuk periode dari 1 Januari–31 Desember 2023 merujuk pada *GRI Standards*. (GRI 2-3)

Untuk memudahkan pembaca menemukan informasi yang sesuai dengan rujukan, kami menyertakan penanda khusus berupa angka dan huruf sesuai Isi Laporan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan, atau pencantuman angka pengungkapan *GRI Standards* di belakang kalimat atau alinea yang relevan. Data lengkap kecocokan isi laporan dengan kedua rujukan disajikan di bagian belakang laporan ini. Kami berharap laporan ini bisa menjadi rujukan bagi segenap pemangku kepentingan untuk mengetahui pelaksanaan kinerja keberlanjutan Perseroan selama tahun pelaporan dan tahun-tahun sebelumnya. Selain edisi cetak, laporan yang sama dapat diakses melalui situs perusahaan: www.pelindotpk.co.id

and Public Companies or POJK Sustainable Finance, and GRI Universal Standards 2021 (*GRI Standards*). In its status as neither a financial services institution, issuer nor public company, SPTP is not required to adopt and implement POJK Sustainable Finance, which regulates the requirement for companies to publish sustainability reports. However, as a form of appreciation for the existence of these regulations, as well as because the spirit therein is in line with the spirit of sustainability possessed by the Company, POJK Finance is the reference for compiling this report.

Meanwhile, the *GRI Standards* issued by the *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) – an institution formed by the *Global Reporting Initiative* (GRI) to handle the development of sustainability reporting standards – were adopted as a reference because they are the most widely used international guidelines globally. In accordance with the usage statement provided by *GRI Standards*, SPTP has reported the information cited in the GRI content index for the period from 1 January to 31 December 2023 referring to *GRI Standards*. (GRI 2-3)

To make it easier for readers to find information that is in accordance with the reference, we include special markers in the form of numbers and letters according to the Contents of the Sustainability Report as regulated in Appendix II of the POJK on Sustainable Finance, or the inclusion of *GRI Standards* disclosure numbers behind the relevant sentences or paragraphs. Complete data on the suitability of the report content with both references is presented at the back of this report. We hope that this report can be a reference for all stakeholders to find out the implementation of the Company's sustainability performance during the reporting year and previous years. In addition to the printed edition, the same report can be accessed through the company's website: www.pelindotpk.co.id

Perubahan Terkait Laporan

Pada Laporan Keberlanjutan 2023 tidak terdapat perubahan terkait topik material dibanding tahun sebelumnya. Keputusan tersebut diambil setelah SPTP melakukan peninjauan terhadap topik material tahun 2022 dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal antara lain konsultan dan pengguna laporan sesuai panduan GRI Standards Universal Tahun 2021. Melalui peninjauan tersebut, selain mengidentifikasi dan menilai dampak secara berkesinambungan, sekaligus Perseroan dapat memastikan bahwa topik material dalam laporan ini mewakili dampak paling signifikan selama tahun pelaporan. Peninjauan topik material dilakukan dalam rapat 23 April 2024 di kantor Perseroan. (GRI 3-1)

Report-Related Changes

In the 2023 Sustainability Report, there are no changes related to material topics compared to the previous year. This decision was taken after SPTP conducted a review of the 2022 material topics by involving internal and external stakeholders, including consultants and report users in accordance with the 2021 GRI Standards Universal guidelines. Through this review, in addition to identifying and assessing impacts on an ongoing basis, the Company can also ensure that the material topics in this report represent the most significant impacts during the reporting year. The review of material topics was conducted in a meeting on April 23, 2024 at the Company's office. (GRI 3-1)

Proses untuk Menentukan Topik Material

Process for Determining Material Topic



Berdasarkan kesepakatan di atas, maka topik material tahun 2023 adalah sama dengan tahun 2022, yaitu terdiri atas sembilan topik. Selanjutnya, daftar tersebut telah disetujui oleh Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab penyusunan laporan yang telah mendapatkan otoritas dari Direksi. Daftar topik material Laporan Keberlanjutan SPTP Tahun 2023 selengkapnya adalah sebagai berikut: (GRI 3-2)

Based on the agreement above, the material topics for 2023 are the same as for 2022, consisting of nine topics. Furthermore, the list has been approved by Corporate Secretary as the person in charge of compiling the report who has received authority from the Board of Directors. The complete list of material topics for the SPTP Sustainability Report for 2023 is as follows: (GRI 3-2)

Topik Material dan Batasan (*Boundary*) Tahun 2023

Materials and Boundaries Topics 2023

Topik Material Material Topics	Kenapa Topik Ini Material (GRI 3-3) Why This Topic is Material (GRI 3-3)	Nomor Pengungkapan GRI Standards GRI Standards Disclosure Number	Batasan (Boundary) Topik Topic Boundaries		SDGs./TPB
			Di dalam SPTP In SPTP	Di Luar SPTP Outside SPTP	
TOPIK EKONOMI/ ECONOMIC TOPICS					
Kinerja Ekonomi Economic Performance	Menggambarkan pencapaian dan kinerja Perseroan selama tahun pelaporan. Describes the Company's achievements and performance during the reporting year.	201-1 201-2 201-3 201-4	✓		 
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	Menggambarkan manfaat atas keberadaan Perseroan bagi masyarakat di sekitarnya. Describes the benefits of the Company's existence for the surrounding community	203-1 203-2	✓	✓	    
Antikorupsi Anti-corruption	Menggambarkan komitmen Perseroan menyelenggarakan operasional usaha secara bersih dan transparan Describes the Company's commitment to conducting business operations in a clean and transparent manner.	205-1 205-2 205-3	✓	✓	
TOPIK LINGKUNGAN /TOPIK LINGKUNGAN					
Energi Energy	Menggambarkan kepedulian Perseroan terhadap pengelolaan energi tak terbarukan yang ketersediaannya kian terbatas Describes the Company's concern for the management of non-renewable energy, the availability of which is increasingly limited.	302-1 302-2 302-4 302-5	✓	✓	
Air dan Air Limbah (Efluen) Water and Wastewater (Effluent)	Menggambarkan kepedulian Perseroan terhadap pengelolaan sumber daya air bersih yang ketersediaannya kian terbatas Describes the Company's concern for the management of clean water resources, the availability of which is increasingly limited.	303-1 303-2 303-3	✓	✓	

Topik Material dan Batasan (Boundary) Tahun 2023

Materials and Boundaries Topics 2023

Topik Material Material Topics	Kenapa Topik Ini Material (GRI 3-3) Why This Topic is Material (GRI 3-3)	Nomor Pengungkapan GRI Standards GRI Standards Disclosure Number	Batasan (Boundary) Topik Topic Boundaries		SDGs./TPB
			Di dalam SPTP In SPTP	Di Luar SPTP Outside SPTP	
TOPIK SOSIAL/TOPIK SOSIAL					
Ketenagakerjaan Employment	Menggambarkan komitmen Perseroan tentang pentingnya pengelolaan pegawai/SDM Describes the Company's commitment to the importance of employee/HR management	401-1 401-2	✓		  
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	Menggambarkan komitmen Perseroan tentang pentingnya mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman Describes the Company's commitment to the importance of creating a healthy and safe work environment.	403-1 403-2 403-3 403-4 403-5 403-6 403-7 403-8 403-9 403-10	✓		
Pelatihan dan pendidikan Training and education	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja Describes the Company's commitment to improving employee competency.	404-1 404-2 404-3	✓		  
Keberagaman dan Kesempatan Setara Diversity and Equal Opportunity	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam memberikan kesempatan yang sama kepada manajemen dan karyawan untuk maju dan berkembang tanpa diskriminasi. Describes the Company's commitment to providing equal opportunities to management and employees to advance and develop without discrimination.	405-1 405-2	✓		  

Pernyataan Ulang Informasi

Untuk mendukung validitas isi laporan, apabila terdapat pernyataan ulang informasi yang diberikan dalam laporan sebelumnya, kami memberi tanda *disajikan kembali. (GRI 2-4)

Verifikasi oleh Pihak Independen

Laporan ini belum dilakukan verifikasi oleh pihak ketiga yang independen (*external assurance*). Namun demikian, SPTP menjamin keabsahan dan kebenaran seluruh pengungkapan informasi dalam laporan ini. (GRI 2-5)

Akses Informasi Atas Laporan Keberlanjutan

Laporan ini ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai salah satu landasan melakukan penilaian atas kinerja Perseroan. Segenap pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi mengenai sejauh mana SPTP berperan serta dalam menjalankan kewajibannya bagi keberlanjutan bidang lingkungan, ekonomi dan sosial terkait praktik bisnisnya. Untuk itu, Perseroan memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan untuk membaca dan menelaah laporan ini. Apabila ada pertanyaan terkait isi laporan silakan menghubungi: (GRI 2-3)

Sekretaris Perusahaan

PT Pelindo Terminal Petikemas

Jl. Perak Timur No. 478, Surabaya 60165, Indonesia
Surel : info.tpk@pelindo.co.id

Restatement of Information

To support the validity of the report content, if there is a restatement of information provided in the previous report, we mark it with *restated. (GRI 2-4)

Verification by Independent Party

This report has not been verified by an independent third party (*external assurance*). However, SPTP guarantees the validity and accuracy of all information disclosures in this report. (GRI 2-5)

Access to Information on the Sustainability Report

This report is intended for all stakeholders as one of the bases for assessing the Company's performance. All stakeholders can evaluate the extent to which SPTP has participated in carrying out its obligations for environmental, economic and social sustainability related to its business practices. For this reason, the Company provides the widest possible access to information for stakeholders to read and review this report. If you have any questions regarding the contents of the report, please contact: (GRI 2-3)

Corporate Secretary

PT Pelindo Terminal Petikemas

Jl. Perak Timur No. 478, Surabaya 60165, Indonesia
Surel : info.tpk@pelindo.co.id

Penjelasan Direksi [OJK D.1][GRI 2-22]

Board of Directors' Explanation [OJK D.1][GRI 2-22]



”

M. Adji

Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) dapat melalui tahun 2023 dengan membukukan kinerja positif. Selain mencatatkan peningkatan kinerja dibanding tahun sebelumnya, Perseroan juga membukukan target yang optimal, bahkan raihan laba tahun berjalan melebihi target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023. Bagi SPTP, keberhasilan tersebut merupakan cerminan atas ketepatan inisiatif strategis yang diimplementasikan secara konsisten selama tahun pelaporan.

Esteemed Shareholders and Stakeholders

We express our gratitude to God Almighty because, with His permission, PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) was able to navigate the year 2023 with positive performance. In addition to recording improved performance compared to the previous year, the company also achieved optimal targets, with the profit for the year even exceeding the target set in the 2023 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). For SPTP, this success reflects the accuracy of the strategic initiatives that were consistently implemented throughout the reporting year.

Selain faktor internal, pencapaian tersebut tak lepas dari keberhasilan pemerintah menangani pandemi COVID-19 sehingga memungkinkan masyarakat beraktivitas secara normal. Lebih lanjut, keeluasaan tersebut bermuara dengan bertumbuhnya perekonomian Indonesia tahun 2023 sebesar 5,05%, sebagaimana disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh 17 lapangan usaha yang dijadikan indikator BPS dalam menyusun data pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan signifikan, bahkan menempati peringkat pertama adalah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan sebesar 13,96%. Menurut BPS, pertumbuhan lapangan usaha ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengguna jasa angkutan penumpang, volume pengiriman barang ekspor-impor, dan peningkatan kunjungan wisatawan.

Untuk pengiriman barang, secara spesifik, data BPS menyebutkan selama Januari–Desember 2023, jumlah barang yang diangkut mencapai 351,0 juta ton atau naik 9,47% dibanding periode yang sama tahun 2022. Peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Panjang sebesar 11,61%; Tanjung Perak sebesar 5,95%; dan Tanjung Priok sebesar 5,31%.

In addition to internal factors, this achievement is also due to the government's success in managing the COVID-19 pandemic, which allowed the public to resume normal activities. Furthermore, this freedom led to the growth of Indonesia's economy by 5.05% in 2023, as reported by the Central Bureau of Statistics (BPS). This growth was supported by 17 sectors that BPS uses as indicators in compiling national economic growth data.

One of the sectors that recorded significant growth, even ranking at first place, is the Transportation and Warehousing sector, with a growth of 13.96%. According to BPS, the growth in this sector was influenced by the increase in the number of passenger transport users, the volume of export-import shipments, and the rise in tourist visits.

For cargo shipments, specifically, BPS data indicates that during January–December 2023, the amount of cargo transported reached 351.0 million tons, an increase of 9.47% compared to the same period in 2022. The increase in cargo transported occurred at Panjang Port by 11.61%, Tanjung Perak by 5.95%, and Tanjung Priok by 5.31%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, terkhusus bertumbuhnya Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, turut memengaruhi kinerja SPTP yang kegiatan usahanya antara lain berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas. Melalui laporan keberlanjutan inilah, pencapaian kinerja aspek ekonomi tersebut kami sampaikan. Sebagaimana prinsip keberlanjutan yang merujuk pada kerangka *triple bottom line* yaitu *profit*, *people* dan *planet*, maka kami juga menyampaikan pencapaian kinerja aspek sosial dan lingkungan dalam laporan ini.

Dukungan SPTP Terhadap Kegiatan Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sejumlah regulasi dan panduan telah diterbitkan pemerintah di antaranya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Secara spesifik, bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Dalam arti luas, keuangan berkelanjutan dapat dimaknai sebagai kegiatan berkelanjutan (*sustainable operation*), yaitu kegiatan operasi perusahaan yang dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Dalam statusnya bukan sebagai emiten dan perusahaan publik, SPTP mendukung penerapan POJK Keuangan Berkelanjutan karena meyakini bahwa fungsi suatu perusahaan bukan hanya mencetak laba tetapi juga dituntut menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menunjukkan kepedulian pada isu-isu sosial. Dukungan Perseroan terhadap pembangunan berkelanjutan

The sustained economic growth of Indonesia, particularly the growth in the Transportation and Warehousing sector, has also influenced the performance of SPTP, whose business activities include providing and/or servicing wharves for loading and unloading goods and containers. Through this sustainability report, we present the performance achievements in the economic aspect. As the sustainability principle refers to the triple bottom line framework of profit, people, and planet, we also present the performance achievements in the social and environmental aspects in this report.

SPTP's Support for Sustainable Activities

The Government of Indonesia is committed to implementing sustainable development in accordance with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020–2024. Sustainable development is defined as a conscious and planned effort that integrates environmental, social, and economic aspects into development strategies to ensure the integrity of the environment as well as the safety, capacity, welfare, and quality of life of present and future generations.

To achieve sustainable development, the government has issued several regulations and guidelines, including Presidential Regulation No. 111 of 2022 on the Implementation of Achieving Sustainable Development Goals (SDGs). Specifically, for financial institutions, issuers, and public companies, the Financial Services Authority (OJK) issued OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Institutions, Issuers, and Public Companies, or the OJK Sustainable Finance Regulation. In a broader sense, sustainable finance can be interpreted as sustainable operation, meaning company operations that consider economic, environmental, and social aspects.

Although SPTP is not an issuer or a public company, it supports the implementation of the OJK Sustainable Finance Regulation because it believes that a company's function is not only to generate profit but also to maintain environmental sustainability and demonstrate concern for social issues. The company's support for sustainable development and sustainable operations is

dan kegiatan berkelanjutan antara lain diwujudkan dengan mengalokasikan sebagian dana untuk membiayai berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Selain itu, Perseroan juga mengoptimalkan operasional kantor dan terminal peti kemas yang ramah lingkungan.

Kebijakan SPTP untuk Merespons Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan [OJK A.1]

SPTP menjalankan usaha dengan berpegang pada budaya Perusahaan yaitu AKHLAK, akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Selain itu, Perseroan juga memiliki tiga pilar strategis yaitu keunggulan operasional dan komersial, optimalisasi jaringan ekosistem, serta strategi pertumbuhan dan ekspansi. Lebih lanjut, sebagai pedoman dalam menjalin hubungan dengan semua pemangku kepentingan, Perseroan memadukan budaya keberlanjutan dan pilar strategis tersebut dengan Kode Etik (*Code of Conduct*). Untuk mengukuhkan pedoman tersebut, Perseroan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan dan media, baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Kegiatan sosialisasi sekaligus menjadi momentum bagi SPTP untuk menyampaikan rencana kerja dan inisiatif strategis keberlanjutan tahun 2023.

Pada tahun pelaporan, sejumlah tantangan faktual dan potensial dihadapi SPTP dalam menjalankan strategi keberlanjutan, baik terkait aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial. Tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi Perseroan antara lain di PT Terminal Petikemas Surabaya, sedimentasi kolam dermaga domestik dapat berdampak terhadap tidak terlayannya kapal domestik di atas -6 mlws; di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, pengguna jasa belum sepenuhnya melakukan stack muat 100%; di PT Kaltim Kariangau Terminal, permasalahan strategis yang dihadapi terkait penyesuaian tarif petikemas; sedangkan di PT Prima Multi Terminal, permasalahan strategis terkait pengerukan kolam dermaga di TPK Domestik Belawan. Selain itu, permasalahan strategis yang lain adalah belum terealisasinya rencana kerjasama investasi dan operasi Belawan New Container Terminal antara PT Prima Terminal Petikemas dan New Co.

realized, among other things, by allocating a portion of its funds to finance various Social and Environmental Responsibility (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR) programs. In addition, the company also optimizes environmentally friendly office and container terminal operations.

SPTP's Policy to Respond to Challenges in Fulfilling the Sustainability Strategy [OJK A.1]

SPTP operates by adhering to the company's culture, which is summarized in the acronym AKHLAK, standing for Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative. Furthermore, the company has three strategic pillars: operational and commercial excellence, ecosystem network optimization, and growth and expansion strategy. In addition, as a guideline for establishing relationships with all stakeholders, the company integrates the sustainability culture and these strategic pillars with the Code of Conduct. To reinforce this guideline, the company continuously promotes it through various activities and media, both to internal and external stakeholders. These promotional activities also serve as an opportunity for SPTP to communicate its 2023 sustainability strategic initiatives and work plans.

During the reporting year, SPTP faced several factual and potential challenges in implementing the sustainability strategy, covering economic, environmental, and social aspects. The strategic challenges and issues faced by the company include sedimentation in the domestic port basin at PT Terminal Petikemas Surabaya, which may affect the servicing of domestic vessels above -6 mlws; incomplete 100% stack loading by service users at PT Berlian Jasa Terminal Indonesia; container tariff adjustment issues at PT Kaltim Kariangau Terminal; and dredging issues at the port basin in the Domestic Belawan Container Terminal at PT Prima Multi Terminal. Additionally, another strategic issue is the unrealized investment and operational cooperation plan for the Belawan New Container Terminal between PT Prima Terminal Petikemas and New Co.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan strategis tersebut, Perseroan telah melakukan langkah dan upaya terbaik, terkhusus dalam kaitannya dengan dukungan dari pemegang saham. Untuk permasalahan di PT Terminal Petikemas Surabaya misalnya, Perseroan mengajukan dukungan ke pemegang saham berupa persetujuan biaya pengerukan kolam dermaga domestik senilai ± Rp6 miliar; untuk permasalahan di PT Terminal Petikemas Surabaya, Perseroan mengajukan dukungan pemegang saham tentang standardisasi kebijakan stack muat di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak; sedangkan untuk permasalahan di PT Kaltim Kariangau Terminal, *Head Office* Pelindo telah bersurat ke Kementerian Perhubungan untuk Proses Konsultasi Penyesuaian Tarif Jasa Petikemas di Terminal Petikemas Kariangau Balikpapan.

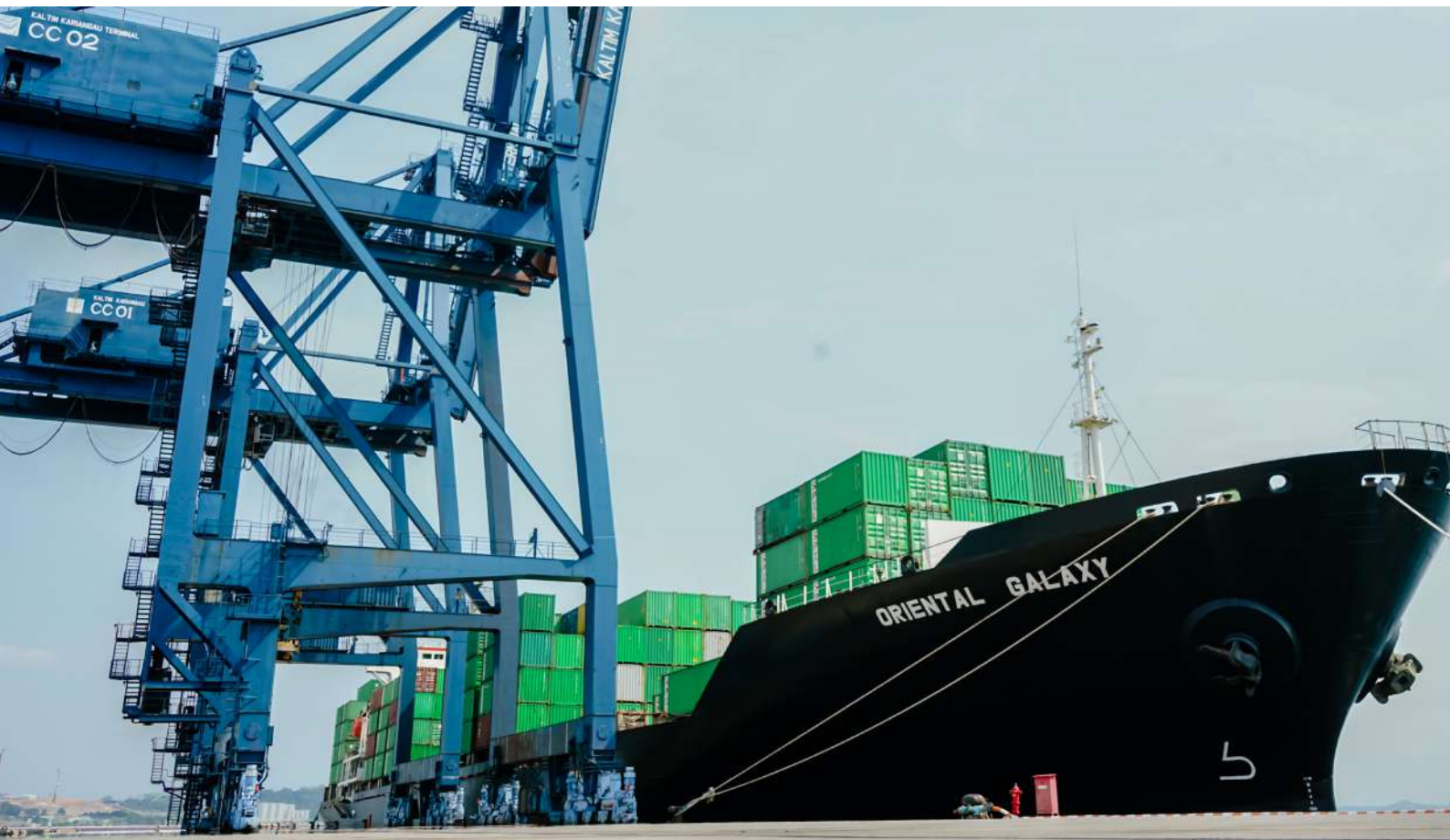
Selain tantangan dan permasalahan strategis di atas, tantangan dan permasalahan lain yang potensial terjadi dan muncul dari pihak eksternal adalah adanya dampak negatif dari aspek lingkungan dan sosial atas operasional SPTP. Untuk mengantisipasi dan menangani dampak tersebut, selain membuka kanal pengaduan serta mematuhi regulasi terkait lingkungan dan sosial, Perseroan melaksanakan berbagai program TJSL/CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk program yang bertujuan untuk mengeliminasi dampak negatif. Tak sekadar menjadi media pelibatan masyarakat, program TJSL/CSR sekaligus merupakan implementasi komitmen Perseroan agar keberadaannya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Konsistensi SPTP menjalankan bisnis dan strategi keberlanjutan, termasuk menjaga keselarasan antara kinerja aspek ekonomi, sosial dan lingkungan mendapatkan apresiasi dari pihak eksternal berupa penghargaan. Selama tahun 2023, Perseroan meraih penghargaan di antaranya Penghargaan *Best CSR Program Excellence in Green and Environmental Management Best Workplace Environment*, meraih 16 Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, tiga Penghargaan HCREA 2023, tiga Penghargaan dari IDEAS 2023, penghargaan dari PR Indonesia sebagai 106 Perusahaan yang berpengaruh pada bidang komunikasi di Indonesia; penghargaan dalam kategori Implementasi dan Pemanfaatan Teknologi Digital dari TOP DIGITAL Awards 2023, serta Penghargaan di Forum Pelabuhan Global 2023 Dubai.

To address these strategic issues, the company has taken the best steps and efforts, particularly with support from shareholders. For example, regarding issues at PT Terminal Petikemas Surabaya, the company requested shareholder support for the approval of approximately IDR 6 billion for the dredging of the domestic port basin; for issues at PT Terminal Petikemas Surabaya, the company sought shareholder support for the standardization of stack loading policies at Tanjung Perak Port; while for issues at PT Kaltim Kariangau Terminal, Pelindo's Head Office has written to the Ministry of Transportation regarding the consultation process for adjusting container service tariffs at the Kariangau Balikpapan Container Terminal.

In addition to the above strategic challenges and issues, potential challenges and problems arising from external parties include negative environmental and social impacts from SPTP's operations. To anticipate and address these impacts, the company not only opens complaint channels and adheres to environmental and social regulations but also implements various TJSL/CSR programs according to community needs, including programs aimed at eliminating negative impacts. TJSL/CSR programs are not only a means of engaging the community but also an implementation of the company's commitment to ensuring its presence provides optimal benefits to society.

SPTP's consistency in conducting business and sustainability strategies, including maintaining alignment between economic, social, and environmental performance, has been recognized externally with awards. During 2023, the company received several awards including Best CSR Program Excellence in Green and Environmental Management, Best Workplace Environment, 16 Occupational Health and Safety (K3) awards from the Ministry Manpower of the Republic of Indonesia, three HCREA 2023 awards, three IDEAS 2023 awards, an award from PR Indonesia as one of the 106 influential companies in the field of communication in Indonesia, an award in the category of Digital Technology Implementation and Utilization from the TOP DIGITAL Awards 2023, and an award at the Global Port Forum 2023 in Dubai.



Penerapan Kegiatan Berkelanjutan Tahun 2023

Selama tahun 2023, SPTP telah melaksanakan operasional bisnis sesuai kaidah kegiatan berkelanjutan dengan menyelaraskan pencapaian aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dengan hasil sebagai berikut:

Kinerja Aspek Ekonomi

Per 31 Desember 2023, selain mencatatkan peningkatan kinerja dibanding tahun 2022, SPTP berhasil mewujudkan target-target dalam RKAP tahun 2023 secara optimal, bahkan Laba Tahun Berjalan melampaui target. Dari sisi trafik, selama tahun pelaporan, Arus Petikemas tercatat sebanyak 11.530.293 Teu's atau 98,47% dari target 11.709.201 Teu's, atau 112,50% dari tahun sebelumnya; Arus Barang sebanyak 2.727.097 ton atau 58% dari target 4.671.934 ton atau 109,19% dari tahun 2022.

Dari posisi keuangan, Aset tercatat sebesar Rp18,66 triliun atau 98,28% dari target Rp18,99 triliun atau 124,48% dari pencapaian tahun 2022;

Implementation of Sustainable Activities in 2023

Throughout 2023, SPTP has conducted business operations in accordance with sustainable activity principles by aligning achievements in economic, environmental, and social aspects with the following results:

Economic Aspect Performance

As of December 31, 2023, in addition to recording improved performance compared to 2022, SPTP successfully achieved the targets set in the 2023 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) optimally, with the profit for the year exceeding the target. In terms of traffic, during the reporting year, Container Throughput reached 11,530,293 TEUs, or 98.47% of the target of 11,709,201 TEUs, and 112.50% of the previous year's figure; Cargo Throughput was 2,727,097 tons, or 58% of the target of 4,671,934 tons, and 109.19% of 2022's figure.

From a financial position, Assets were recorded at IDR 18.66 trillion, or 98.28% of the target of IDR 18.99 trillion, and 124.48% of the achievement in 2022;

Liabilitas terbilang sebesar Rp4,99 triliun atau 82,47% dari target Rp6,05 atau 73,27% dari raihan tahun sebelumnya; dan Ekutias sebesar Rp13,67 triliun atau 111,28% dari target Rp12,28 triliun atau 228,98% dari perolehan tahun 2022.

Selanjutnya, untuk perhitungan laba (rugi), Pendapatan Usaha terbilang sebesar Rp12,74 triliun atau 96,39% dari target Rp13,21 triliun atau 113,04% dari perolehan tahun 2022; Beban Usaha tercatat sebesar Rp10,31 triliun atau 98,40% dari target Rp10,48 triliun atau 114,94% dari raihan tahun sebelumnya; sedangkan Laba (Rugi) Tahun Berjalan terbilang sebesar Rp2,21 triliun atau 105,98% dari target Rp2,08 triliun atau 140,76% dari pencapaian tahun 2022.

Kinerja Aspek Lingkungan

Komitmen SPTP terhadap aspek lingkungan direalisasikan dengan mematuhi berbagai regulasi terkait lingkungan saat membangun perkantoran, pelabuhan maupun terminal petikemas. Seiring dengan itu, dalam pengoperasian kantor, pelabuhan dan terminal, Perseroan mengedepankan praktik ramah lingkungan melalui pengelolaan energi, emisi, air, air limbah, limbah, dan sebagainya, dengan berpedoman pada prinsip 3R (*Reduce, Reuse & Recycle*). Lebih lanjut, selaras dengan komitmen mewujudkan pelabuhan yang ramah lingkungan (*green port*), Perseroan juga mengadopsi ISO 1400:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan sebagai panduan pengelolaan lingkungan.

Program nyata yang dilakukan Perseroan untuk merealisasikan *green port* antara lain berupa implementasi *green technology* di pelabuhan. Per 31 Desember 2023, realisasi *Key Performance Indicator* (KPI) implementasi *green technology* tercatat sebesar 100%. Adapun program *green technology* yang dijalankan pada tahun 2023 adalah elektrifikasi 4 Unit RTG TPK Banjarmasin, elektrifikasi 2 Unit RMGC TPK Pontianak, serta elektrifikasi 3 Unit RMGC TPK Jambi di mana ketiganya capaiannya adalah 100%.

Kinerja Aspek Sosial

SPTP memenuhi tanggung jawab terhadap aspek sosial melalui berbagai program sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Kepada karyawan dan manajemen, Perseroan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis sehingga tidak ada pengaduan atau sengketa perburuhan. Selain itu, juga tidak tercatat adanya insiden diskriminasi dan pelanggaran hak-hak normatif karyawan lainnya,

Liabilities were recorded at IDR 4.99 trillion, or 82.47% of the target of IDR 6.05 trillion, and 73.27% of the previous year's result; and Equity was IDR 13.67 trillion, or 111.28% of the target of IDR 12.28 trillion, and 228.98% of the 2022 figure.

For profit (loss) calculation, Operating Revenue was IDR 12.74 trillion, or 96.39% of the target of IDR 13.21 trillion, and 113.04% of the 2022 figure; Operating Expenses were IDR 10.31 trillion, or 98.40% of the target of IDR 10.48 trillion, and 114.94% of the previous year's result; while Profit (Loss) for the year was IDR 2.21 trillion, or 105.98% of the target of IDR 2.08 trillion, and 140.76% of the 2022 achievement.

Environmental Aspect Performance

SPTP's commitment to environmental aspects is realized by adhering to various environmental regulations when building office buildings, ports, and container terminals. In line with this, in operating offices, ports, and terminals, the company prioritizes environmentally friendly practices through the management of energy, emissions, water, wastewater, waste, and so on, guided by the 3R principle (*Reduce, Reuse & Recycle*). Furthermore, in alignment with the commitment to achieving a green port, the company has also adopted ISO 14001:2015 on Environmental Management Systems as a guideline for environmental management.

Concrete programs implemented by the company to realize a green port include the adoption of green technology in ports. As of December 31, 2023, the realization of the Key Performance Indicator (KPI) for green technology implementation was recorded at 100%. The green technology programs carried out in 2023 include the electrification of 4 RTG units at TPK Banjarmasin, electrification of 2 RMGC units at TPK Pontianak, and electrification of 3 RMGC units at TPK Jambi, with all three achieving 100%.

Social Aspect Performance

SPTP fulfills its responsibilities in the social aspect through various programs tailored to the needs of each stakeholder. For employees and management, the company maintains harmonious industrial relations, resulting in no labor complaints or disputes. Additionally, there have been no reported incidents of discrimination or violations of other employee rights, such as forced labor, child labor, minimum wage provision,

seperti kerja paksa, pekerja anak, pemberian upah minimum, dan sebagainya. Selain merealisasikan lingkungan kerja yang sehat dan aman, Perseroan juga konsisten melakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi karyawan. Selama tahun pelaporan, Perseroan telah menyelenggarakan 212 judul pelatihan yang diikuti oleh 4.080 karyawan organik dan non-organik dengan persentase rasio pekerja yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 162% dari total pekerja dari target sebanyak 2.520 orang. Untuk membiayai program ini, Perseroan merealisasikan anggaran sebesar Rp47.968.482.536 dari RKAP Tahun 2023 sebesar Rp48.414.107.255 atau tercapai sebesar 99%.

Adapun untuk pelanggan, Perseroan senantiasa melakukan berbagai inovasi pengembangan produk/layanan agar sesuai dengan harapan mereka, termasuk percepatan *dwelling time*. Selaras dengan itu, SPTP juga menyiapkan kanal pengaduan serta responsif dan memberikan solusi terbaik atas keluhan/pengaduan yang masuk. Atas komitmen tersebut, tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan SPTP tercatat sebesar 4,05 dari skala 5.

Sementara itu, untuk pemerintah, Perseroan memenuhi tanggung jawab dengan membayarkan pajak sebesar Rp1,29 triliun; untuk pemasok, SPTP memperlakukan semua pemasok secara setara terkait informasi dan proses tender; adapun untuk masyarakat, Perseroan berkomitmen untuk memberdayakan mereka melalui pelaksanaan berbagai program TJSL/CSR dengan biaya sebesar Rp20,25 miliar, yang sekaligus merupakan upaya nyata dan dukungan konkret Perseroan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Strategi Pencapaian Target

Keselarasan merupakan prinsip dasar dalam penerapan kegiatan berkelanjutan. Oleh karena itu, SPTP meyakini bahwa aspek lingkungan dan sosial berkelanjutan akan dipengaruhi oleh pencapaian dalam mewujudkan target-target kinerja aspek ekonomi yang disampaikan dalam RKAP Tahun 2023. Untuk itu, Perseroan telah menetapkan serangkaian inisiatif strategis untuk meraih target-target tersebut. Inisiatif strategis disusun dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 serta agenda prioritas BUMN.

and so on. Besides ensuring a healthy and safe work environment, the company is also consistent in implementing various education and training programs to develop employee competencies. During the reporting year, the company conducted 212 training sessions attended by 4,080 organic and non-organic employees, with a training participation ratio of 162% of the target of 2,520 employees. To fund these programs, the company allocated IDR 47,968,482,536 from the 2023 RKAP budget of IDR 48,414,107,255, achieving 99%.

For customers, the company continually innovates in product/service development to meet their expectations, including accelerating dwelling time. In line with this, SPTP has also established a complaint channel and is responsive in providing the best solutions to complaints. Due to this commitment, customer satisfaction with SPTP's products/services is recorded at 4.05 on a scale of 5.

Meanwhile, for the government, the company fulfills its responsibility by paying taxes amounting to IDR 1.29 trillion. For suppliers, SPTP treats all suppliers equally in terms of information and tender processes. Regarding the community, the company is committed to empowering them through various TJSL/CSR programs with a budget of IDR 20.25 billion, which also represents the company's tangible support for the Sustainable Development Goals (SDGs).

Target Achievement Strategy

Alignment is a fundamental principle in implementing sustainable activities. Therefore, SPTP believes that sustainable environmental and social aspects will be influenced by achieving the performance targets outlined in the 2023 RKAP. To this end, the company has established a series of strategic initiatives to achieve these targets. These strategic initiatives are developed with reference to the Strategic Plan of the Ministry of State-Owned Enterprises for 2020-2024 and the priority agenda for SOEs.

Inisiatif strategis SPTP tahun 2023 di antaranya Standardisasi Operasi Pelabuhan Petikemas; Digitalisasi & Sistemisasi Operasi Pelabuhan Petikemas; Pengembangan Peralatan dan Infrastruktur Pelabuhan; *Key Account Management* yang Terintegrasi; Pengembangan Pelabuhan melalui Kerjasama dengan Mitra Strategis; Optimalisasi Konsep *Hub and Spoke* melalui Kerjasama dengan Perusahaan Pelayaran Domestik; Alokasi Modal Terintegrasi; Penguatan *Corporate Branding & Marketing Communication*; *Program Learning & Development* Terpadu untuk Standarisasi dan Peningkatan Kualitas SDM; Perencanaan Ekspansi Regional di Bisnis Petikemas; Eksplorasi Pengembangan Pelabuhan *Transshipment* Petikemas Domestik & Internasional; dan Eksplorasi Kontainerisasi untuk Mendukung Pengembangan Bisnis Petikemas.

Selanjutnya, untuk menjaga agar kinerja ekonomi dan implementasi inisiatif strategis berjalan sesuai dengan rencana, Perseroan melakukan monitoring secara berkala yang pembahasannya disampaikan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Selain bisa mengetahui target dan pencapaian, monitoring juga penting untuk menetapkan solusi jika ada hambatan atau tantangan di tengah jalan.

Prospek dan Peluang

Keberhasilan pemerintah mencatatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada tahun 2023 merupakan momentum untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi yang stabil sebagaimana kondisi sebelum pandemi COVID-19. Kondisi tersebut akan mendorong bertumbuhnya berbagai lapangan usaha, termasuk Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, yang bisa menjadi momentum bagi SPTP untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Untuk itu, Perseroan telah menetapkan berbagai target dalam RKAP Tahun 2024, terkhusus pada aspek ekonomi. Pendapatan Usaha Bersih misalnya, Perseroan menargetkan sebesar Rp12,10 triliun, Beban Usaha sebesar Rp9,96 triliun, dan Laba Setelah Pajak Tahun Berjalan sebesar Rp1,77 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Perseroan telah menetapkan serangkaian inisiatif dan kebijakan strategis serta berkomitmen untuk bersinergi dalam mewujudkannya. Dengan upaya tersebut, Perseroan optimistis dapat meraih target RAKP 2024 demi mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

The strategic initiatives for SPTP in 2023 include the standardization of container port operations, digitalization and systematization of container port operations, development of port equipment and infrastructure, integrated key account management, and port development through partnerships with strategic partners. Additionally, the company focuses on optimizing the hub and spoke concept through collaboration with domestic shipping companies, integrated capital allocation, strengthening corporate branding and marketing communication, integrated learning and development programs for standardization and quality improvement of human resources, regional expansion planning in the container business, exploration of domestic and international container transshipment port development, and exploration of containerization to support container business development.

Furthermore, to ensure that economic performance and the implementation of strategic initiatives proceed as planned, the company conducts regular monitoring, which is discussed in meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Monitoring is crucial not only for tracking targets and achievements but also for identifying solutions to any obstacles or challenges that arise.

Prospects and Opportunities

The government's success in achieving sustainable economic growth in 2023 represents a significant opportunity to establish a stable social and economic environment similar to the conditions before the COVID-19 pandemic. This environment will encourage the growth of various business sectors, including the Transportation and Warehousing sector, which can serve as a momentum for SPTP to develop and enhance its performance in the coming years. To that end, the company has set various targets in the 2024 RKAP, particularly in the economic aspect. For instance, the company targets net operating revenue of IDR 12.10 trillion, operating expenses of IDR 9.96 trillion, and profit after tax for the current year of IDR 1.77 trillion. To achieve these targets, the company has established a series of strategic initiatives and policies and is committed to synergizing in their implementation. With these efforts, the company is optimistic about achieving the 2024 RKAP targets and ensuring sustainable business operations.

Penutup

Keberhasilan SPTP membukukan kinerja optimal pada tahun 2023 mencerminkan operasional usaha yang sehat secara bisnis. Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan pergerakan aktivitas masyarakat, pencapaian tersebut tak lepas dari ketepatan implementasi atas berbagai inisiatif strategis yang ditetapkan Perseroan, serta dukungan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah melakukan pengawasan dan memberikan arahan sehingga Direksi dapat menjalankan strategi bisnis dengan baik. Ungkapan yang sama kami sampaikan kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola SPTP selama tahun pelaporan.

Kepada seluruh karyawan sebagai garda terdepan pelayanan dan operasional bisnis, kami juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang diberikan selama ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada pelanggan, mitra, pemerintah/regulator maupun masyarakat yang senantiasa mendukung keberadaan SPTP. Kami berharap dukungan dan tersebut tetap diberikan sehingga Perseroan semakin kokoh dan mampu memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan pemegang saham, sekaligus mewujudkan visi: **Operator terminal terkemuka yang berkelas dunia.**

Surabaya, 5 September 2024
Atas nama Direksi
PT Pelindo Terminal Petikemas

Closing

SPTP's success in achieving optimal performance in 2023 reflects a healthy business operation. Besides being influenced by external factors such as economic growth and community activity, this achievement is also a result of the effective implementation of various strategic initiatives set by the company, as well as support from various parties. In this regard, we extend our gratitude to the Board of Commissioners for their oversight and guidance, enabling the Board of Directors to execute the business strategy effectively. We also express our thanks to the shareholders for their trust in managing SPTP during the reporting year.

To all employees, who are at the forefront of service and business operations, we also convey our appreciation for their hard work, dedication, and loyalty. We further extend our gratitude to customers, partners, the government/regulators, and the community for their ongoing support of SPTP. We hope that this support will continue, allowing the company to grow stronger and meet the expectations of all stakeholders and shareholders, while realizing our vision of **becoming a world-class leading terminal operator.**

Surabaya, September 5, 2024
On behalf of the Board of Directors
PT Pelindo Terminal Petikemas

M. Adji

Direktur Utama
President Director





PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



Informasi dan Identitas Perusahaan

Information and Corporate Identity

**Nama Lengkap
Perusahaan [GRI 2-1]**
Company Full Name

**PT Pelindo Terminal
Petikemas**

Penyebutan Lain [GRI 2-1]
Other Names

SPTP

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

01 Oktober 2021
October 01, 2021

Tanggal Beroperasi
Date of Operation

01 Oktober 2021
October 01, 2021

NPWP
31.767.642.7-042.000

TDP
510/396/436.9.16.4/2022

SIUP
9120100362179



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis for Establishment

**Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021 tentang
Penggabungan PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) ke
dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).**

Government Regulation No. 101 of 2021 concerning the
Merger of PT Pelindo I, II, III and IV (Persero) into PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero).



Modal Dasar
Authorized Capital
Rp201.000.000.000,00

Modal Disetor
Paid-up Capital
Rp201.000.000.000,00



Bidang Usaha [GRI 2-6]
Business Segment

**Manajemen
Terminal Peti Kemas**
Management of
Container Terminal

Status Perusahaan
Company Status

**Anak Usaha
PT Pelabuhan
Indonesia (Persero)**
Subsidiary of
PT Pelabuhan
Indonesia (Persero)

**Pemegang Saham [GRI 2-1]
[OJK C.3]**
Shareholders

99.9%
**PT Pelabuhan Indonesia
(Persero)**
0.1%
**PT Integrasi Logistik
Cipta Solusi**

**Alamat Kantor Pusat
[GRI 2-1][OJK C.2]**
Head Office Address
Jl. Perak Timur No. 478,
Surabaya 60165, Indonesia

Situs web/ Website
www.pelindotpk.co.id

Surel/ Email
info.tpk@pelindo.co.id



Jumlah Karyawan/Number of Employees
7.625 orang/employees

Jumlah Kantor Pelayanan [GRI 2-6]
Number of Service Offices

1 Kantor Pusat, 7 Anak Perusahaan, dan 15 Terminal
1 Head Office, 7 Subsidiaries, and 15 Terminals



Sekilas SPTP

SPTP Overview

PT Pelindo Terminal Petikemas, yang selanjutnya disebut juga dengan "SPTP" atau "Perusahaan" sebelumnya bernama PT Terminal Petikemas Indonesia ("TPI") yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., tanggal 10 April 2013. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-21873.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 2013. [GRI 2-1]

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 18 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, tanggal 11 Oktober 2021, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan perubahan nama PT Terminal Petikemas Indonesia menjadi PT Pelindo Terminal Petikemas, perubahan modal, nama, tempat kedudukan, dan logo PT Pelindo Terminal Petikemas. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 08 tanggal 27 April 2022, tentang Penambahan Modal Disetor dan Ditempatkan serta Pengambilan Bagian Saham Baru Perusahaan, terkait dengan menetapkan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan tentang persetujuan atas penambahan modal yang ditempatkan dan disetor pada Perusahaan.

PT Pelindo Terminal Petikemas, hereinafter referred to as "SPTP" or "the Company," was previously known as PT Terminal Petikemas Indonesia ("TPI"), which was established based on Notarial Deed by Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., dated April 10, 2013. This deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-21873.AH.01.01 of 2013 dated April 24, 2013, and was published in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 10, 2013. [GRI 2-1]

Based on the Decision Statement of the General Meeting of Shareholders in Notarial Deed No. 18 by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, dated October 11, 2021, the shareholders approved and ratified the change of PT Terminal Petikemas Indonesia's name to PT Pelindo Terminal Petikemas, as well as changes in capital, name, domicile, and logo of PT Pelindo Terminal Petikemas. The Company's Articles of Association have undergone several amendments, the latest being in Notarial Deed by Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 08 dated April 27, 2022, concerning the Increase in Paid-Up and Subscribed Capital and the Issuance of New Shares, related to the amendment of Article 4 paragraph 2 of the Articles of Association regarding the approval of the increase in the capital paid-up and subscribed by the Company.

Jejak Langkah Perusahaan

Company Milestones

20 MEI 2012
Pelindo I-V

Berdasarkan gagasan Kementerian BUMN, Pelindo I, II, III, IV membentuk konsorsium untuk mendirikan PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI) dan mulai aktif beroperasi pada tahun 2014.

May 20, 2012
Pelindo I- V

Based on the idea of the Ministry of SOEs, Pelindo I, II, III, and IV formed a consortium to establish PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI) and began active operations in 2014.



29 SEPTEMBER 2020
Pergerakan Integrasi

Berdasarkan inisiasi Kementerian BUMN, integrasi kluster pelabuhan akan dilakukan sebagai bentuk transformasi dari Kementerian BUMN.

September 29, 2020
Integration Movement

Based on the initiation of the Ministry of SOEs, port cluster integration will be carried out as a form of transformation of the Ministry of SOEs.

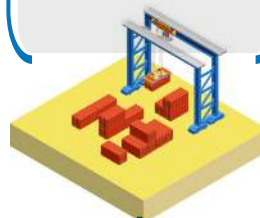


01 OKTOBER 2021
Integrasi Pelindo I-V

Integrasi Pelindo secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) serta telah ditandatangani pengalihan aset dari Pelindo I, III, dan IV ke Pelindo II.

October 1, 2021
Integration of Pelindo I-V

Pelindo Integration is officially formed based on Government Regulation Number 101 of 2021 concerning the Merger of PT Pelindo I, III, and IV (Persero), and the transfer of assets from Pelindo I, III, and IV to Pelindo II has been signed.



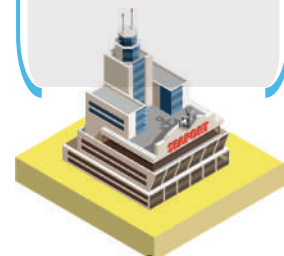
01 OKTOBER 2021

Perubahan Nama & Logo

Perubahan nama dan logo PT Terminal Petikemas Indonesia menjadi PT Pelindo Terminal Petikemas sebagai salah satu dari empat sub-holding yang dibentuk Pelindo dilakukan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang saham nomor SK.03/1/10/1/PBAS/UTMA/TLND-21 tanggal 01 Oktober 2021.

October 1, 2021
Name & Logo Change

The change of name and logo of PT Terminal Petikemas Indonesia to PT Pelindo Terminal Petikemas as one of the four sub-holdings formed by Pelindo was carried out based on the Circular Decree of Shareholders number SK.03/1/10/1/PBAS/UTMA/TLND-21 dated October 1, 2021.



Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan [GRI 2-23] [OJK C.1]

Vision, Mission, and Corporate Values [GRI 2-23] [OJK C.1]

Visi dan misi SPTP sejalan dengan visi dan misi dari Pelindo sebagai induk Perusahaan. Dalam pernyataan visi Pelindo terdapat beberapa pernyataan yang diharapkan dapat sejalan dengan visi SPTP seperti pemimpin ekosistem maritim, berkelas dunia, dan terintegrasi yang berarti SPTP diharapkan menjadi pemimpin bisnis peti kemas yang berkelas dunia serta terintegrasi dengan layanan jasa kepelabuhanan lainnya. Begitu pula dengan misi dari Pelindo diharapkan selaras dengan pernyataan misi di SPTP yang terlihat dari beberapa pernyataan misi seperti jaringan ekosistem maritim nasional, konektivitas jaringan, integrasi pelayanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

SPTP's vision and mission align with the vision and mission of Pelindo as the parent company. In Pelindo's vision statement, several statements are expected to be in line with SPTP's vision, such as the leader of the maritime ecosystem, world-class, and integrated, which means that SPTP is expected to be a world-class container business leader and integrated with other port services. Likewise, the mission of Pelindo is expected to be in line with the mission statement at SPTP, which can be seen from several mission statements, such as the national maritime ecosystem network, network connectivity, service integration, and Indonesia's economic growth.

Visi PT Pelindo (Persero)

Vision of PT Pelindo (Persero)

Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia

Becoming an Integrated and World-class Maritime Ecosystem Leader

Misi PT Pelindo (Persero)

Mission of PT Pelindo (Persero)

Mewujudkan Jaringan Ekosistem Maritim Nasional Melalui Peningkatan Konektivitas Jaringan dan Integrasi Pelayanan guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Realising the National Maritime Ecosystem Network through Improved Network Connectivity and Service Integration to Support Indonesia's Economic Growth Leader



Tata Nilai Perusahaan

Corporate Values

Seiring diterbitkannya Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, disampaikan bahwa setiap BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama (core values) SDM BUMN menjadi budaya perusahaan (corporate culture). Hal ini menjadi dasar pembentukan karakter SDM di lingkungan BUMN, anak Perusahaan, serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tersebut, maka PT Pelindo akan melakukan internalisasi nilai-nilai utama SDM BUMN, yang disebut sebagai AKHLAK, dengan penjabaran sebagai berikut:

Following the issuance of the Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020, regarding the Core Values of Human Resources in State-Owned Enterprises, it is stipulated that every SOE must adopt these core values into its corporate culture. This forms the basis for shaping the character of human resources within SOEs, subsidiaries, and consolidated affiliates.

Based on this Circular Letter, PT Pelindo will internalize the core values of SOE Human Resources, known as AKHLAK, which are detailed as follows:

AKHLAK

AMANAH

yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku:

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

KOMPETEN

yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

TRUSTWORTHY

To uphold the trust given. Behavioral Guidelines:

- Fulfill promises and commitments
- Take responsibility for tasks, decisions, and actions
- Adhere strictly to moral and ethical values

COMPETENT

To care for and respect differences. Behavioral Guidelines:

- Respect everyone regardless of background
- Be helpful to others
- Build a conducive work environment

HARMONIS

yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

LOYAL

yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

ADAPTIF

yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku:

- Cepat menyesuaikan diri.
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

KOLABORATIF

yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

HARMONIOUS

Caring and respecting differences. Behavior Guidelines:

- Respect every individual, regardless of background.
- Be willing to help others.
- Foster a conducive work environment.

LOYAL

Dedicated and prioritizes the interests of the nation and state. Behavior Guidelines:

- Uphold the reputation of fellow employees, BUMN leaders, and the country.
- Be willing to sacrifice for greater objectives.
- Obey leaders as long as it does not conflict with laws and ethics.

ADAPTIVE

Continuously innovating and enthusiastic about driving or facing change. Behavior Guidelines:

- Quickly adapt to changes.
- Continuously improve and keep up with technological advancements.
- Act proactively.

COLLABORATIVE

Building synergistic cooperation. Behavior Guidelines:

- Provide opportunities for various parties to contribute.
- Be open to collaborating to create added value.
- Drive the use of various resources for common goals.





Kegiatan Usaha [OJK C.4]

Business Activities [OJK C.4]

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha SPTP adalah di bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang meliputi:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas;
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
5. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang;
6. Penyediaan depo petikemas;
7. Pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
8. Penyediaan fasilitas gudang pendingin;
9. Fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of SPTP's business activities includes:

1. Provision and/or servicing of dock services for the loading and unloading of goods and containers;
2. Provision and/or servicing of warehouse and goods storage services, as well as loading and unloading equipment and port facilities;
3. Provision and/or servicing of container terminal services;
4. Provision and/or servicing of goods loading and unloading services.
5. Provision and/or servicing of distribution and consolidation centers for goods;
6. Provision of container depots;
7. Provision of fresh water and fuel services;
8. Provision of refrigerated warehouse facilities;
9. Fumigation and cleaning/repair of containers.

Bidang Usaha dan Layanan [OJK C.4][GRI 2-6]

Business Fields and Services [OJK C.4][GRI 2-6]



Profil Perusahaan
Company Profile



Stevedoring

Kegiatan membongkar peti kemas dari kapal ke dermaga/trailer atau memuat peti kemas dari dermaga/trailer ke dalam kapal.

The activity of unloading containers from vessel to docks/trailers or loading containers from docks/trailers onto vessel



Haulage

Pelayanan pengangkutan peti kemas dengan menggunakan *trailer/chassis* dalam daerah kerja pelabuhan dari lambung kapal ke lapangan penumpukan peti kemas atau sebaliknya.

Container transportation services using trailers/chassis within the port working area from the vessel's hull to the container stacking yard or vice versa.



Pelayanan Dermaga

Pelayanan penanganan kapal di dermaga dengan mengatur kelancaran arus/barang di dermaga.

Dock Services

Ship handling services at the dock by organizing the smooth flow of goods at the dock.



Receiving Delivery

Receiving merupakan kegiatan menerima peti kemas dari luar area terminal sampai tersusun di lapangan penumpukan. *Delivery* adalah kegiatan memindahkan peti kemas dari lapangan penumpukan dan menyerahkannya sampai tersusun di atas kendaraan.

Receiving is the activity of receiving containers from outside the terminal area until they are arranged in the stacking field. Delivery is the activity of moving containers from the stacking field and handing them over until they are arranged on the vehicle.



Jasa Penumpukan

Jasa penumpukan peti kemas di lapangan penumpukan sampai dengan dikeluarkan dari lapangan penumpukan untuk dimuat atau diserahkan kepada pemilik.

Stacking Services

Services for stacking containers in the stacking field until they are removed from the stacking field to be loaded or handed over to the owner.



Pelayanan Jasa Terkait Lainnya

Merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan yang meliputi pemeriksaan karantina, pemeriksaan bea cukai, dan lain sebagainya.

Other Related Services

Is a service that supports activities at the port which includes quarantine inspection, customs inspection, and so on.

Skala Perusahaan [OJK C.3]

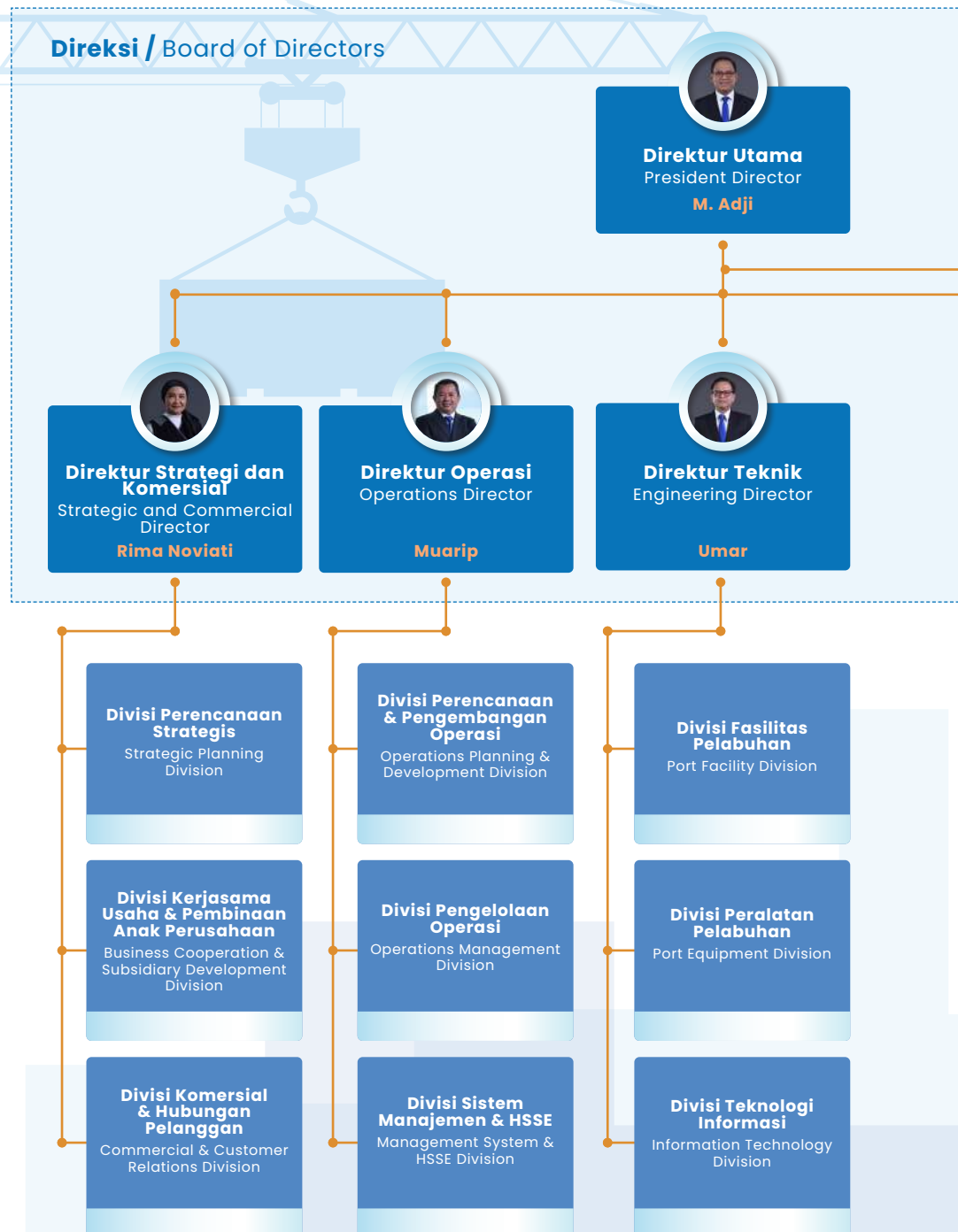
Company Scale [OJK C.3]

Deskripsi Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Jumlah Pegawai Number of Employees	Orang Persons	7.625	8.660	5.779
Jumlah Operasi Operational Locations	Wilayah Operasional Operational Areas	15	15	22
Jumlah Produk/ Jasa yang Disediakan Number of Products/Services Provided	Unit Layanan Service Units	• Stevedoring • Haulage • Pelayanan Dermaga • Receiving Delivery • Jasa Penumpukan • Pelayanan Jasa Terkait Lainnya	• Stevedoring • Haulage • Pelayanan Dermaga • Receiving Delivery • Jasa Penumpukan • Pelayanan Jasa Terkait Lainnya	• Stevedoring • Haulage • Pelayanan Dermaga • Receiving Delivery • Jasa Penumpukan • Pelayanan Jasa Terkait Lainnya
Jumlah Pendapatan Operasi Operating Revenue	Ribu Rupiah Thousands of Rupiah	12.736.417.706	11.274.072.149*	7.408.000.052
TOTAL KAPITALISASI / TOTAL CAPITALIZATION				
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Juta Rupiah Thousand Rupiah	4.988.201.664	7.150.242.312*	9.017.975.437*
Jumlah Ekuitas Total Equity	Juta Rupiah Thousand Rupiah	13.670.360.842	11.546.207.630*	7.289.914.585*
Jumlah Aset Total Assets	Juta Rupiah Thousand Rupiah	18.658.562.506	18.696.449.942*	16.307.890.022*
Kepemilikan Saham Shareholding	%	• PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (99,9%) • PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (0,1%)	• PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (99,9%) • PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (0,1%)	• PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (99,9%) • PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (0,1%)

*disajikan kembali/restated

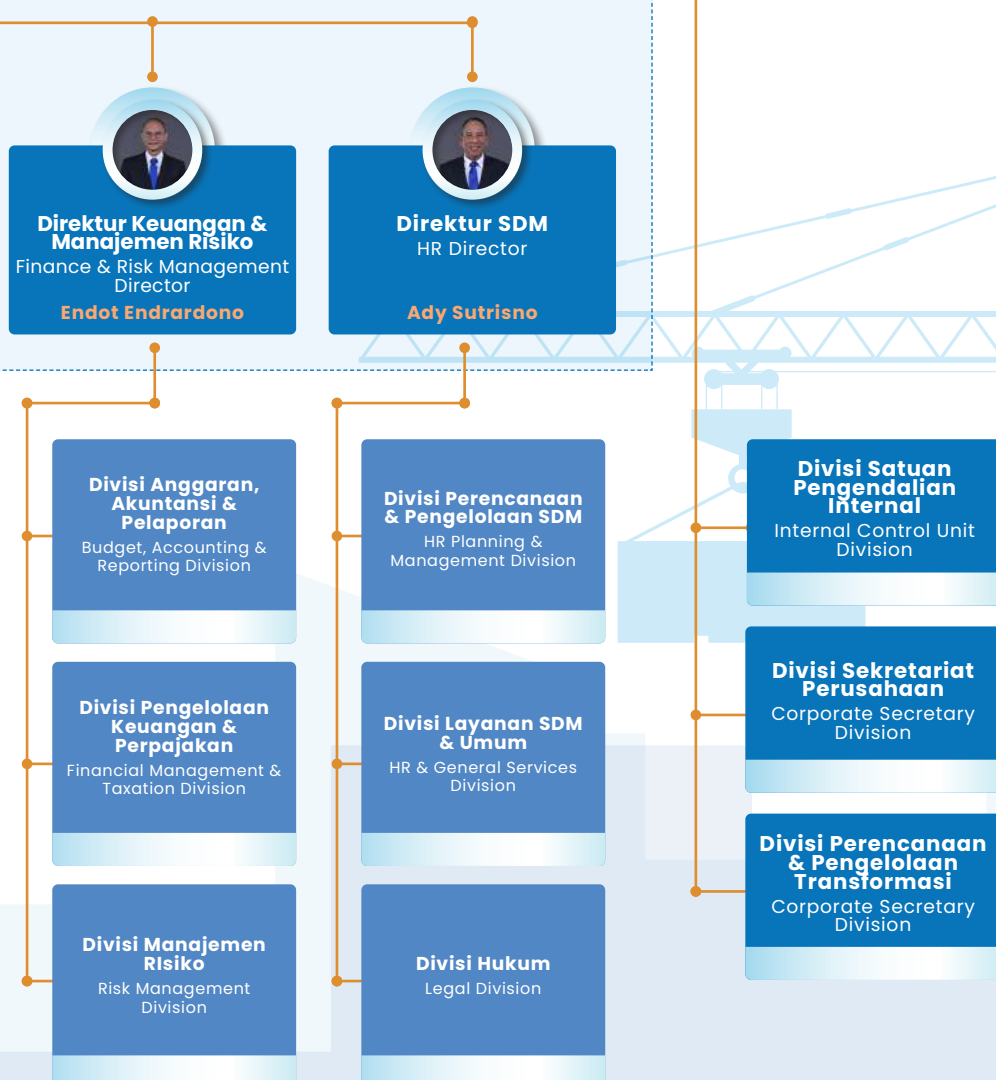
Struktur Organisasi [GRI 2-9]

Organizational Structure [GRI 2-9]



Regulasi Penyebutan Nomenklatur Peraturan terkait penyebutan nomenklatur jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Pelindo TPK No. HK.01/1/8/1/PSOR/SDMN/PLTP-22 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kantor Pusat PT Pelindo Terminal Petikemas.

Regulations on the Mention of Nomenclature Regulations regarding the mention of nomenclature The regulation on the nomenclature of positions within the organizational structure of the Company refers to the Director's Decree of SPTP No. HK.01/1/8/1/PSOR/SDMN/PLTP-22 dated August 1, 2022, concerning the Organizational Structure and Governance of the Head Office of PT Pelindo Terminal Petikemas.



Wilayah Kerja [GRI 2-6][OJK C.3]

Operational Areas [GRI 2-6][OJK C.3]



Per 31 Desember 2023, Perusahaan beroperasi di 15 wilayah di seluruh Indonesia sebagaimana disampaikan pada peta berikut:

As of December 31, 2023, the Company operates in 15 regions throughout Indonesia as shown in the following map:

Wilayah kegiatan operasional Perusahaan tersebar di 15 wilayah di seluruh Indonesia, yaitu:

The operational areas of the Company are spread across 15 regions in Indonesia, namely:

01. SUMATERA UTARA	NORTH SUMATERA	: Medan, Batu Bara
02. RIAU	RIAU	: Siak
03. KALIMANTAN SELATAN	SOUTH KALIMANTAN	: Banjarmasin
04. KALIMANTAN TIMUR	EAST KALIMANTAN	: Balikpapan, Tarakan
05. DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	: Jakarta Utara. North Jakarta
06. JAWA TENGAH	CENTRAL JAVA	: Semarang
07. JAWA TIMUR	EAST JAVA	: Surabaya
08. SULAWESI TENGAH	CENTRAL SULAWESI	: Pantoloan, Palu



09. SULAWESI TENGGARA	SOUTHEAST SULAWESI	:	Kendari
10. SULAWESI SELATAN	SOUTH SULAWESI	:	Makassar
11. SULAWESI UTARA	NORTH SULAWESI	:	Bitung
12. MALUKU	MALUKU	:	Ambon
13. NUSA TENGGARA TIMUR	EAST NUSA TENGGARA	:	Kupang
14. PAPUA BARAT	WEST PAPUA	:	Sorong
15. PAPUA	PAPUA	:	Jayapura

Grup Usaha [GRI 2-2]

Business Group [GRI 2-2]



PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

- PT Pelindo Terminal Petikemas: **99,7%**
- ILCS: **0,3%**

Tanggal Pendirian/Establishment date:
30 Juli 2013/July 30, 2013

Bidang Usaha/Business Line:
Layanan Terminal Petikemas/
Container Terminal Service



PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

- PT Pelindo Terminal Petikemas: **99%**
- PT Pelabuhan Indonesia Investama: **1%**

Tanggal Pendirian/Establishment date:
10 Juli 2013/July 10, 2013

Bidang Usaha/Business Line:
Layanan Terminal Petikemas dan
barang/Container and Goods
Terminal.



PT TERMINAL TELUK LAMONG

- PT Pelindo Terminal Petikemas: **99,5%**
- Koperasi Pegawai Pelindo: **0,5%**

Tanggal Pendirian/Establishment date:
30 Desember 2013/December 30, 2013

Bidang Usaha/Business Line:
Layanan Terminal Petikemas dan
Curah Kering/Container Terminal
and Dry Bulk Service



PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

- PT Pelindo Terminal Petikemas: **99,5%**
- Koperasi Pegawai Pelindo: **0,5%**

Tanggal Pendirian/Establishment date:
29 April 1999/April 29, 1999

Bidang Usaha/Business Line:
Layanan Terminal Petikemas/
Container Terminal Service



PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

- PT Pelindo Terminal Petikemas: **96,84%**
- Koperasi Pegawai Pelindo: **3,16%**

Tanggal Pendirian/Establishment date:
9 Januari 2002/January 9, 2002

Bidang Usaha/Business Line:
Layanan Terminal Petikemas dan
barang/Container and Goods
Terminal.



PT PRIMA MULTI TERMINAL

- PT Pelindo Terminal Petikemas: **97,73%**
- PP: **1,26%**
- Waskita: **1,01%**

Tanggal Pendirian/Establishment date:
26 September 2014/September 26, 2014

Bidang Usaha/Business Line:
Layanan Terminal Barang/Goods
Terminal Service



PT KALTIM KARIANGAU TERMINAL

- PT Pelindo Terminal Petikemas: **50%**
- Melati Bhakti Satya: **50%**

Tanggal Pendirian/Establishment date:
8 Februari 2012/February 8, 2012

Bidang Usaha/Business Line:
Layanan Terminal Petikemas dan
Barang/Container and Goods
Terminal Service



Informasi Mengenai Karyawan [GRI 2-7, 2-8][OJK C.3]

Employee Information [GRI 2-7, 2-8][OJK C.3]

Per 31 Desember 2023, jumlah pegawai Perusahaan sebanyak 7.625 orang, berkurang 1.035 orang atau 11,95% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8.660 orang. Pengurangan terjadi dikarenakan proses pemenuhan SDM dilakukan secara lebih selektif, diintegrasikan dengan jumlah dan kebutuhan SDM seluruh Pelindo Grup serta mempertimbangkan proses penataan, optimalisasi SDM eksisting serta kebutuhan operasional serta adanya pemurnian bisnis yakni PT Berkah Industri Mesin Angkat dan PT Lamong Energi Indonesia beralih ke Subholding Jasa Maritim. Informasi selengkapnya tentang komposisi karyawan berdasarkan status, unit kerja (wilayah kerja), jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan rentang disampaikan dalam Bab Sumber Daya Manusia Laporan Tahunan Perusahaan halaman 137-140.

As of December 31, 2023, the Company had 7,625 employees, a decrease of 1,035 employees or 11.95% compared to the previous year, which had 8,660 employees. This reduction occurred due to a more selective approach to human resource fulfillment, integrated with the human resource needs across the entire Pelindo Group. It also considered the restructuring, optimization of existing human resources, and operational needs, as well as business streamlining, with PT Berkah Industri Mesin Angkat and PT Lamong Energi Indonesia transferring to the Subholding Maritime Services. Further information on employee composition by status, work unit (operational area), gender, educational level, and age range is provided in the Human Resources section of the Company's Annual Report on pages 137-140.

Rantai Pasokan [GRI 2-6]

Supply Chain

SPTP merupakan Perusahaan di bidang jasa terminal peti kemas yang menyediakan jasa sekaligus fasilitas kepelabuhanan terintegrasi yang tersebar di seluruh wilayah operasionalnya. Oleh karena itu, rantai pasokan dalam bisnis SPTP dimulai dari penyediaan infrastruktur dan jasa pemeliharaan/perbaikan infrastruktur kepelabuhanan yang diperoleh dari mitra kerja/pemasok yang tersebar di berbagai wilayah, baik lokal maupun nasional. Mitra kerja/pemasok yang dimaksud dalam laporan ini adalah yang penyedia jasa infrastruktur dan pemeliharaan atas bidang usaha SPTP mulai dari **general cargo, bag cargo**, kapal penumpang, peti kemas, curah kering, curah cair, sampai dengan **unitized**.

SPTP is a company in the container terminal services sector that provides integrated port services and facilities across its operational areas. Therefore, the supply chain in SPTP's business starts with the provision of infrastructure and maintenance/repair services for port infrastructure, sourced from partners/suppliers located in various regions, both local and national. The partners/suppliers referred to in this report are those providing infrastructure and maintenance services for SPTP's business areas, including general cargo, bag cargo, passenger ships, containers, bulk dry, bulk liquid, and unitized cargo.

Dalam seluruh proses pengadaan pemenuhan barang dan jasa oleh mitra kerja/pemasok, SPTP menerapkan konsep *integrated supply chain* yang berbasis teknologi digital. Dengan sistem ini, Perusahaan bisa meminimalkan waktu transaksi dan kontak fisik secara langsung dengan pemasok. Sistem ini juga memastikan transaksi bisnis berlangsung efisien adil dan transparan.

In the entire process of procurement for goods and services by partners/suppliers, SPTP implements an integrated supply chain concept based on digital technology. This system allows the Company to minimize transaction time and direct physical contact with suppliers. It also ensures that business transactions are conducted efficiently, fairly, and transparently.

Prinsip dan Kebijakan

Dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan/atau jasa, Departemen Pengadaan berpedoman pada Peraturan Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor: PD.02/1/2/1/PGDA/DRTU/PLTP-23 Tanggal 01 Februari 2023 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas. Regulasi terbaru ini sejalan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Principles and Policies

In carrying out the procurement of goods and/or services, the Procurement Department adheres to the Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Terminal Petikemas Number: PD.02/1/2/1/PGDA/DRTU/PLTP-23 dated February 1, 2023, concerning Guidelines for Procurement of Goods and/or Services within PT Pelindo Terminal Petikemas. This latest regulation aligns with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.



Merujuk regulasi di atas, tujuan pengadaan barang dan jasa di SPTP di antaranya menghasilkan barang dan jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; mendukung penciptaan nilai tambah bagi BUMN; meningkatkan efisiensi; meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; meningkatkan peran pelaku usaha nasional, termasuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil; serta meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

Sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik, Pengadaan barang/jasa di SPTP menerapkan prinsip sebagai berikut:

- Efisien, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan *Total Cost of Ownership (TCO)*,

According to the regulations, the goals of procurement at SPTP include producing goods and services of the right quality, quantity, time, cost, location, and provider; supporting value creation for SOEs; enhancing efficiency; increasing the use of domestic production; promoting the role of national business actors, including Micro and Small Enterprises; and enhancing synergy among SOEs, SOE Subsidiaries, and/or SOE Affiliated Companies.

As part of implementing good corporate governance, procurement of goods/services at SPTP applies the following principles:

- Efficient, Procurement of goods and/or services should aim to achieve optimal and best results quickly, using funds and capabilities as efficiently as possible in a reasonable manner and not solely based on the lowest price. For strategic goods and/or services with significant value, a Total Cost of Ownership (TCO) approach may be used.
- Effective, Procurement of goods and/or services should meet the established needs

- Efektif, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan,
- Kompetitif, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan,
- Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa serta bagi masyarakat luas pada umumnya,
- Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi syarat,
- Terbuka, berarti pengadaan barang dan/atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi syarat,
- Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas Perusahaan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa,
- Prudensial, berarti semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa memperhitungkan dampak risiko yang terkecil bagi Perusahaan.

Departemen Pengadaan sudah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi dengan melakukan semua proses pengadaan menggunakan sistem E-procurement. Sistem ini memfasilitasi semua penyedia yang terdaftar pada database eproc.pelindo.co.id, serta membuka kesempatan mendaftar yang seluas-luasnya kepada seluruh penyedia yang belum terdapat pada Daftar Rekanan Perusahaan (DRP) dengan syarat dan ketentuan yang sama. Aplikasi ini juga telah lulus sertifikasi ISO 27001 sejak tahun 2018. Dengan terintegrasinya Pelindo, maka terhitung mulai bulan November 2022, proses pengadaan barang dan/atau jasa beralih menggunakan SECURE sebagai implementasi Single Eproc di Pelindo Grup.

and provide the maximum benefit according to the set objectives.

- Competitive, Procurement of goods and/or services must be open to providers who meet the requirements and be conducted through healthy competition among equal and qualified providers based on clear and transparent rules and procedures.
- Transparent, All provisions and information regarding the procurement of goods and/or services, including technical and administrative requirements, evaluation procedures, evaluation results, and the determination of prospective providers, must be open to providers and the general public.
- Fair and Reasonable, This means providing equal treatment to all eligible suppliers of goods and/or services.
- Open, This means that the procurement of goods and/or services is accessible to all qualified suppliers.
- Accountable, This means achieving targets and being accountable for physical, financial, and benefit aspects, ensuring smooth execution of the Company's tasks and public service according to applicable principles and regulations in procurement.
- Prudent, This means that all parties involved in the procurement of goods and/or services should consider the smallest possible risk impact for the Company.

The Procurement Department has implemented an electronic procurement system using information technology by conducting all procurement processes through the E-procurement system. This system facilitates all providers registered in the database at eproc.pelindo.co.id and opens up opportunities for new providers to register in the Company's Partner List (DRP) under the same conditions. This application has also passed ISO 27001 certification since 2018. With Pelindo's integration, starting November 2022, the procurement process has shifted to using SECURE as part of the Single Eproc implementation across the Pelindo Group.

Dalam pengadaan barang dan jasa, Perusahaan mengutamakan dan memberdayakan pemasok nasional, yaitu pemasok yang lokasi usahanya secara geografis berada di Indonesia, yang terdiri dari BUMN, anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, swasta maupun pelaku UMKM. Melalui pemberdayaan serupa itu, maka pemasok nasional akan semakin maju dan berkembang, yang pada gilirannya akan membuat perekonomian mereka semakin kuat. Selain pemasok nasional, Perusahaan juga membuka peluang untuk menjalin kerja sama dengan pemasok internasional, yakni pemasok yang lokasi usahanya secara geografis di luar Indonesia. Kerja sama dengan pemasok internasional dilakukan apabila barang dan jasa yang diperlukan SPTP tidak dapat dipenuhi oleh pemasok nasional atau dengan pertimbangan tertentu. Komitmen Perseroan untuk memberdayakan pemasok nasional merupakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Tingkatan Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Prosedur dan Tata Cara

Penyedia barang/jasa yang ikut serta dalam proses tender harus terdaftar dan tervalidasi dalam aplikasi E-Procurement Perusahaan, yang otomatis tersimpan dalam database sehingga mempermudah proses pengadaan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Dalam proses tender, dokumen penawaran penyedia dievaluasi terhadap data administrasi, teknis, dan harga penawaran. Bagi penawaran yang terendah atau terbaik yang memenuhi syarat evaluasi akan dilakukan dinegosiasi pada sistem e-procurement Perusahaan.

Evaluasi Kegiatan dan Rencana Pengembangan Departemen Pengadaan

Evaluasi kegiatan pengadaan dilakukan berkala setiap bulan sekali untuk melihat capaian efisiensi biaya yang diperoleh dari pengadaan. Dari hasil kinerja tahun 2023, Departemen Pengadaan telah memproses pengadaan barang dan/atau jasa sebanyak 80 pekerjaan dengan hasil efisiensi biaya yang diperoleh sebesar 3,41% dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp276.632.117.670.

In procurement, the Company prioritizes and empowers national suppliers, which are suppliers whose business locations are geographically within Indonesia. This includes SOEs, SOE subsidiaries, and/or SOE-affiliated companies, as well as private entities and MSME actors. By empowering national suppliers, they are expected to advance and develop, which will strengthen their economy. Besides national suppliers, the Company also opens opportunities for collaboration with international suppliers, whose business locations are geographically outside Indonesia, when the goods and services needed by SPTP cannot be fulfilled by national suppliers or due to certain considerations. The Company's commitment to empowering national suppliers supports the government's policy of increasing the Domestic Component Level (TKDN).

Procedures and Methods

Suppliers of goods/services participating in the tender process must be registered and validated in the Company's E-Procurement application, which is automatically stored in the database to facilitate the procurement process according to the required specifications. During the tender process, suppliers' bid documents are evaluated based on administrative data, technical aspects, and bid prices. Bids that are the lowest or best and meet the evaluation criteria will be negotiated through the Company's e-procurement system.

Evaluation of Activities and Development Plans for the Procurement Department

Procurement activities are evaluated monthly to assess the cost-efficiency achieved from procurement. Based on the performance results for 2023, the Procurement Department processed 80 procurement activities, achieving a cost-efficiency of 3.41% from the total contract value, amounting to IDR 286,776,178,259.63.



Proses Pengadaan Barang/Jasa

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelindo TPK berpedoman pada Peraturan Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor: PD.02/1/2/1/PGDA/DRTU/PLTP-23 Tanggal 01 Februari 2023 dimana proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode sebagai berikut:

- Tender Umum adalah metode pemilihan penyedia yang diumumkan secara luas melalui sistem pengadaan Perusahaan dan/atau sekurang-kurangnya melalui 1 (satu) media cetak nasional guna memberi kesempatan kepada pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi dengan nilai diatas Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sebelum PPN 11%. Kategori pelelangan ini dilaksanakan untuk kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
- Tender Terbatas adalah metode pemilihan penyedia yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) pelaku usaha yang tercantum dalam DPUT/DRP dengan nilai sampai dengan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sebelum PPN 11%. Kategori pelelangan ini dilaksanakan untuk kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
- Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia dengan ketentuan menunjuk 1 (satu) pelaku usaha yang tercantum dalam DPUT/DRP dan memenuhi kriteria persyaratan Penunjukan Langsung. Hal ini didasarkan atas persetujuan dari pengguna yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang atau melalui beauty contest oleh pengguna dengan nilai tidak dibatasi.
- Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan penyedia yang dilakukan tanpa melalui Tender Umum, Tender Terbatas dan Penunjukan Langsung. Metode ini dilaksanakan dengan mengundang pelaku usaha terseleksi yang tercantum dalam DPUT/DRP dengan nilai sampai dengan Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebelum PPN 11% dan pengadaan barang yang dilakukan melalui e-purchasing atau e-marketplace dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebelum PPN 11%.

Procurement Process for Goods/ Services

The procurement of goods and services at PT Pelindo TPK adheres to the Director's Regulation of PT Pelindo Terminal Petikemas Number: PD.02/1/2/1/PGDA/DRTU/PLTP-23 dated February 1, 2023, where the procurement process uses the following methods:

- General Tender is a method of selecting suppliers announced broadly through the Company's procurement system and/or at least through one national print media, providing opportunities for businesses meeting the qualifications with a value above IDR 15,000,000,000 (fifteen billion rupiahs) before VAT at 11%. This category of tender is conducted for the procurement of goods, construction work, consulting services, and other services.
- Limited Tender is a method of selecting suppliers offered to a limited number of businesses, at least two, listed in the DPUT/DRP with a value up to IDR 15,000,000,000 (fifteen billion rupiahs) before VAT at 11%. This category of tender is conducted for the procurement of goods, construction work, consulting services, and other services.
- Direct Appointment is a method of selecting suppliers by appointing one business listed in the DPUT/DRP that meets the criteria for Direct Appointment. This is based on justification from the user, approved by the authorized official, or through a beauty contest by the user with no value limit.
- Direct Procurement is a method of selecting suppliers conducted without going through General Tender, Limited Tender, or Direct Appointment. This method is carried out by inviting selected businesses listed in the DPUT/DRP with a value up to IDR 1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiahs) before VAT at 11%, and procurement of goods done through e-purchasing or e-marketplace with a value up to IDR 500,000,000 (five hundred million rupiahs) before VAT at 11%.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

Dari hasil kinerja tahun 2023, Departemen Pengadaan SPTP telah melelangkan 80 pekerjaan (Capex dan Jasa Konsultan). Rincian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada SPTP dan Anak Perusahaan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Implementation of Goods and Services Procurement in 2023

From the performance results in 2023, the SPTP Procurement Department has auctioned 80 jobs (Capex and Consultant Services). Details of the implementation of procurement of goods and services at SPTP and Subsidiaries in 2023 can be described as follows:

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

Implementation of Goods and Services Procurement in 2023

No	Cabang/Terminal Branch/Terminal	Tender Umum General Tender	
		Jumlah/ Total	QTY
1	PT Pelindo Terminal Petikemas	Rp26.862.000.000	1
2	PT Prima Terminal Petikemas	-	-
3	PT Prima Multi Terminal	-	-
4	PT IPC Terminal Petikemas	-	-
5	PT Terminal Petikemas Surabaya	-	-
6	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	-	-
7	PT Terminal Teluk Lamong	Rp7.243.287.000	2
8	PT Kaltim Kariangau Terminal	-	-

Tender Terbatas Limited Tender		Penunjukan Langsung Direct Appointment		Pengadaan Langsung Direct Procurement	
Jumlah/ Total	QTY	Jumlah/ Total	QTY	Jumlah/ Total	QTY
Rp8.306.765.200	13	Rp241.463.352.470	65	-	-
Rp9.713.610.000	1	Rp999.000.000	1	Rp305.250.000	1
-	-	Rp4,504,380,000	1	-	-
Rp14.283.246.564	8	Rp452.687.181.562	61	Rp16.532.428.394	171
Rp13.258.588.390	6	Rp28,747,001,900	6	Rp417.448.606.233	1250
Rp48.825.508.896	10	Rp109.930.364.565	21	Rp11.929.907.155	117
Rp6.200.067.145	23	Rp93.653.229.457	49	Rp107.186.252	4
-	-	Rp4.295.364.650		-	-



Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022

Implementation of Procurement of Goods and Services in 2022

No	Cabang/Terminal Branch/Terminal	Tender Umum General Tender	
		Jumlah/ Total	QTY
1	PT Pelindo Terminal Petikemas	Rp4.150.000.000	1
2	PT Prima Terminal Petikemas	-	-
3	PT Prima Multi Terminal	-	-
4	PT IPC Terminal Petikemas	Rp4.197.148.650	1
5	PT Terminal Petikemas Surabaya	Rp26.499.870.318	2
6	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	Rp4.453.850.000	2
7	PT Terminal Teluk Lamong	Rp23.721.151.258	6
8	PT Kaltim Kariangau Terminal	-	-

Tender Terbatas Limited Tender		Penunjukan Langsung Direct Appointment		Pengadaan Langsung Direct Procurement	
Jumlah/ Total	QTY	Jumlah/ Total	QTY	Jumlah/ Total	QTY
23.320.087.932	14	362.574.672.168	147	51.030.451.281	574
10.321.734.374	2	15.602.000.000	3	215.523.000	4
-	-	-	-	-	-
17.959.426.950	9	191.035.719.249	57	4.943.250.669	195
47.356.660.789	23	102.859.853.844	16	86.212.218.867	1.120
20.067.287.600	6	126.543.897.337	16	11.102.563.084	132
11.767.006.396	29	45.262.705.725	68	64.550.000	2
-	-	13.433.983.646	78	-	-

Berdasarkan proses pengadaan barang/jasa di atas, jumlah pemasok berdasarkan domisili dan nilai kontraknya adalah sebagai berikut:

Based on the procurement process for goods/ services above, the number of suppliers based on their domicile and contract value is as follows:

Jumlah Pemasok Barang dan jasa

Number of Suppliers of Goods and services

Keterangan Information	Jumlah Pemasok Barang dan Jasa Number of Suppliers of Goods and Services			Nilai Kontrak Pekerjaan Value of Work Contract		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Nasional National	36	194	4	260.806.729.170	439.848.193.381	9.349.679.442
Internasional International	1	1		15.825.388.500	1.227.018.000	
Jumlah Total	37	195	4	276.632.117.670	441.075.211.381	9.349.679.442

Perubahan Signifikan pada Organisasi atau Rantai Pasokan [GRI 2-6] [OJK C.6]

Pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan signifikan pada operasional di SPTP. Sementara itu, pada rantai pasokan terjadi perubahan dengan adanya pengurangan jumlah pemasok barang dan jasa, yaitu dari 195 pemasok pada tahun 2022 menjadi 37 pemasok pada tahun 2023. Perubahan tersebut diikuti dengan terjadinya pengurangan nilai kontrak pekerjaan dari Rp441,08 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp276,63 miliar pada tahun 2023.

Significant Changes in the Organization or Supply Chain [GRI 2-6] [OJK C.6]

In 2023, there are no significant changes in operations at SPTP. Meanwhile, in the supply chain, there will be changes with a reduction in the number of suppliers of goods and services, namely from 195 suppliers in 2022 to 37 suppliers in 2023. This change is followed by a reduction in the value of work contracts from IDR 441.08 billion in 2022 to IDR 276.63 billion in 2023.



Keanggotaan dalam Asosiasi [GRI 2-28] [OJK C.5]

Membership in Associations [GRI 2-28] [OJK C.5]

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang manajemen petikemas, SPTP aktif dalam mensukseskan berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah, namun hingga akhir tahun 2023, SPTP belum tergabung dalam asosiasi apapun.

As a company engaged in container management, SPTP is active in making various programs initiated by the government a success, but until the end of 2023, SPTP has not joined any association.

Inisiatif Eksternal

External Initiatives

Untuk mewujudkan usaha yang berkelanjutan, SPTP mengadopsi prinsip dan inisiatif yang dikembangkan oleh organisasi/lembaga lain, baik berupa sertifikasi atau standar-standar untuk bidang-bidang tertentu, yang diakui secara nasional maupun internasional. Implementasi atas berbagai sertifikasi dan standar tersebut oleh Perseroan telah mendapatkan berbagai pengakuan dan apresiasi dari pihak luar berupa penghargaan. Daftar sertifikasi/standar yang masih berlaku pada tahun 2023 dan penghargaan yang diterima Perusahaan adalah sebagai berikut:

To achieve sustainable business practices, SPTP adopts principles and initiatives developed by other organizations or institutions, including certifications and standards recognized both nationally and internationally. The implementation of these various certifications and standards by the company has received external recognition and appreciation in the form of awards. The list of valid certifications/standards for the year 2023 and the awards received by the company is as follows:



Sertifikasi Certifications

Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015)

Quality Management System Certificate (ISO 9001:2015)

Cabang Branch		Versi Version	Nomor Sertifikat Certificate Number	Badan Sertifikasi Certification Agency	Masa Berlaku Validity Period
Kantor Pusat	Head office	2015	16 00 A 23000037	TUV Nord Indonesia	17 Jan 2023 – 16 Jan 2026
TPK. Ambon	TPK. Ambon				
TPK. Banjarmasin	TPK. Banjarmasin				
TPK. Semarang	TPK. Semarang				
TPK. Belawan	TPK. Belawan				
TPK. Bitung	TPK. Bitung				
TPK. Nilam	TPK. Nilam				

Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015)

Environmental Management System Certificate (ISO 14001:2015)

Cabang Branch		Versi Version	Nomor Sertifikat Certificate Number	Badan Sertifikasi Certification Agency	Masa Berlaku Validity Period
Kantor Pusat	Head office	2015	08 04 A 23000036	TUV Nord Indonesia	17 Jan 2023 – 16 Jan 2026
TPK. Ambon	TPK. Ambon				
TPK. Banjarmasin	TPK. Banjarmasin				
TPK. Belawan	TPK. Belawan				
TPK. Bitung	TPK. Bitung				
TPK. Nilam	TPK. Nilam				
TPK. Semarang	TPK. Semarang				
TPK. New Makassar	TPK. New Makassar				

Sertifikat SMK3

OHS Management System Certificate

Cabang Branch	Auditor Auditor	Nomor Sertifikat Certificate Number	Masa Berlaku Validity Period	Keterangan Description
Kantor Pusat Head Office	PT Sapta Mutu Utama	-	-	Dalam proses penerbitan sertifikat di Kemenaker <i>In the process of issuing certificates at the Ministry of Manpower</i>
TPK. Ambon	PT Sapta Mutu Utama	-	-	Dalam proses penerbitan sertifikat di Kemenaker <i>In the process of issuing certificates at the Ministry of Manpower</i>
TPK. Banjarmasin	PT Sapta Mutu Utama	-	-	Dalam proses penerbitan sertifikat di Kemenaker <i>In the process of issuing certificates at the Ministry of Manpower</i>
TPK. Belawan	PT Sapta Mutu Utama	-	-	Dalam proses penerbitan sertifikat di Kemenaker <i>In the process of issuing certificates at the Ministry of Manpower</i>
TPK. Bitung	PT Sapta Mutu Utama	-	-	Dalam proses penerbitan sertifikat di Kemenaker <i>In the process of issuing certificates at the Ministry of Manpower</i>
TPK. Nilam	PT Sapta Mutu Utama	-	-	Dalam proses penerbitan sertifikat di Kemenaker <i>In the process of issuing certificates at the Ministry of Manpower</i>
TPK. Semarang	PT Sapta Mutu Utama	-	-	Dalam proses penerbitan sertifikat di Kemenaker <i>In the process of issuing certificates at the Ministry of Manpower</i>
TPK. New Makassar	PT Sapta Mutu Utama	-	-	Dalam proses penerbitan sertifikat di Kemenaker <i>In the process of issuing certificates at the Ministry of Manpower</i>

Sertifikat ISPS Code

ISPS Code Certificates

Cabang Branch	Auditor Auditor	No. Sertifikat Certificate Number	Masa Berlaku Validity Period
TPK Nilam (TPKN)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	-
TPK Semarang (TPSM)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	02-0562- DV 25 November 2019 s.d. 17 Agustus 2024 November 25, 2019 until August 17, 2024
TPK Banjarmasin (TPBJ)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	02-04-74-DV 28 Januari 2019 s.d. 23 Februari 2024 January 28, 2019 until February 23, 2024
TPK Belawan (TPBL)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	02-0436-DV 18 Januari 2021 s.d. 21 Desember 2025 January 18, 2021 until December 21, 2025
TPK Makassar (TPMK)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	002-0216-DN 25 November 2020 s.d. 02 Juni 2025 November 25, 2020 until June 02, 2025
Makassar New Port (TPMN)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	02-0502-DV 16 Februari 2020 s.d. 16 Februari 2025 February 16, 2020 until February 16, 2025
TPK Bitung (TPBT)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	02-0567-DV 27 Oktober 2021 s.d. 21 Juni 2026 October 27, 2021 until June 21, 2026
TPK Ambon (TPAM)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	002-0178-DN 28 September 2017 s.d. 15 Agustus 2022 September 28, 2017 until August 15, 2022
TPK Kendari	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	02-0480-DV 06 Mei 2019 s.d. 18 Mei 2024 May 06, 2019 until May 18, 2024
TPK Pantoloan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	02-0274-DN 11 Februari 2019 s.d. 28 Agustus 2022 February 11, 2019 until August 28, 2022
TPK Perawang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	002-0232-DN 06 Februari 2021 s.d. 07 September 2026 February 06, 2021 until September 07, 2026
TPK Sorong	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	02-0390-DV 19 Juni 2017 s.d. 17 Mei 2021 June 19, 2017 until May 17, 2021
TPK Kupang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	02-0345-DN 07 Oktober 2019 s.d. 22 Agustus 2024 October 07, 2019 until August 22, 2024
TPK Tarakan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	02-0245-DN 10 Maret 2017 s.d. 14 Februari 2022 March 10, 2017 until February 14, 2022
TPK Jayapura	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Directorate General of Sea Transportation	002-0180-DN 12 Desember 2017 s.d. 21 Desember 2022 December 12, 2017 until December 21, 2022





Penghargaan Awards

Informasi mengenai penghargaan yang berhasil diraih oleh SPTP di tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut:

Information regarding the awards won by SPTP in 2023 is presented in the following table:

Penghargaan Awards

No.	Nama Penghargaan Award Name		Penyelenggara Organization	Tanggal Date
1	Indonesia CSR Excellence Award 2023	Indonesia CSR Excellence Award 2023	PT Indonesia Popular Mandiri & First Indonesia Magazine	16 Maret 2023 March 16, 2023
2	Piagam Penghargaan: M. Adji Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas – Pemenang Indonesia GPR Awards (IGA) 2023 Kategori Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online Sub Kategori Direktur Utama Anak Usaha BUMN.	Award Charter: M. Adji President Director of PT Pelindo Terminal Petikemas – Winner of Indonesia GPR Awards (IGA) 2023 Category of Most Popular Leader in Online News Media Sub Category President Director of SOE Subsidiary.	Humas Indonesia	14-16 Juni 2023 June 14-16, 2023
3	Certificate of Winner on Top Digital Awards 2023: M. Adji Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas – Winner of Award in Category Top Leader on Digital Implementation 2023	Certificate of Winner on Top Digital Awards 2023: M. Adji President Director of PT Pelindo Terminal Petikemas – Winner of Award in Category Top Leader on Digital Implementation 2023.	IT Works Magazine	4 Desember 2023 December 4, 2023
4	Certificate of Winner on Top Digital Awards 2023: PT Pelindo Terminal Petikemas – Winner of Award in Category Top Digital Implementation 2023 # Star 4.	Certificate of Winner on Top Digital Awards 2023: PT Pelindo Terminal Petikemas – Winner of Award in Category Top Digital Implementation 2023 # Star 4.	IT Works Magazine	4 Desember 2023 December 4, 2023
5	Industry Marketing Champion 2023: M. Adji PT Pelindo Terminal Petikemas – Jawa Timur Marketing Champion 2023 Infrastructure.	Industry Marketing Champion 2023: M. Adji PT Pelindo Terminal Petikemas – East Java Marketing Champion 2023 Infrastructure.	MarkPlus Institute	4 Desember 2023 December 4, 2023
6	Piagam Penghargaan: PT Pelindo Terminal Petikemas sebagai Pemenang 106 Perusahaan dan Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi dalam rangkaian acara Sewindu PR Indonesia "Sewindu Kami Mengabdikan, untuk Komunikasi Negeri".	Award Charter: PT Pelindo Terminal Petikemas as the Winner of 106 Influential Companies and Agencies in Communication in the series of PR Indonesia's Sewindu event "Sewindu Kami Mengabdikan, untuk Komunikasi Negeri".	PR Indonesia	21 September 2023 September 21, 2023
7	Human Capital 2023 : PT Pelindo Terminal Petikemas – Kategori The Best Workforce Flexibility & Mobility, The Best Labor Relation, The Most Resilience Company 2023.	Human Capital 2023: PT Pelindo Terminal Petikemas – Category the Best Workforce Flexibility & Mobility, The Best Labor Relation, The Most Resilience Company 2023.	First Indonesia Magazine	05 Juli 2023 July 05, 2023
8	Human Capital 2023 : M. Adji PT Pelindo Terminal Petikemas – Kategori The Best CEO Focus on HC.	Human Capital 2023: M. Adji PT Pelindo Terminal Petikemas – Category the Best CEO Focus on HC.	First Indonesia Magazine	05 Juli 2023 July 05, 2023
9	Pelindo Risk Award 2023: Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) as the 1st Winner for Category Kangen "Kejuaraan Antar Risk Agent – FMR".	Pelindo Risk Award 2023: Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) as the 1st Winner for Category Kangen "Championship between Risk Agents – FMR".	Pelindo	1 Oktober 2023 October 1, 2023
10	PT Pelindo Terminal Petikemas in Category Best CSR Global Program Excellence in Green and Environmental Management Best Workplace Environment.	PT Pelindo Terminal Petikemas in Category Best CSR Global Program Excellence in Green and Environmental Management Best Workplace Environment.	First Indonesia Magazine	16 Maret 2023 March 16, 2023



Penghargaan Awards

No.	Nama Penghargaan Award Name	Penyelenggara Organization	Tanggal Date
11	Bronze Winner Indonesia DEI & ESG Awards 2023 Kategori DEI Sub Kategori Pemberdayaan Karyawan dengan Kemampuan Beragam PT Pelindo Terminal Petikemas Change Agent Jembatan Kolaborasi dan Komunikasi Internal Perusahaan.	Bronze Winner Indonesia DEI & ESG Awards 2023 Category DEI Sub Category Employee Empowerment with Diverse Capabilities PT Pelindo Terminal Petikemas Change Agent Bridge of Collaboration and Internal Company Communication.	Humas Indonesia 4 Agustus 2023 August 4, 2023
12	Silver Winner Indonesia DEI & ESG Awards 2023 Kategori DEI Sub Kategori Kesetaraan Gender dan Keragaman PT Pelindo Terminal Petikemas Maritime Sisterhood Pemberdayaan Perempuan dalam Dunia Pelabuhan.	Silver Winner Indonesia DEI & ESG Awards 2023 Category DEI Sub Category Gender Equality and Diversity PT Pelindo Terminal Petikemas Maritime Sisterhood Empowerment of Women in the Port World.	Humas Indonesia 4 Agustus 2023 August 4, 2023
13	Bronze Winner Indonesia DEI & ESG Awards 2023 Kategori DEI Sub Kategori Sosial (Sosial) PT Pelindo Terminal Petikemas Kampung Warna-Warni Gregees Implementasi CSR Berkelanjutan.	Bronze Winner Indonesia DEI & ESG Awards 2023 DEI Category Social Sub Category PT Pelindo Terminal Petikemas Kampung WarnaWarni Gregees Sustainable CSR Implementation.	Humas Indonesia 4 Agustus 2023 August 4, 2023
14	Sertifikat Penghargaan SMK3, PT Pelindo Terminal Petikemas - Terminal Petikemas HO telah menerapkan SMK3 dengan hasil capaian 92,19% untuk kategori tingkat awal (64 Kriteria).	OHS Management System Award Certificate, PT Pelindo Terminal Petikemas - Terminal Petikemas HO has implemented OHS Management System with an achievement result of 92.19% for the initial level category (64 Criteria).	Menteri Ketenagakerjaan RI Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia 9 Juni 2023 June 9, 2023
15	Sertifikat Penghargaan SMK3, PT Pelindo Terminal Petikemas - Terminal Petikemas Bitung telah menerapkan SMK3 dengan hasil capaian 94,58% untuk kategori tingkat lanjutan (166 Kriteria).	OHS Management System Award Certificate, PT Pelindo Terminal Petikemas - Terminal Petikemas Bitung has implemented OHS Management System with an achievement result of 94.58% for the advanced level category (166 Criteria).	Menteri Ketenagakerjaan RI Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia 9 Juni 2023 June 9, 2023
16	Sertifikat Penghargaan SMK3, PT Pelindo Terminal Petikemas - Terminal Petikemas New Makassar telah menerapkan SMK3 dengan hasil capaian 94,58% untuk kategori tingkat lanjutan (166 Kriteria).	OHS Management System Award Certificate, PT Pelindo Terminal Petikemas - New Makassar Container Terminal has implemented OHS Management System with an achievement result of 94.58% for the advanced level category (166 Criteria).	Menteri Ketenagakerjaan RI Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia 9 Juni 2023 June 9, 2023
17	Sertifikat Penghargaan SMK3, PT Pelindo Terminal Petikemas - Terminal Petikemas Nilam telah menerapkan SMK3 dengan hasil capaian 95,31% untuk kategori tingkat awal (64 Kriteria).	OHS Management System Award Certificate, PT Pelindo Terminal Petikemas - Nilam Container Terminal has implemented OHS Management System with an achievement result of 95.31% for the initial level category (64 Criteria).	Menteri Ketenagakerjaan RI Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia 9 Juni 2023 June 9, 2023





Penghargaan Awards

No.	Nama Penghargaan Award Name	Penyelenggara Organization	Tanggal Date
18	Sertifikat Penghargaan SMK3, PT Pelindo Terminal Petikemas - Terminal Petikemas Semarang telah menerapkan SMK3 dengan hasil capaian 96,39% untuk kategori tingkat lanjutan (166 Kriteria).	OHS Management System Certificate of Appreciation, PT Pelindo Terminal Petikemas - Terminal Petikemas Semarang has implemented OHS Management System with a 96.39% achievement result for the advanced level category (166 Criteria).	Menteri Ketenagakerjaan RI Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia 9 Juni 2023 June 9, 2023
19	PT Pelindo Terminal Petikemas - TPK New Makassar Terminal : Setifikat Capaian Menuju <i>Green</i> dan <i>Smart Port</i> dengan capaian 72,76% # Star 3.	PT Pelindo Terminal Container - TPK New Makassar Terminal: Certificate of Achievement towards Green and Smart Port with 72.76% achievement # Star 3.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment RI 13 Desember 2023 December 13, 2023
20	PT Pelindo Terminal Petikemas - TPK New Makassar Terminal telah memenuhi Kriteria <i>Green</i> dan <i>Smart Port</i> terhadap Aspek Manajemen, Aspek Teknis (Kepelabuhanan, K3, Lingkungan dan Energi) dan Aspek Digitalisasi.	PT Pelindo Terminal Petikemas - TPK New Makassar Terminal has met the Green and Smart Port Criteria for Management Aspects, Technical Aspects (Port, OHS, Environment and Energy) and Digitalization Aspects.	Sucofindo International Certification Services (SICS) 13 Desember 2023 December 13, 2023
21	PT Kaltim Kariangau Terminal: Serifikat Capaian Menuju <i>Green</i> dan <i>Smart Port</i> dengan capaian 65,13% # Star 2.	PT Kaltim Kariangau Terminal: Certificate of Achievement towards Green and Smart Port with 65.13% achievement # Star 2.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment RI
22	PT Kaltim Kariangau Terminal telah memenuhi Kriteria <i>Green</i> dan <i>Smart Port</i> terhadap Aspek Manajemen, Aspek Teknis (Kepelabuhanan, K3, Lingkungan dan Energi) dan Aspek Digitalisasi.	PT Kaltim Kariangau Terminal has met the Green and Smart Port Criteria for Management Aspects, Technical Aspects (Port, OHS, Environment and Energy) and Digitalization Aspects.	Sucofindo International Certification Services (SICS) 13 Desember 2023 December 13, 2023



Penghargaan

Awards

No.	Nama Penghargaan Award Name	Penyelenggara Organization	Tanggal Date
23	Penghargaan Kecelakaan Nihil (<i>Zero Accident Award</i>): PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Terminal Petikemas Banjarmasin periode 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2022.	Zero Accident Award: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Banjarmasin Container Terminal for the period January 1, 2021 until December 31, 2022.	Menteri Ketenagakerjaan RI Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia 9 Juni 2023 June 9, 2023
24	Penghargaan Kecelakaan Nihil (<i>Zero Accident Award</i>): PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Terminal Petikemas Banjarmasin periode 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2022.	Zero Accident Award: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Banjarmasin Container Terminal period January 1, 2021 until December 31, 2022.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan South Kalimantan Provincial Government 10 Februari 2023 February 10, 2023
25	Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dengan kategori <i>Silver</i> : PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Terminal Petikemas Banjarmasin Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.	Award Charter for the COVID-19 Prevention and Countermeasure Program in the Workplace with the Silver category: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Banjarmasin Container Terminal Banjarmasin City Banjarmasin South Kalimantan Province.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan South Kalimantan Provincial Government 10 Februari 2023 February 10, 2023
26	Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dengan kategori <i>Silver</i> : PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Terminal Petikemas Kalimantan Selatan	Award Charter for the COVID-19 Prevention and Countermeasure Program in the Workplace with the Silver category: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Terminal Petikemas South Kalimantan	Menteri Ketenagakerjaan RI Indonesian Minister of Manpower 9 Juni 2023 June 9, 2023
27	Global Port Forum Awards 2023, PT Terminal Petikemas Surabaya: <i>Emerging Port/Terminal of the Year 2023</i>	Global Port Forum Awards 2023, PT Terminal Petikemas Surabaya: <i>Emerging Port/Terminal of the Year 2023</i>	The Global Ports Forum 29 Maret 2023 March 29, 2023
28	Global Port Forum Awards 2023, PT Terminal Petikemas Surabaya: <i>Sustainable Port/Terminal of the Year 2023</i>	Global Port Forum Awards 2023, PT Terminal Petikemas Surabaya: <i>Sustainable Port/Terminal of the Year 2023</i>	The Global Ports Forum 29 Maret 2023 March 29, 2023





TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Sustainable Governance





Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi bagi SPTP dalam menjalankan usaha. Berkaca pada posisi penting tersebut, Perseroan melaksanakan GCG di semua lini. Dengan implementasi seperti itu, Perseroan akan mampu menjalankan roda organisasi pada jalur yang benar, sekaligus mengurangi risiko terjadinya mismanajemen. Implementasi GCG secara konsisten juga akan membuat entitas bisnis lebih efisien dalam menjalankan operasional usaha, serta mampu mengukur target kinerja manajemen.

Dalam menjalankan GCG, SPTP senantiasa mengikuti perkembangan terkini, dan senantiasa terbuka untuk melakukan *update* dan pembaruan sehingga GCG yang diterapkan Perseroan selalu sesuai zaman. Untuk melakukan penyesuaian dan pembaruan tersebut, dukungan dari pemegang saham (*shareholder*) maupun para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik internal maupun eksternal, sangat dibutuhkan. Dengan semakin sempurnanya penerapan GCG, maka kinerja Perseroan akan meningkat, mampu menjawab tantangan zaman, serta terus tumbuh, berkembang dan berkelanjutan.

Good Corporate Governance (GCG) serves as the foundation for SPTP in conducting its business. Recognizing the crucial role of GCG, the company implements it across all levels. With this approach, the company can operate efficiently, keeping its operations on the right track while minimizing the risk of mismanagement. Consistent GCG implementation also enables the business entity to run its operations more efficiently and effectively measure management performance targets.

In practicing GCG, SPTP continually keeps up with the latest developments and remains open to updates and improvements to ensure that the GCG applied by the company is always in line with current trends. For these adjustments and improvements to be effective, the support of shareholders and stakeholders, both internal and external, is essential. As GCG implementation becomes more refined, the company's performance will improve, making it capable of meeting modern challenges while continuing to grow, develop, and sustain itself.



Selaras dengan upaya mendapatkan hasil terbaik, prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan dan diterapkan SPTP mengacu pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Pedoman Umum GCG di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Selain menjadi pondasi dalam menjalankan operasional perusahaan, penerapan GCG oleh Perseroan sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara di Indonesia juga bertujuan untuk:

- Melindungi hak dan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan;
- Mendorong Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- Meningkatkan nilai Perusahaan.

Aligned with the pursuit of the best outcomes, the GCG principles developed and applied by SPTP are based on the Indonesian Limited Liability Company Law, the General Guidelines of GCG in Indonesia issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG), and the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

In addition to serving as the foundation for company operations, the implementation of GCG by the company, as part of a State-Owned Enterprise in Indonesia, also aims to:

- Protect the rights and interests of Shareholders and stakeholders;
- Encourage Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Employees to make decisions and take actions based on high moral values and in compliance with laws and regulations; and
- Increase the value of the Company.

Prinsip Tata Kelola

Governance Principles

SPTP berkomitmen untuk selalu menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG saat menjalankan kegiatan bisnis maupun operasional guna meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan. Sesuai regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN tahun 2023, prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.

- a. **Transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. **Akuntabilitas** (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. **Pertanggungjawaban** (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
- d. **Kemandirian** (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. **Kewajaran** (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sebagaimana implementasi sikap terbuka dalam mengadopsi pembaruan, SPTP mengadopsi prinsip-prinsip baru yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui penerbitan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) di mana prinsip-prinsip di dalamnya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, yang pertama kali diperkenalkan dalam PUG-KI 2021. PUG-KI merupakan

SPTP is committed to consistently implementing sound business practices by adhering to GCG principles in both its business and operational activities to enhance the quality of corporate management. In line with applicable regulations, including the 2023 Minister of State-Owned Enterprises Regulation, these principles include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

- a. **Transparency**, Openness in the decision-making process and in disclosing material and relevant information about the company.
- b. **Accountability**, Clarity in the functions, implementation, and accountability of the company's organs to ensure effective corporate management.
- c. **Responsibility**, Compliance in the company's management with the provisions of laws and regulations and sound corporate principles.
- d. **Independency**: The state in which the company is managed professionally without conflicts of interest and free from undue influence or pressure from any party that is not in accordance with legal regulations and sound corporate principles.
- e. **Fairness**, Justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders as stipulated in agreements and legal regulations.

Next, in line with its commitment to openness in adopting updates, SPTP has embraced the new principles issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) through the publication of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI). These principles are inspired by four pillars of corporate governance: ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability, which were first introduced in PUG-KI 2021. PUG-KI is a development in line with current trends from the basic TARIF values

pengembangan sesuai dengan perkembangan terkini dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*) yang terakhir digunakan pada PUG-KI 2019. Keempat prinsip dasar PUG-KI 2021 selengkapnya adalah sebagai berikut:

- **Perilaku Beretika**

Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

- **Akuntabilitas**

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

- **Transparansi**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- **Keberlanjutan**

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

(Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) that were last used in PUG-KI 2019. The four basic principles of PUG-KI 2021 are as follows:

- **Ethical Behavior**

In conducting its activities, the corporation always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and consistently builds and maintains moral values and trust. The corporation considers the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality and is managed independently so that each corporate organ does not dominate one another and cannot be intervened by outside parties.

- **Accountability**

The corporation can be held accountable for its performance in a transparent and reasonable manner. Therefore, the corporation must be managed properly, measurably, and in accordance with corporate interests while still considering the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a prerequisite necessary to achieve sustainable performance.

- **Transparency**

To maintain objectivity in conducting business, the corporation provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understandable to stakeholders. The corporation takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations but also those that are important for decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.

- **Sustainability**

The corporation complies with laws and regulations and is committed to fulfilling its responsibilities to society and the environment to contribute to sustainable development. This is achieved through collaboration with all relevant stakeholders to improve their lives in ways that align with business interests and the sustainable development agenda.

Struktur Tata Kelola [GRI 2-9]

Governance Structure [GRI 2-9]

Struktur tata kelola SPTP merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan regulasi ini, terdapat 3 (tiga) organ utama tata kelola yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun sistem kepengurusan Perseroan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Di SPTP, Direksi sekaligus merupakan eksekutif senior yang dipilih langsung oleh pemegang saham dan memikul tanggung jawab terhadap jalannya perusahaan secara keseluruhan. [GRI 2-11]

Untuk mengoptimalkan dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung berupa Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit, sedangkan Direksi dibantu organ pendukung berupa Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Intern dan Unit Kerja Lainnya. Lebih lanjut, di antara organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi, pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan mengawasi manajemen dampak Perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat adalah Divisi Manajemen Risiko [GRI 2-9, 2-13]

Secara spesifik, dalam posisinya bukan sebagai emiten maupun perusahaan publik, SPTP tidak terkena kewajiban untuk menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan. [OJK E.1]

The governance structure of SPTP refers to the Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. According to this regulation, there are three main governance organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The company's management system follows a two-tier system, consisting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, each with clear authority and responsibilities as mandated in the Articles of Association and applicable laws and regulations. At SPTP, the Board of Directors also serves as senior executives, directly appointed by the shareholders, and bears responsibility for the overall management of the company. [GRI 2-11]

To optimize the performance of their duties, the Board of Commissioners is supported by auxiliary organs, including the Secretary to the Board of Commissioners and the Audit Committee, while the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, and other working units. Furthermore, among the supporting organs of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the party responsible for making decisions and overseeing the management of the Company's impact on the economy, environment and society is the Risk Management Division. [GRI 2-9, 2-13]

Specifically, as SPTP is neither an issuer nor a public company, it is not obligated to implement Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies (or POJK Sustainable Finance). Therefore, the company does not have employees, officers, and/or working units responsible for the implementation of sustainable finance as regulated in Appendix II of POJK Sustainable Finance. [OJK E.1]

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola Perusahaan yang menjadi medium pengambilan keputusan antara para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam menentukan fondasi pengelolaan Perusahaan sepanjang tahun buku yang ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan. RUPS juga merupakan organ Perusahaan yang memegang otoritas tertinggi dalam Perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi. RUPS adalah representasi dari Pemegang Saham dalam berinteraksi dengan Perusahaan.

Jenis RUPS

Jenis RUPS SPTP terdiri dari:

1. RUPS Tahunan untuk mengesahkan RKAP yang diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahun yang baru dimulai;
2. RUPS Tahunan untuk mengesahkan laporan tahunan dan perhitungan tahunan yang diselenggarakan paling lambat dalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
3. RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Dewan

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023

Selama tahun pelaporan, SPTP menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, dan tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2023 PT Pelindo Terminal Petikemas pada 26 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Bandar Jaya Lantai 7, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Jalan Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta; RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 PT Pelindo Terminal Petikemas pada 16 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Amanah Lt.3, Pelindo Tower, Jakarta

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the company's governance organ that serves as a decision-making medium between the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors in determining the foundation for the company's management throughout the designated fiscal year, in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations. The GMS is also the company's highest authority, with powers that are not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners. The GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authority of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The GMS represents the Shareholders in their interactions with the company.

Types of GMS

The types of GMS at SPTP consist of:

1. Annual GMS for Ratification of the Work Plan and Budget (RKAP): This meeting is held no later than one month after the start of the new year.
2. Annual GMS for Approval of the Annual Report and Financial Statements: This meeting is conducted no later than six months after the end of the fiscal year.
3. Extraordinary GMS: This can be convened at any time if required by the Shareholders or upon the proposal of the Board.

Implementation of GMS in 2023

During the reporting year, SPTP held 2 (two) Annual GMS and did not convene any Extraordinary GMS. The Annual GMS for the Ratification of the 2023 Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pelindo Terminal Petikemas was held on January 26, 2023, in the Bandar Jaya Meeting Room, 7th Floor, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Headquarters, Jalan Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta. The Annual GMS for the Approval of the 2022 Annual Report and Financial Statements of PT Pelindo Terminal Petikemas took place on June 16, 2023.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Pengawasan, nasihat dan arahan yang diberikan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam forum resmi dan diberikan secara tertulis. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. [GRI 2-12]

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris SPTP ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Adapun susunan Dewan Komisaris SPTP per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners is a corporate body responsible for overseeing and providing advice to the Board of Directors in managing the Company. The supervision, advice, and directives provided by the Board of Commissioners are conducted in official forums and delivered in writing. In carrying out its duties, the Board of Commissioners must adhere to the applicable laws and regulations as well as the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners is responsible for and has the authority to oversee the Company's management policies and provide advice to the Board of Directors. This oversight and advice are carried out in the interest of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives, not intended for the benefit of specific individuals or groups. [GRI 2-12]

The term of office for members of the SPTP Board of Commissioners is set at five years, and they can be reappointed for one additional term. Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on a GMS resolution, with reasons provided. The composition of the SPTP Board of Commissioners as of December 31, 2023, is as follows:

Susunan Dewan Komisaris SPTP Tahun 2023

Composition of the SPTP Board of Commissioners in 2023

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Position	
1	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama	President Commissioner
2	Bahaduri Wijayanta Bkti Mukarta	Komisaris	Commissioner
3	Ronaldus Mujur	Komisaris	Commissioner
4	Montty Girianna	Komisaris	Commissioner
5	Antoni Arif Priadi	Komisaris	Commissioner
6	Nurrachman	Komisaris Independen	Independent Commissioner
7	Yoke Candra Katon	Komisaris Independen	Independent Commissioner

Informasi selengkapnya tentang fungsi, keanggotaan, etika jabatan, tugas dan wewenang, kewajiban, tanggung jawab, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, program pengenalan dan peningkatan kapabilitas, organ pendukung

For more detailed information on the functions, membership, ethics of the position, duties and authorities, obligations, responsibilities, decision-making principles, induction and capability enhancement programs, supporting organs of

Dewan Komisaris dan lain-lain disampaikan dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang bisa diakses melalui situs/website Perseroan: https://drive.google.com/file/d/1QqO_jfx9baTbzD2w5gS0R0h0rgsKRV_/view

the Board of Commissioners, and other relevant matters, please refer to the Board of Commissioners and Directors Relationship Work Guidelines (*Board Manual*), which can be accessed through the Company's website.

Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organ tata kelola Perusahaan yang bertanggungjawab secara kolegal atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. [GRI 2-12]

Masa jabatan anggota Direksi SPTP ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong.

Adapun susunan Direksi SPTP per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The Board of Directors is a governance organ of the Company, collectively responsible for managing the Company in the best interests and for the objectives of the Company, acting as the leader in management, and representing the Company both in and out of court. The composition of the Board of Directors is tailored to the needs of the Company, with at least two members, one of whom is appointed as the President Director, in accordance with applicable regulations. [GRI 2-12]

The term of office for members of the Board of Directors of SPTP is set at five years and can be reappointed for one additional term. The General Meeting of Shareholders (GMS) can dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons. In the event that the term of office of a member of the Board of Directors ends and the GMS has not yet appointed a successor, the duties of the vacant position will be carried out in accordance with the provisions for filling vacant positions on the Board of Directors.

As of December 31, 2023, the composition of the Board of Directors of SPTP is as follows:

Susunan Direksi SPTP Tahun 2023

Composition of SPTP Board of Directors in 2023

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Position
1	M Adji	Direktur Utama President Director
2	Muarip	Direktur Operasi Director of Operations
3	Faruq Hidayat	Direktur Teknik Director of Engineering
4	Ady Sutrisno	Direktur SDM Director of Human Resources
5	Endot Endrardono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management
6	Rima Novianti	Direktur Strategi dan Komersial Director of Strategy and Commercial

Informasi selengkapnya tentang fungsi, keanggotaan, independensi, etika jabatan, tugas dan wewenang, kewajiban, tanggung jawab, hak, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, program pengenalan dan peningkatan kapabilitas, organ pendukung Direksi dan lain-lain disampaikan dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang bisa diakses melalui situs/website Perseroan: https://drive.google.com/file/d/1QqO_jfxx9baTbzD2w5gS0R0h0rgsKRV_/view

Further information on the functions, membership, independence, code of ethics, duties and authorities, obligations, responsibilities, rights, decision-making principles, orientation and capability enhancement programs, and supporting organs of the Board of Directors is provided in the Board Manual, which can be accessed via the Company's website.

https://drive.google.com/file/d/1QqO_jfxx9baTbzD2w5gS0R0h0rgsKRV_/view

Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Pelaporan Keberlanjutan [GRI 2-14]

Role of the Highest Governance Body in Sustainability Reporting [GRI 2-14]

Pelaporan keberlanjutan SPTP disampaikan melalui Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan bersama dengan Laporan Tahunan Perseroan. Berkaitan dengan hal ini, selain memberikan persetujuan atas topik material terpilih dengan mempertimbangkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta aspek lingkungan, sosial-ekonomi dan tata kelola (*Environmental Social and Governance/ESG*), Direksi sebagai badan tata kelola tertinggi senantiasa mendorong agar laporan keberlanjutan yang diterbitkan Perseroan terus ditingkatkan kualitas dan kelengkapan kontennya agar memenuhi panduan penyusunan laporan yaitu POJK Keuangan Berkelanjutan dan GRI Universal Standards 2021. Dengan memenuhi kedua panduan, maka topik-topik material dalam Laporan Keberlanjutan telah mencakup penerapan aspek ESG yang sejalan dengan harapan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

SPTP's sustainability reporting is presented through the Sustainability Report, which is published alongside the Company's Annual Report. In this regard, in addition to approving selected material topics by considering the Sustainable Development Goals (SDGs) and Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects, the Board of Directors, as the highest governance body, consistently encourages the enhancement of the quality and completeness of the Company's Sustainability Report. The goal is to ensure that it aligns with the reporting guidelines, namely the Sustainable Finance OJK Regulation and the GRI Universal Standards 2021. By adhering to these guidelines, the material topics in the Sustainability Report cover the application of ESG aspects in line with the expectations of both internal and external stakeholders.

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan [OJK E.2][GRI 2-17]

Development of Sustainable Finance Competence [OJK E.2][GRI 2-17]

SPTP memberikan fasilitas dan kesempatan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan. Program pengembangan kompetensi yang diikuti bisa berupa pelatihan, *workshop*, seminar, *conference*, kursus, lokakarya dan lain-lain. Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

SPTP provides facilities and opportunities for the Board of Commissioners and the Board of Directors to enhance knowledge and competencies relevant to the Company's business, including those related to sustainable finance. Competency development programs may include training, workshops, seminars, conferences, courses, and other forms of learning. The competency development activities for the Board of Commissioners and the Board of Directors during the reporting year are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training: Certification	Nama Pelatihan Training Name	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris / Board of Commissioner				
Moermahadi Soerja Djanegara Komisaris Utama President Commissioner	Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)" Risk Management Training & Certification "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)"	6-14 Desember 2023, Online meeting	CRMS (Center for Risk Management and Sustainability)
Montty Girianna Komisaris Commissioner	Non-sertifikasi Non-certification	<i>Program Leading High Performance Teams</i>	2-4 Mei 2023, IMD Campus Lausanne - Switzerland	IMD
	Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)" Risk Management Training & Certification "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)"	6-14 Desember 2023, Online meeting	CRMS (Center for Risk Management and Sustainability)
Nurrachman Komisaris Independen Independent Commissioner	Non-sertifikasi Non-certification	<i>Program Leading High Performance Teams</i>	2-4 Mei 2023, IMD Campus Lausanne - Switzerland	IMD
Ubaidillah Amin Komisaris Independen Independent Commissioner	Non-sertifikasi Non-certification	<i>Program Leading High Performance Teams</i>	2-4 Mei 2023, IMD Campus Lausanne - Switzerland	IMD
Bahaduri Wijayanta Bakti Mukarta Komisaris Commissioner	Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)" Risk Management Training & Certification "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)"	6-14 Desember 2023, Online meeting	CRMS (Center for Risk Management and Sustainability)

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training: Certification	Nama Pelatihan Training Name	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Ronaldus Mujur Komisaris Commissioner	Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)" Risk Management Training & Certification "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)"	6-14 Desember 2023, Online meeting	CRMS (Center for Risk Management and Sustainability)
Direksi / Direksi				
M. Adji Direktur Utama Direktur Utama	Non-sertifikasi Non-certification	Executive Global Growth Immersion Workshop Batch III	Barcelona, Sanyo, 13-19 Maret 2023	PT PMLI
	Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)" Risk Management Training & Certification "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)"	6-14 Desember 2023, Online meeting	CRMS (Center for Risk Management and Sustainability)
Muarip Direktur Operasi Direktur Operasi	Non-sertifikasi Non-certification	Executive Global Growth Immersion Workshop Batch III	Barcelona, Sanyo, 13-19 Maret 2023	PT PMLI
	Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)" Risk Management Training & Certification "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)"	6-14 Desember 2023, Online meeting	CRMS (Center for Risk Management and Sustainability)
Endot Endrardono Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Sertifikasi Certification	Refreshment Perpanjangan Sertifikat CRMP	16-19 Oktober 2023. Online/ Zoom meeting	PT RAP Indonesia
	Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)" Risk Management Training & Certification "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)"	6-14 Desember 2023, Online meeting	CRMS (Center for Risk Management and Sustainability)
Dothy Direktur Teknik Direktur Teknik	Sertifikasi Certification	Refreshment Perpanjangan Sertifikat CRMP	16-19 Oktober 2023. Online/ Zoom meeting	PT RAP Indonesia
Ady Sutrisno Direktur SDM Direktur SDM	Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)" Risk Management Training & Certification "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)"	6-14 Desember 2023, Online meeting	CRMS (Center for Risk Management and Sustainability)
Rima Novianti Direktur Strategi dan Komersial Direktur Strategi dan Komersial	Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)" Risk Management Training & Certification "Qualified Risk Governance Professional (QRGP)"	6-14 Desember 2023, Online meeting	CRMS (Center for Risk Management and Sustainability)

Manajemen Risiko [GRI 2-23] [OJK E.3]

Risk Management [GRI 2-23] [OJK E.3]

Dalam menjalankan operasional bisnis, SPTP menghadapi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Untuk meminimalkan dampak berbagai risiko yang timbul, Perseroan secara konsisten menerapkan Manajemen Risiko yang di dalamnya terdapat mekanisme dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan usaha berkelanjutan Perseroan terkait aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

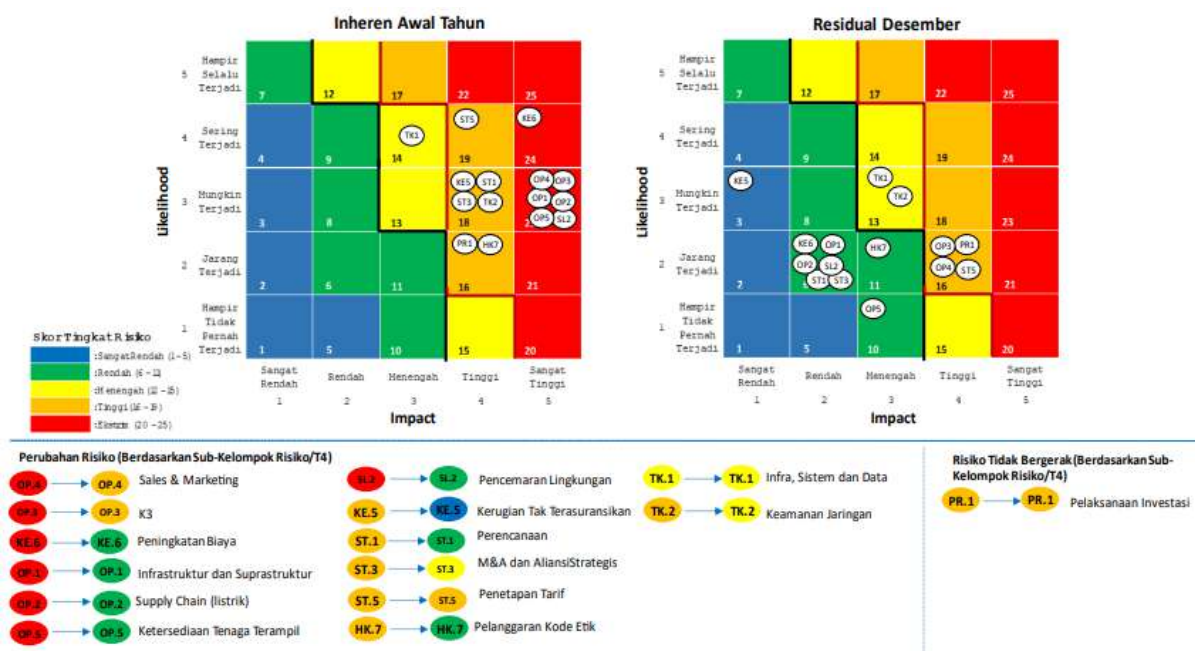
Untuk penerapan dan penguatan Manajemen Risiko dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2023, Perseroan melakukan pengelolaan monitoring terhadap risiko signifikan berdasarkan taksonomi risiko, melakukan tindak lanjut mitigasi risiko, serta menetapkan peta risiko yang di dalamnya berisi ikhtisar perubahan risiko termasuk level risiko inheren dan residual per 31 Desember 2023.

Monitoring pengelolaan risiko signifikan korporasi tahun 2023 digambarkan sebagai berikut:

In its business operations, SPTP faces various risks that could impact the achievement of targets and performance set out in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). To minimize the impact of these risks, the Company consistently applies Risk Management, which includes mechanisms to identify, measure, monitor, and control risks related to sustainable business practices concerning economic, environmental, and social aspects.

For the implementation and strengthening of Risk Management in its business activities for 2023, the Company has managed monitoring of significant risks based on risk taxonomy, followed up on risk mitigation actions, and established a risk map that includes an overview of risk changes, including inherent and residual risk levels as of December 31, 2023.

The monitoring of the corporation's significant risk management for 2023 is described as follows:



Adapun ikhtisar perubahan risiko disampaikan dalam tabel berikut:

The overview of risk changes is presented in the table below:

No	Tipe dan Peristiwa Risiko Tahun 2023 Risk Type and Event Year 2023	Penjelasan Description	Level & Nilai Risiko Risk Level & Value	
			Awal Tahun Beginning of the Year	Akhir Tahun End of the Year
1	Sales & Marketing (OP.4) Risiko Penurunan throughput petikemas/ tidak tercapai Sales & Marketing (OP.4) Risk of Decreased container throughput/not achieved	Realisasi <i>throughput</i> petikemas s.d. Desember 2023 yaitu 11.530.293 TEUS tercapai 98,47% dibanding RKAP 2023 s.d. Desember yaitu 11.709.201 TEUS, meningkat 102,63% dibanding realisasi 2022 sebesar 11.234.988 juta TEUS. Posisi risiko residual s.d. Desember masih berada pada risiko tinggi memperhatikan capaian terhadap target 2023. <i>The realization of container throughput until December 2023 is 11,530,293 TEUS achieved 98.47% compared to the 2023 RKAP until December, which was 11,709,201 TEUS, an increase of 102.63% compared to the 2022 realization of 11,234,988 million TEUS. The residual risk position until December is still at high risk considering the achievement of the 2023 target.</i>	Sangat Tinggi 23 Very High	Tinggi 16 High
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OP.3) Kecelakaan Kerja Occupational Safety and Health (OP.3) Work accident	Insiden kecelakaan kerja <i>fatality</i> di tahun 2023 terjadi pada triwulan II tahun 2023 (1 <i>case</i>) dan nihil pada akhir tahun 2023. <i>Injury case</i> sepanjang tahun 2023 terdapat 23 kejadian. Posisi risiko residual akhir tahun 2023 berada pada posisi risiko tinggi. <i>The fatality work incident in 2023 occurred in the second quarter of 2023 (1 case) and zero at the end of 2023. There were 23 injury cases throughout 2023. The residual risk position at the end of 2023 was in a high risk position.</i>	Sangat Tinggi 23 Very High	Tinggi 16 High
3	Peningkatan Biaya (KE.6) Peningkatan biaya operasional Increased Costs (KE.6) Increased operational costs	Capaian beban usaha sampai dengan Desember 2023 unaudited 95,87% dibanding RKAP tahun 2023. Pada realisasi tersebut tergambar biaya operasional perusahaan tidak tercapai, namun kenaikan masih dapat dikendalikan karena capaian masih di bawah RKAP 2023. <i>The achievement of operating expenses until December 2023 unaudited 95.87% compared to the 2023 RKAP. In this realization, it is shown that the company's operational costs were not achieved, but the increase can still be controlled because the achievement is still below the 2023 RKAP.</i>	Sangat Tinggi 24 Very High	Rendah 6 Low
4	Infrastruktur dan Suprastruktur (OP.1) 1. Kinerja alat belum tercapai terhadap target ketersediaan dan keandalan 2. Ketidaksiapan/ kerusakan fasilitas dan infrastruktur 3. Jumlah alat b/m milik yang ada tidak cukup memenuhi permintaan jasa layanan pelabuhan. Infrastructure and Superstructure (OP.1) 1. Equipment performance has not achieved the availability and reliability targets 2. Unpreparedness/damage to facilities and infrastructure 3. The number of existing loading/unloading equipment is not sufficient to meet the demand for port services.	Realisasi ketersediaan alat s.d. Desember 2023 adalah sebesar 90,49%. Kegiatan operasional dapat berjalan tanpa disrupsi berkaitan dengan terhentinya operasional di Terminal karena faktor alat bongkar maupun infrastruktur dan pendukungnya. Posisi risiko residual akhir tahun 2023 berada pada risiko rendah. <i>The realization of equipment availability until December 2023 is 90.49%. Operational activities can run without disruption related to the cessation of operations at the Terminal due to unloading equipment factors or infrastructure and its supporters. The residual risk position at the end of 2023 is at low risk.</i>	Sangat Tinggi 23 Very High	Rendah 6 Low
5	Supply Chain (OP.2) Terganggunya pelayanan suplai listrik Supply Chain (OP.2) Disruption of institutional supply services	Pada tahun 2023 operasional dapat berjalan tanpa disrupsi suplai listrik terutama pada Terminal yang hampir seluruh kegiatan operasionalnya menggunakan listrik untuk menggerakkan alat bongkar muat termasuk <i>Terminal Operating System (TOS)</i> sehingga posisi risiko residual akhir tahun 2023 yaitu rendah. <i>In 2023, operations can run without disruption of electricity supply, especially at the Terminal, where almost all operational activities use electricity to operate loading and unloading equipment, including the Terminal Operating System (TOS), so that the residual risk position at the end of 2023 is low.</i>	Sangat Tinggi 23 Very High	Rendah 6 Low

No	Tipe dan Peristiwa Risiko Tahun 2023 Risk Type and Event Year 2023	Penjelasan Description	Level & Nilai Risiko Risk Level & Value	
			Awal Tahun Beginning of the Year	Akhir Tahun End of the Year
6	Ketersediaan Tenaga Terampil (OP.5) Adanya Petugas operasional yang tidak memiliki kompetensi/ sertifikasi ahli bidang atau SIO yang kadaluarsa. Availability of skilled personnel (OP.5) The existence of operational officers who do not have the competence / certification of field experts or expired SIOs	Pada tahun 2023 tidak sampai terjadi adanya insiden berkaitan dengan ketidaksesuaian syarat keahlian tenaga operasional yang <i>obsolete</i> seperti Surat Izin Operator (SIO) atau sertifikasi keahlian lainnya melalui pengelolaan diklat sehingga posisi risiko residual akhir tahun 2023 rendah. <i>In 2023, there were no incidents related to non-compliance with obsolete operational staff expertise requirements such as Operator Licenses (SIO) or other expertise certifications through training management so that the residual risk position at the end of 2023 was low.</i>	Sangat Tinggi 23 Very High	Rendah 10 Low
7	Pencemaran Lingkungan (SL.2) Pencemaran lingkungan dalam lingkup Terminal SPTP. Environmental Pollution (SL.2) Environmental pollution within the scope of SPTP Terminal	Pada Tahun 2023 tidak terjadi insiden atau disrupsi berkaitan dengan pencemaran, dan telah dilaksanakan program audit sistem manajemen lingkungan SPTP dan terpadu dengan sistem manajemen lainnya seperti mutu dan SMK3 sehingga posisi risiko residual akhir tahun 2023 yaitu rendah. <i>In 2023, there were no incidents or disruptions related to pollution, and the SPTP environmental management system audit program was implemented and integrated with other management systems such as quality and SMK3 so that the residual risk position at the end of 2023 was low.</i>	Sangat Tinggi 23 Very High	Rendah 6 Low
8	Kerugian Tak Terasuransi (KE.5) Kurangnya perlindungan asuransi atas aset. Uninsured Losses (KE.5) Lack of insurance coverage for assets	Realisasi pengelolaan asuransi aset dan klaimnya pada tahun 2023 dapat terjaga, telah dilakukan pembahasan data aset dan dilakukan beberapa <i>endorsement</i> aset pertanggungungan serta telah dilakukan <i>risk assessment</i> penilaian aset di 8 area operasional Terminal dan Anak Perusahaan group. <i>The realization of asset insurance management and claims in 2023 can be maintained, asset data discussions have been carried out and several endorsements of insurance assets have been carried out and risk assessments have been carried out for asset assessments in 8 operational areas of the Terminal and Subsidiary Group.</i>	Tinggi 18 High	Sangat Rendah 3 Very Low
9	Perencanaan (ST.1) Progress Inisiatif Strategis tidak mencapai target/ mundur dari rencana awal Planning (ST.1) Strategic Initiative progress does not reach the target / delayed from the initial plan	Realisasi s.d. Desember 2023, progress capaian inisiatif Strategis Implementasi Kegiatan <i>Transshipment</i> Petikemas Domestik dan Internasional yaitu 1,16 miliar dari rencana target tahun 2023 sebesar 0,66 miliar, sedangkan <i>value creation</i> khususnya optimalisasi aset tercapai 30,58 miliar. Posisi risiko residual s.d. Desember berada pada posisi rendah. <i>Realization until December 2023, the progress of the achievement of the Strategic Initiative for the Implementation of Domestic and International Container Transshipment Activities is 1.16 billion from the 2023 target plan of 0.66 billion, while value creation, especially asset optimization, has reached 30.58 billion. The residual risk position until December is at a low position.</i>	Tinggi 18 High	Rendah 6 Low
10	MA dan Aliansi Strategis (ST.3) 1. Gagal Kerjasama dengan Mitra Strategis 2. Kegagalan Pengembangan Bisnis melalui Strategic Partnership MA and Strategic Alliances (ST.3) 1. Failed Cooperation with Strategic Partners 2. Business Development Failure through Strategic Partnership	Realisasi s.d. Desember 2023 khususnya terkait BNCT telah sampai pada terbentuknya PT BNCT dan dalam proses pemenuhan <i>Condition Presendent</i> (CP). <i>Realization until December 2023, especially related to BNCT, has reached the formation of PT BNCT and is in the process of fulfilling the Condition Presendent (CP).</i>	Tinggi 18 High	Menengah 13 Medium

No	Tipe dan Peristiwa Risiko Tahun 2023 Risk Type and Event Year 2023	Penjelasan Description	Level & Nilai Risiko Risk Level & Value	
			Awal Tahun Beginning of the Year	Akhir Tahun End of the Year
11	Penetapan Tarif (ST.5) Kegagalan Penyesuaian Tarif Tariff Setting (ST.5) Tariff Adjustment Failure	Realisasi penyesuaian tariff s.d. Desember 2023 sudah terdapat 3 Terminal yang telah memberlakukan tariff baru. Akan tetapi masih terdapat 3 Terminal yang masih belum terlaksana penyesuaian tariff sehingga masih terdapat loss Pendapatan akibat mundurnya rencana penyesuaian tariff. The realization of tariff adjustments until December 2023, there are already 3 Terminals that have implemented new tariffs. However, there are still 3 Terminals that have not implemented tariff adjustments so that there is still a loss of income due to the postponement of the tariff adjustment plan.	Tinggi 19 High	Tinggi 16 High
12	Pelaksanaan Investasi (PR.1) Rendahnya Penyerapan Investasi Investment Implementation (PR.1) Low Investment Absorption	Pada tahun 2023, Realisasi Progress fisik RKAP Investasi sebesar Rp1.239,83 miliar atau sebesar 38,81% terhadap RKAP 2023. Capaian program investasi dari 111 program belum dimulai 4, selesai 44, pelaksanaan fisik 35, lelang penyedia jasa 10, perencanaan/ desain 17, inisiasi 1. Risiko Residual pada Tahun 2023 masih pada risiko tinggi. In 2023, the Realization of the Physical Progress of the Investment RKAP amounted to IDR 1,239.83 billion or 38.81% of the 2023 RKAP. The achievement of investment programs from 111 programs has not started 4, completed 44, physical implementation 35, service provider auction 10, planning/ design 17, initiation 1. Residual Risk in 2023 is still at high risk.	Tinggi 16 High	Tinggi 16 High
13	Pelanggaran Kode Etik (HK.7) Terjadinya Kasus Penyuapan Violation of Code of Ethics (HK.7) Occurrence of Bribery Cases	Pada tahun 2023 tidak terdapat adanya pemberitaan negatif di SPTP Grup termasuk terkait suap/gratifikasi. Sampai akhir tahun 2023 tidak sampai terjadi insiden seperti korupsi/fraud yang terjadi sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data potensi perkara litigasi yang perlu menjadi perhatian di tahun 2024 yaitu berkaitan dengan saksi pegawai SPTP terkait DP4 (periode 2012 - 2019) dan terkait pengadaan/kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas fasilitas berhandle CFS dan LCL tahun 2022 di TTL. In 2023, there was no negative news in the SPTP Group including related to bribery/gratification. Until the end of 2023, there were no incidents such as corruption/fraud that occurred throughout 2023. Based on data on potential litigation cases that need attention in 2024, namely related to SPTP employee witnesses related to DP4 (period 2012 - 2019) and related to procurement/work activities to increase the capacity of CFS and LCL handling facilities in 2022 in TTL.	Tinggi 16 High	Rendah 11 Low
14	Infra, Sistem dan Data (TK.1) Terjadinya kegagalan integrasi antar sistem Infra, Systems and Data (TK.1) Inter-agency integration failure	Pada tahun 2023 dari data manajemen insiden IT 2023, terdapat 1 insiden in progress (per tanggal 10 Desember 2023 di TKP Kupang) terkait tidak bisa melakukan pelunasan autocollection via Bank Jatim di aplikasi IBS In 2023, based on the 2023 IT incident management data, there was 1 incident in progress (as of December 10, 2023 at the Kupang TKP) related to the inability to make autocollection payments via Bank Jatim in the IBS application.	Menengah 14 Medium	Menengah 13 Medium
15	Keamanan Jaringan (TK.2) Cyber Attack Sistem Informasi Network Security (TK.2) Cyber Attack of Information System	Pada akhir triwulan IV 2023 tidak sampai terjadi insiden yang lolos terkait cyber attack. Dari 8110 data manajemen insiden tiket IT sepanjang 2023, dari tarikan data 9 Januari 2024 bahwa 81 cancel, 7904 closed, 101 in progress, 7 on hold, 17 resolved. Case untuk in progress adalah berkaitan dengan layanan aplikasi dominan terkait Anjungan, Centra, Inco, PARAMA, dan PTOS/SPINER dengan assignment group IT Support ILCS, dan on hold dominan terkait CENTRA. At the end of the fourth quarter of 2023, there were no incidents related to cyber attacks. Of the 8110 IT ticket incident management data throughout 2023, from the data collection on January 9, 2024, 81 were canceled, 7904 were closed, 101 were in progress, 7 were on hold, and 17 were resolved. The cases for in progress are related to dominant application services related to Anjungan, Centra, Inco, PARAMA, and PTOS/SPINER with the IT Support ILCS assignment group, and on hold is predominantly related to CENTRA.	Tinggi 18 High	Menengah 13 Medium

Lebih lanjut, untuk menanamkan pentingnya implementasi Manajemen Risiko, Perseroan menyelenggarakan program budaya risiko sebagai berikut:

Further, to instill the importance of Risk Management implementation, the Company has organized the following risk culture program:

No.	Nama Kegiatan Activity Name	Waktu Kegiatan Activity Date	Keterangan Description
1.	Sosialisasi Budaya Risiko di PT Kaltim Kariangau Terminal <i>Socialization of Risk Culture at PT Kaltim Kariangau Terminal</i>	15 November 2023 <i>November 15, 2023</i>	Peserta Pegawai PT Kaltim Kariangau Terminal <i>Participants: Employees of PT Kaltim Kariangau Terminal</i>
2.	Risk Award PT Pelindo Terminal Petikemas <i>Risk Award PT Pelindo Terminal Petikemas</i>	13 Desember 2023 <i>December 13, 2023</i>	Peserta Terminal Petikemas, Anak Perusahaan di bawah SPTP dan Divisi Kantor Pusat SPTP <i>Participants: Terminal Petikemas, Subsidiaries under SPTP, and SPTP Head Office Divisions</i>
3.	Webinar "Polis <i>Liability Insurance</i> dalam Aspek Pengelolaan Pelabuhan" <i>Webinar "Liability Insurance Policies in Port Management Aspects"</i>	4 Desember 2023 <i>December 4, 2023</i>	Peserta Terminal Petikemas, Anak Perusahaan di bawah SPTP dan Divisi Kantor Pusat SPTP <i>Participants: Terminal Petikemas, Subsidiaries under SPTP, and SPTP Head Office Divisions</i>
4.	Blast email Edukasi Artikel: <i>Risk Maturity Assessment</i> sebagai Alat Mengukur Keefektifan Penerapan Manajemen Risiko <i>Blast Email Education Article: Risk Maturity Assessment as a Tool to Measure the Effectiveness of Risk Management Implementation</i>	12 Desember 2023 <i>December 12, 2023</i>	<i>Blast email dengan resipien SPTP Group</i> <i>Blast email to SPTP Group recipients</i>
5.	Blast email Edukasi Artikel: Polis <i>Liability Insurance</i> dalam Aspek Pengelolaan Pelabuhan <i>Blast Email Education Article: Liability Insurance Policies in Port Management Aspects</i>	12 Desember 2023 <i>December 12, 2023</i>	<i>Blast email dengan resipien SPTP Group</i> <i>Blast email to SPTP Group recipients</i>

Kode Etik [GRI 2-23, 2-24]

Code of Ethics [GRI 2-23, 2-24]

SPTP menyadari pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang dan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penerapan *Pedoman Kode Etik Bisnis (Code of Conduct)*. Keberadaan pedoman ini membantu insan SPTP dalam mengatasi isu-isu seputar etika atau dilema yang mungkin dihadapi dalam bekerja. Sesuai dengan visi Perusahaan Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia diharapkan dapat dicapai dengan penerapan *Pedoman Kode Etik Bisnis*, terlepas dari peran, fungsi, atau lokasi geografisnya.

Pedoman Kode Etik Bisnis SPTP disahkan dan diberlakukan bagi seluruh Insan SPTP sebagai bukti komitmen Insan SPTP untuk mewujudkan perilaku etika profesional dan etika kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Pedoman tersebut juga disusun untuk dijadikan acuan prinsip nilai-nilai budaya dan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas. *Pedoman Kode Etik Bisnis* akan dimutakhirkan dalam 3 (tiga) tahun sekali dan/atau jika terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan Pedoman ini.

Pada tahun pelaporan, pedoman yang berlaku adalah *Pedoman Kode Etik Bisnis Tahun 2022* sebagaimana dikukuhkan dalam Peraturan Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor: SK.01.01/30/6/1/TKHI/DRTU/PLTP-22. Pedoman berisi lima bab yaitu Pendahuluan, Etika Profesional, Etika Kerja, Penegakan *Pedoman Kode Etik Bisnis*, dan Penutup. Informasi selengkapnya *Pedoman Kode Etik Bisnis* dapat diakses melalui website: <https://drive.google.com/file/d/1ltNyRf0anPD2sHmi3sCkqNM8RWaGnfiJ/view>

Untuk membangun kultur perusahaan berbasis nilai-nilai GCG dan budaya perusahaan, SPTP melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam *Pedoman Kode Etik Bisnis* ini kepada seluruh Insan SPTP secara

SPTP recognizes the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) as a tool for enhancing long-term and sustainable business value and growth. Therefore, the Company is committed to consistently applying GCG, one of which is through the implementation of the Business Code of Conduct. This guideline helps SPTP employees address ethical issues or dilemmas that may arise while working. In line with the Company's vision to become a Leading Integrated and World-Class Maritime Ecosystem, this goal is expected to be achieved through the implementation of the Business Code of Conduct, regardless of roles, functions, or geographical locations.

The Business Code of Conduct of SPTP is approved and enforced for all SPTP employees as evidence of their commitment to professional ethical behavior and work ethics in daily operations. The guideline is also designed as a reference for the principles of cultural values and good corporate governance within PT Pelindo Terminal Petikemas. The Business Code of Conduct will be updated every three years and/or if there are changes in the Articles of Association and/or regulatory provisions affecting the content or validity of this guideline.

In the reporting year, the applicable guideline is the 2022 Business Code of Conduct as stipulated in the PT Pelindo Terminal Petikemas Director's Regulation Number: SK.01.01/30/6/1/TKHI/DRTU/PLTP-22. The guideline includes five chapters: Introduction, Professional Ethics, Work Ethics, Enforcement of the Business Code of Conduct, and Closing. More information about the Business Code of Conduct can be accessed through the website: <https://drive.google.com/file/d/1ltNyRf0anPD2sHmi3sCkqNM8RWaGnfiJ/view>

To build a company culture based on GCG values and corporate culture, SPTP conducts regular socialization and internalization of the values contained in the Business Code of Conduct to all SPTP employees. During the reporting year, the

berkala. Selama tahun pelaporan, sosialisasi dan internalisasi *Pedoman Kode Etik Bisnis* dilakukan melalui *blasting* email ke seluruh pegawai, media sosial serta penggunaan aplikasi P-Good sekaligus untuk penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai.

Pelaksanaan *Pedoman Kode Etik Bisnis* merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan SPTP. Apabila terjadi dugaan pelanggaran atau dugaan penyimpangan maka Insan SPTP wajib melaporkan dugaan pelanggaran tersebut melalui:

1. *Whistleblowing System*;
2. Pimpinan Regional/Sub Holding/Cabang/ Anak Perusahaan;
3. Atasan Langsung (satu tingkat di atas yang bersangkutan);
4. Atasan tidak langsung (atasan dari pada atasan langsung/atasan dua tingkat di atas yang bersangkutan);
5. Pimpinan Unit Pengelola SDM di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran *Pedoman Kode Etik Bisnis*, SPTP telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Insan SPTP yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Pedoman Kode Etik Bisnis* ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan, dengan melalui mekanisme indisipliner.
- b. Sanksi bagi Pekerja yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Indisipliner.
- c. Dewan Komisaris dan/atau Direksi akan memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi indisipliner dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan unit kerja masing-masing/ mekanisme indisipliner.
- d. Sanksi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
- e. Bila mitra usaha atau Stakeholders lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan ketentuan lain yang mengatur hal tersebut. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

socialization and internalization of the Business Code of Ethics Guidelines were carried out through email blasting to all employees, social media and the use of the P-Good application as well as for the signing of integrity pacts by all employees.

The implementation of the Business Code of Conduct is a commitment and responsibility of all SPTP employees. In the event of suspected violations or deviations, SPTP employees are required to report such suspicions through:

1. Whistleblowing System;
2. Regional/Sub Holding/Branch/ Subsidiary Management;
3. Direct Supervisor (one level above the concerned);
4. Indirect Supervisor (supervisor of the direct supervisor/ two levels above the concerned);
5. Human Resource Management Unit Head in the work area.

Regarding sanctions for violations of the Business Code of Conduct, SPTP has established the following provisions:

- a. Any SPTP employee proven to have violated this Business Code of Conduct will be given sanctions according to the applicable regulations and provisions of the Company, through an indiscipline mechanism.
- b. Sanctions for workers who commit violations are determined by the Board of Directors after receiving recommendations from the Indiscipline Team.
- c. The Board of Commissioners and/or the Board of Directors will decide on corrective actions, indiscipline sanctions, and/or other actions and preventive measures to be implemented by direct supervisors within their respective work units/indiscipline mechanisms.
- d. Sanctions for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who commit violations are decided by the Shareholders.
- e. If business partners or other stakeholders commit violations, they will be subject to the provisions outlined in the contract and other applicable regulations. In cases involving criminal offenses, these may be reported to the authorities.

Per 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 6 (enam) pelanggaran *Pedoman Kode Etik Bisnis* dengan detail pelanggaran dan proses penindakan sebagai berikut:

As of December 31, 2023, there were 6 (six) recorded violations of the Business Code of Conduct with details of the violations and enforcement processes as follows:

No	Keterangan Description	2023		2022	
		Dalam Proses In Process	Selesai Completed	Dalam Proses In Process	Selesai Completed
1	PHK <i>Termination</i>	-	1	-	-
2	Disiplin Ringan <i>Minor Disciplinary</i>	-	-	-	-
3	Disiplin Sedang <i>Medium Disciplinary</i>	-	2	-	1
4	Disiplin Berat <i>Severe Disciplinary</i>	-	3	1	-

Sistem Pengaduan Pelanggaran [GRI 2-26]

Whistleblowing System [GRI 2-26]

Dalam rangka mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta untuk memperkuat penerapan praktik GCG, SPTP menerapkan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*). WBS adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyimpangan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan mandiri. WBS digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan SPTP dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Sebagai penguatan perangkat WBS sekaligus sejalan dengan komitmen untuk terus menyempurnakan implementasi GCG, Perusahaan telah memiliki Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS) di lingkungan SPTP yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: PER.0028/PW.06/PLTP-2021. Merujuk surat ini, Pelapor dapat menyampaikan pengaduan terjadinya indikasi pelanggaran yang dilakukan Terlapor melalui media:

- Telephone, pesan singkat, WhatsApp ke nomor: 0811 3053 5333
- E-mail: timwbs.tpk@pelindo.co.id
- PO Box 1350/SB 60000
- Website: www.pelindotpk.co.id

Penyampaian pengaduan indikasi pelanggaran juga bisa ditujukan langsung kepada Ketua Komite Pelindo Bersih PT Pelindo Terminal Petikemas, Jalan Perak Timur No.610, Surabaya 60165. Informasi selengkapnya tentang prinsip, maksud, tujuan dan manfaat, prosedur penanganan pengaduan, perlindungan pelapor dan sebagainya bisa diunduh melalui situs/website:

<https://drive.google.com/file/d/1OWEH3Lh4erQCSkpX2CeulNfb-ZF04196/view>

Lebih lanjut, untuk mengukuhkan keberadaan WBS, Perusahaan melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada seluruh insan SPTP dan secara berkala akan melaksanakan pemutakhiran serta penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi penerapan GCG, publikasi melalui intranet, dan

To prevent deviations and fraud, and to strengthen the implementation of good corporate governance (GCG) practices, SPTP has established a Whistleblowing System (WBS). The WBS is a system that manages complaints and disclosures of unlawful behavior or unethical/unjust conduct confidentially, anonymously, and independently. It is used to optimize the role of SPTP employees and other parties in reporting violations within the company.

To reinforce the WBS and in line with its commitment to continually improve GCG implementation, the company has a Whistleblowing System Guideline, which was approved through Director's Decree No.: PER.0028/PW.06/PLTP-2021. According to this decree, reporters can submit complaints of alleged violations committed by the reported party through:

- Phone, text message, WhatsApp at: 0811 3053 5333
- E-mail: timwbs.tpk@pelindo.co.id
- PO Box 1350/SB 60000
- Website: www.pelindotpk.co.id

Complaints can also be directed to the Chairman of the Clean Pelindo Committee at PT Pelindo Terminal Petikemas, Jalan Perak Timur No.610, Surabaya 60165. More detailed information about the principles, aims, objectives, benefits, complaint handling procedures, and protection of whistleblowers can be downloaded from the website.

<https://drive.google.com/file/d/1OWEH3Lh4erQCSkpX2CeulNfb-ZF04196/view>

Complaints can also be directed to the Chairman of the Clean Pelindo Committee at PT Pelindo Terminal Petikemas, Jalan Perak Timur No.610, Surabaya 60165. More detailed information about the principles, aims, objectives, benefits, complaint handling procedures, and protection of whistleblowers can be downloaded from the website.

media komunikasi lainnya.

Per 31 Desember 2023, SPTP tidak menerima pengaduan melalui WBS atau tercatat nihil.

As of December 31, 2023, SPTP did not receive any complaints through the WBS, recording zero complaints.

Komunikasi Masalah Penting/Kritis, serta Mekanisme untuk Mencari Nasihat dan Mengemukakan Masalah [GRI 2-16, 2-26]

Communication of Critical Issues and Mechanisms for Seeking Advice and Raising Concerns [GRI 2-16, 2-26]

SPTP membuka diri untuk membahas masalah penting/kritis serta dampak negatif potensial maupun aktual yang disampaikan pemangku kepentingan melalui *Whistleblowing System* (WBS) maupun kanal pengaduan lain. Dampak dimaksud termasuk yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial-ekonomi dan tata kelola (*Environmental Social and Governance/ESG*). Seluruh pengaduan yang masuk akan ditinjau oleh tim pengelola WBS, sedangkan pengaduan yang bersifat penting/kritis akan dibahas bersama badan tata kelola tertinggi yaitu Dewan Komisaris dan Direksi melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tahun 2023, tidak terdapat masalah penting/kritis yang potensial maupun faktual mengganggu keberlanjutan bisnis SPTP sehingga tidak ada informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan ini. Sementara itu, untuk membahas isu-isu terkait dampak ekonomi, lingkungan dan sosial – termasuk ESG, Perseroan mengoptimalkan peran beberapa Divisi seperti Sekretariat Perusahaan dan HSSE sebagai organ pendukung tata kelola yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial di SPTP.

SPTP is open to discussing critical issues and potential or actual negative impacts reported by stakeholders through the Whistleblowing System (WBS) or other complaint channels. These impacts include those related to environmental, social-economic, and governance (ESG) aspects. All complaints received are reviewed by the WBS management team, and critical issues are discussed with the highest governance body, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors, through meetings, including Board of Commissioners meetings, Board of Directors meetings, or joint meetings of both boards.

In 2023, there were no critical issues that potentially or factually disrupted the sustainability of SPTP's business, and therefore no information was disclosed in this Sustainability Report. Meanwhile, to discuss issues related to economic, environmental and social impacts – including ESG, the Company optimizes the role of several Divisions such as the Corporate Secretariat and HSSE as supporting governance organs responsible for making decisions on economic, environmental and social topics at SPTP.

Benturan Kepentingan [GRI 2-15]

Conflict of Interest [GRI 2-15]

Merujuk *Pedoman Kode Etik Bisnis*, seluruh Insan SPTP berkomitmen untuk berperilaku etis sesuai dengan kepentingan Perusahaan. Lebih lanjut, Perusahaan berkomitmen untuk menghindari hubungan, aktivitas, atau perkumpulan yang akan memengaruhi kemampuan Insan SPTP untuk membuat keputusan yang adil dan objektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Semua keputusan bisnis harus netral, bebas dari benturan kepentingan, serta berdasarkan peraturan Perusahaan dan proses bisnis yang berlaku secara umum/best practice.

Aktivitas yang dilakukan di luar SPTP dianggap sebagai konflik kepentingan jika:

1. Aktivitas tersebut merusak reputasi PT Pelindo Terminal Petikemas.
2. Aktivitas tersebut memberi dampak buruk pada bisnis PT Pelindo Terminal Petikemas.
3. Aktivitas tersebut mempengaruhi individu dalam membuat keputusan kerja.

Seluruh Insan SPTP tidak diperkenankan untuk:

1. Menggunakan status kepegawaian, posisi, atau reputasi di PT Pelindo Terminal Petikemas untuk mencapai tujuan pribadi, keluarga, atau kerabat.
2. Menggunakan aset/sumber daya Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Menghindari benturan kepentingan adalah sesuai dengan nilai-nilai integritas yang diharapkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

According to the Code of Conduct guidelines, all employees of SPTP are committed to ethical behavior in the interests of the company. Furthermore, the company is committed to avoiding relationships, activities, or associations that might influence employees' ability to make fair and objective decisions in their work duties. All business decisions must be neutral, free from conflicts of interest, and based on company regulations and generally accepted best practices.

Activities conducted outside of SPTP are considered a conflict of interest if:

1. The activity damages the reputation of PT Pelindo Terminal Petikemas.
2. The activity has a negative impact on PT Pelindo Terminal Petikemas.
3. The activity influences an individual's decision-making at work.

Employees of SPTP are not allowed to:

1. Use their employment status, position, or reputation at PT Pelindo Terminal Petikemas for personal, family, or relatives' interests.
2. Use company assets/resources for personal purposes.

Avoiding conflicts of interest aligns with the integrity values expected to be applied in daily life.



Rasio Kompensasi Total Tahunan [GRI 2-21]

Annual Total Compensation Ratio [GRI 2-21]

Berdasarkan remunerasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi SPTP tahun 2023 seperti disampaikan dalam Laporan Tahunan Perseroan, maka dapat dihitung rasio total kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap total kompensasi seluruh karyawan SPTP sebagaimana tabel berikut:

Based on the performance remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors of SPTP in 2023 as stated in the Company's Annual Report, the ratio of the total compensation of the Board of Commissioners and Board of Directors to the total compensation of all SPTP employees can be calculated as in the following table:

Keterangan Description		2023	2022	2021
A. Total Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi (Rp Juta)	Total Compensation of Board of Commissioners and Board of Directors (Rp Million)	93.081	81.825	23.515
B. Total Kompensasi Karyawan (Rp Juta)	Total Compensation of Employees (Rp Million)	595.662	419.076	35.464
Rasio Total Kompensasi = A : B	Total Compensation Ratio = A : B	16%	20%	66%

Kebijakan Antigratifikasi dan Antikorupsi

Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy

Perseroan meyakini bahwa gratifikasi dan korupsi merupakan musuh bersama, sekaligus menjadi penghambat bagi lajunya pembangunan yang saat ini sedang dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Sikap dan komitmen SPTP tersebut merupakan dukungan dan implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[GRI 3-3]

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan kebijakan antigratifikasi dan antikorupsi, SPTP menerbitkan Peraturan Direksi No. PER.0050/HI.02.01/PLTP-2021 tanggal 27 Desember tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelindo Terminal Petikemas. Mengacu pada peraturan Direksi tersebut maka dibentuk Tim

The company believes that bribery and corruption are common enemies and significant obstacles to the progress of the ongoing and sustainable development efforts. SPTP's stance and commitment are in support of and in implementation of Law No. 20 of 2001 on the Amendment of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.[GRI 3-3]

As a demonstration of its commitment to implementing anti-bribery and anti-corruption policies, SPTP issued Director's Regulation No. PER.0050/HI.02.01/PLTP-2021 dated December 27, 2021, regarding the Guidelines for Controlling Bribery at PT Pelindo Terminal Petikemas. Based on this Director's Regulation, a Bribery Control

Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Direksi No. KEP.0020/HI.02.01/ PLTP-2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Informasi selengkapnya tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bisa diakses melalui website/situs: <https://drive.google.com/file/d/1AjJUje7vnXaPhnGERnQZhwGAwHNwGOQP/view>

Adapun penyampaian laporan gratifikasi dapat dilakukan melalui:

- Sekretaris Perusahaan Up. Unit Pengendalian Gratifikasi Jl. Perak Timur No. 478, Surabaya, 60165
- Website: pelindobersih.whistleblowing.link
- E-mail: pelindobersih@whistleblowing.link
- Telepon/WA: 08119332345

Berdasarkan data dari Unit Pengelola Gratifikasi SPTP, pada tahun pelaporan, Perseroan tidak menerima laporan terkait gratifikasi. Terkhusus tentang antikorupsi, sejalan dengan kebijakan pengendalian gratifikasi, SPTP telah melakukan pemetaan dan mitigasi terhadap proses bisnis yang berisiko besar terjadi korupsi/penyuapan antara lain pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia serta keuangan. Adapun mitigasi atas risiko terjadinya korupsi yang diambil Perseroan adalah dengan melakukan sosialisasi anti korupsi secara berkala serta melakukan webinar antikorupsi. [GRI 205-1]

Sejalan dengan penerapan kebijakan antikorupsi, Perseroan telah melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk mengomunikasikan kebijakan antikorupsi, baik kepada badan tata kelola (Dewan Komisaris dan Direksi), karyawan maupun mitra/vendor. Kepada badan tata kelola dan karyawan, sosialisasi dilakukan melalui pengenalan perusahaan ketika badan tata kelola pertama kali bergabung dengan perusahaan dan melalui aplikasi P-Good Dengan sosialisasi tersebut, per 31 Desember 2023, sebanyak 6 anggota Dewan Komisaris 100% dari total anggota Dewan Komisaris), 6 anggota Direksi 100% dari total anggota Direksi dan 7.625 orang karyawan 100% dari total karyawan), telah mendapatkan informasi terkait kebijakan dan prosedur antikorupsi. [GRI 205-2]

Selain sosialisasi kebijakan antikorupsi, komitmen antikorupsi juga dilakukan dengan menyelenggarakan atau mengikutsertakan insan SPTP dalam program pelatihan antikorupsi. Dengan kebijakan tersebut, selama tahun 2023, 13 orang anggota badan tata kelola 100% dari total anggota Dewan Komisaris dan

Unit was established with Director's Decree No. KEP.0020/HI.02.01/PLTP-2021 dated December 27, 2021. Detailed information on the Bribery Control Guidelines can be accessed through the website: <https://drive.google.com/file/d/1AjJUje7vnXaPhnGERnQZhwGAwHNwGOQP/view>

Reports on bribery can be submitted via:

- Corporate Secretary, Attn: Bribery Control Unit, Jl. Perak Timur No. 478, Surabaya, 60165
- Website: pelindobersih.whistleblowing.link
- E-mail: pelindobersih@whistleblowing.link
- Phone/WhatsApp: 08119332345

According to data from the Bribery Management Unit at SPTP, during the reporting year, the company did not receive any reports related to bribery. Specifically regarding anti-corruption, in line with the bribery control policy, SPTP has conducted mapping and mitigation of business processes at high risk of corruption/bribery, including procurement of goods and services, human resources, and finance. The Company's mitigation of the risk of corruption is by conducting periodic anti-corruption socialization and conducting anti-corruption webinars. [GRI 205-1]

In line with the anti-corruption policy, the company has made various efforts to communicate the anti-corruption policy to governance bodies (Board of Commissioners and Board of Directors), employees, and partners/vendors. For the governance body and employees, socialization is carried out through company introduction when the governance body first joins the company and through the P-Good application. With this socialization, as of December 31, 2023, as many as 6 members of the Board of Commissioners (100% of the total members of the Board of Commissioners), 6 members of the Board of Directors (100% of the total members of the Board of Directors) and 7,625 employees (100% of the total employees) have received information related to anti-corruption policies and procedures. [GRI 205-2]

In addition to the socialization of anti-corruption policies, anti-corruption commitments are also carried out by organizing or involving SPTP personnel in anti-corruption training programs. With this policy, during 2023, 13 members of the governance body (100% of the total members of the Board of Commissioners and Directors)

Direksi) sudah mengikuti pelatihan antikorupsi, dan sebanyak 7.625 karyawan (100% dari total karyawan) telah mengikuti program serupa. [GRI 205-2]

have participated in anti-corruption training, and as many as 7,625 employees (100% of the total employees) have participated in similar programs. [GRI 205-2]

Tabel Pelatihan dan Sosialisasi Antikorupsi Tahun 2023
Anti-Bribery and Anti-Corruption Training and Socialization for 2023

No	Pelatihan Training		Waktu Time	Peserta Participants
1	Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016	ISO 37001 Anti-Bribery Management System Awareness: 2016	20 - 21 Maret/March 2023	25 Orang/ Person
2	Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016	Internal Auditor Training ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System	15 - 17 Mei/May 2023	25 Orang/ Person
3	Pelatihan Lead Auditor Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001	ISO 37001 Anti-Bribery Management System Lead Auditor Training	8 - 12 Mei/May 2023	25 Orang/ Person
4	Executive Awareness ISO 37001 - 2016	Executive Awareness ISO 37001 - 2016	6 April/April 2023	25 Orang/ Person

Komitmen dan kesungguhan insan SPTP terhadap antikorupsi membawa hasil positif dengan tidak terdapat insiden korupsi pada tahun pelaporan. Dengan demikian, Perseroan tidak mengambil tindakan tertentu untuk perbaikan, baik tindakan secara internal maupun eksternal, serta tidak terdapat tindakan tertentu terhadap mitra/ vendor, misalnya pemutusan kerja sama karena terlibat tindak korupsi. [GRI 205-3]

The commitment and seriousness of SPTP's employees towards anti-corruption have yielded positive results with no corruption incidents reported during the reporting year. Therefore, the company did not undertake any specific actions for improvement, whether internal or external, nor were there any actions taken against partners/ vendors, such as terminating cooperation due to involvement in corruption. [GRI 205-3]

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan [GRI 2-26, 2-29][OJK E.4]

Stakeholder Relations [GRI 2-26, 2-29][OJK E.4]

SPTP senantiasa membangun kerja sama dan komunikasi yang baik dengan segenap pemangku kepentingan, baik pemangku internal maupun eksternal. Komitmen itu terus ditumbuhkan karena Perseroan meyakini setiap pemangku kepentingan berkontribusi terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan cara dan perannya masing-masing. SPTP mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai entitas atau individu yang terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan jasa Perseroan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga memengaruhi Perseroan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan.

SPTP consistently builds and maintains good cooperation and communication with all stakeholders, both internal and external. This commitment is continuously fostered because the company believes that each stakeholder contributes to the company's performance in their respective ways and roles. SPTP defines stakeholders as entities or individuals affected by the company's activities, products, and services. Conversely, their existence also influences the company in achieving the successful implementation of strategies and goals.

Untuk mengetahui dan memetakan pemangku kepentingan yang relevan dengan bidang usaha perusahaan, SPTP telah melakukan identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan bentuk relasi yang terbangun dan interaksi yang terjalin antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan identifikasi tersebut terdapat 6 (enam) pemangku kepentingan yang dinilai memberikan pengaruh besar terhadap keberlanjutan SPTP sebagai berikut:

Pemegang Saham

SPTP sebagai salah satu *subholding* BUMN kepelabuhanan Pelindo yang memiliki bisnis sebagai pengelola Terminal Petikemas terbesar di Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memberikan dividen kepada Pemegang Saham (Pelindo), serta berupaya memperlancar integrasi logistik dalam upaya mendukung pembangunan dalam lingkup makro ekonomi. Lebih lanjut, Perusahaan akan berupaya memenuhi keinginan Pemegang Saham antara lain:

- Mengedepankan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi kinerja Perusahaan,
- Pencapaian sasaran kinerja Perusahaan melalui peningkatan produktivitas layanan dan operasional yang unggul berlandaskan kaidah dan norma penyelenggaraan perusahaan yang baik (GCG),
- Meningkatkan kesadaran terhadap kontrol dan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal Perusahaan, guna menunjang keberhasilan manajemen.

Pelanggan

Bagi SPTP, pelanggan bukan hanya sebagai pengguna jasa bongkar muat peti kemas yang menghasilkan nilai bagi perusahaan, tetapi merupakan salah satu aset Perusahaan yang penting. Untuk itu, upaya perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh Perusahaan guna mendapatkan *beyond customer expectation*. Adapun kebutuhan dan keinginan pelanggan antara lain:

- Kenyamanan dan penyederhanaan proses pelayanan untuk menghasilkan pelayanan terbaik,
- Ketepatan waktu pelayanan, sistem informasi yang real time dan tarif yang kompetitif,
- Penyediaan layanan yang terintegrasi guna pemenuhan keinginan pelanggan yang heterogen,
- Kesiapan dan ketersediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan yang andal,

To identify and map stakeholders relevant to the company's business, SPTP has carried out stakeholder identification based on the forms of relationships and interactions between the company and the stakeholders. According to this identification, there are six stakeholders deemed to have a significant influence on SPTP's sustainability as follows:

Shareholders

SPTP, as a subholding BUMN in the port sector and the largest container terminal operator in Indonesia, is committed to providing dividends to Shareholders (Pelindo) and facilitating logistics integration to support macroeconomic development. The company aims to meet shareholder expectations by:

- Prioritizing the use of integrated Information and Communication Technology (ICT) to enhance efficiency, effectiveness, and performance optimization,
- Achieving company performance targets through improved service productivity and operational excellence based on good corporate governance principles,
- Increasing awareness of control and oversight, both internally and externally, to support effective management.

Customers

For SPTP, customers are not only users of container loading and unloading services who add value to the company but also a crucial asset. Therefore, continuous improvement efforts are made to exceed customer expectations. Customer needs and desires include:

- Convenience and simplification of service processes for optimal service delivery,
- Timely service, real-time information systems, and competitive pricing,
- Integrated services to meet diverse customer needs,
- Readiness and reliability of port facilities and equipment,

- e. Jaminan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pegawai

Pegawai merupakan entitas sentral dan faktor strategis bagi SPTP. Untuk itu, Perseroan senantiasa memenuhi aspirasi pegawai di antaranya:

- a. Kejelasan *career path system* sesuai dengan kompetensi, baik *hard skill* maupun *soft skill*, dan minat pegawai,
- b. Peningkatan kompetensi pegawai berwawasan global sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan organisasi,
- c. Penciptaan lingkungan kerja yang kondusif melalui implementasi budaya kerja dan sistem manajemen kinerja yang transparan,
- d. Peningkatan kesejahteraan berdasarkan prestasi kerja pegawai,
- e. Kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan berperan aktif dalam menentukan arah pengembangan usaha ke depan.

Masyarakat

Perusahaan berupaya memperhatikan kehadiran dan keberadaan masyarakat di sekitarnya melalui berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan upaya tersebut diharapkan terbentuk komunitas di lingkungan sekitar terminal yang menjadi garda terdepan dalam mendukung berbagai upaya pengembangan terminal, khususnya ketika muncul permasalahan yang bersifat sosial di sekitar terminal. Adapun kebutuhan masyarakat yang menjadi perhatian Perusahaan di antaranya:

- a. Berwawasan lingkungan dalam segala kegiatan pengembangan dan pengoperasian terminal,
- b. Berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan terminal melalui kegiatan CSR yang terdiri dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Mitra Kerja

Mitra kerja merupakan pihak ketiga yang menyediakan bahan, jasa, maupun produk yang dibutuhkan Perusahaan untuk meningkatkan kinerja, sekaligus mencapai tujuan. Mengingat pentingnya peran mitra kerja, maka Perusahaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mitra kerja di antaranya:

- e. Assurance of long-term business sustainability that benefits both parties.

Employees

Employees are central and strategic factors for SPTP. The company is committed to fulfilling employee aspirations, including:

- a. Clear career path systems based on competencies, both hard skills and soft skills, and employee interests,
- b. Enhancing global competence in line with business development and organizational needs,
- c. Creating a conducive work environment through the implementation of a work culture and transparent performance management system,
- d. Improving welfare based on employee performance,
- e. Providing opportunities to voice opinions and actively participate in determining future business development directions.

Community

The company pays attention to the presence and existence of the surrounding community through various Corporate Social Responsibility (CSR) programs. These efforts aim to build a community around the terminal that supports terminal development and addresses social issues. Community needs addressed by the company include:

- a. Environmental awareness in all terminal development and operational activities,
- b. Active participation in improving community welfare through CSR activities, including social and environmental responsibility programs.

Business Partners

Business partners are third parties that provide materials, services, or products needed by the company to enhance performance and achieve objectives. Given the crucial role of business partners, the company strives to meet their needs and aspirations, including:

- Transparansi dan adil dalam pelaksanaan kerja sama usaha,
- Penyederhanaan proses untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembayaran,
- Keberlangsungan kerja sama usaha dalam jangka panjang.

- Transparency and fairness in the execution of business collaborations,
- Streamlining processes to ensure payment effectiveness and efficiency,
- Ensuring long-term sustainability of business partnerships.

Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJK E.5]

Issues with Implementing Sustainable Finance [OJK E.5]

SPTP tidak menghadapi permasalahan yang signifikan dalam menerapkan keuangan/kegiatan berkelanjutan (*sustainable operation*), yaitu kegiatan operasi Perusahaan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Secara khusus, berkaitan dengan penerapan kegiatan berkelanjutan melalui pengalokasian sebagian dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/CSR untuk membiayai program-program yang selaras dengan kegiatan berkelanjutan seperti diatur dalam POJK Keuangan/Kegiatan Berkelanjutan, Perusahaan telah berupaya secara maksimal melaksanakannya selama tahun pelaporan. Kegiatan yang dilakukan antara lain membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar daerah operasi perusahaan. Dalam menjalankan TJSL/CSR sebagaimana disampaikan pada Bab Kinerja Sosial Keberlanjutan, Perusahaan juga tidak menghadapi permasalahan yang signifikan.

SPTP has not faced significant issues in implementing sustainable finance, which refers to the company's operations considering economic, environmental, and social aspects. Specifically, regarding the application of sustainable activities through allocating part of the Corporate Social Responsibility (CSR) funds for programs aligned with sustainable practices, as regulated in POJK (Financial Services Authority Regulation) on Sustainable Finance, the company has made substantial efforts to comply during the reporting year. Activities include constructing facilities to enhance the quality of life for communities around the company's operational areas. In executing CSR, as outlined in the Sustainability Social Performance chapter, the company also did not encounter significant problems.

Pelindo Mengajar

Terminal 1 Surakarta, 24 Februari 2023

Bakti BUMN
Untuk Indonesia



PROGRAM PELINDO MENANAM POHON

Terminal Berlian, 16 September 2023





KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainable Performance



PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menjalankan usaha dengan berpegang pada prinsip bisnis yang berkelanjutan, yaitu meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan isu-isu terkait lingkungan dan sosial-kemasyarakatan. Prinsip ini selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dalam arti luas, makna keuangan berkelanjutan bagi perusahaan adalah kegiatan berkelanjutan (*sustainable operation*) yaitu kegiatan operasi perusahaan yang dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) operates with a commitment to sustainable business principles, aiming to achieve maximum profitability while addressing environmental and social issues. This principle aligns with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, or POJK Sustainable Finance. Sustainable finance involves comprehensive support from the financial sector to create sustainable economic growth by aligning economic, environmental, and social interests. Broadly, sustainable finance for companies refers to operations that consider economic, environmental, and social aspects.

Dalam statusnya bukan sebagai emiten dan perusahaan publik, SPTP tidak wajib menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan. Namun demikian, Perseroan mendukung dan mengimplementasikan spirit peraturan tersebut karena meyakini bahwa keselarasan antara kinerja aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial merupakan suatu keharusan. Sebab, fungsi suatu perusahaan bukan hanya mencetak laba tetapi juga dituntut menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial. Lebih dari itu, bagi SPTP, keselarasan ketiga aspek merupakan pondasi penting untuk mewujudkan bisnis yang berkesinambungan dengan pencapaian kinerja yang optimal.

Although SPTP is not an issuer or a public company and is therefore not required to implement POJK Sustainable Finance, the company supports and applies the spirit of this regulation. SPTP believes that aligning economic, environmental, and social performance is essential. A company's role is not only to generate profit but also to maintain environmental sustainability and address social issues. For SPTP, this alignment of the three aspects is a crucial foundation for achieving a sustainable business with optimal performance.

Membangun Budaya Keberlanjutan [OJK F.1]

Dukungan SPTP terhadap kegiatan berkelanjutan diwujudkan melalui pembiayaan atau investasi yang selaras dengan prinsip kegiatan berkelanjutan seperti mengutamakan efisiensi, mengurangi kesenjangan sosial dan sebagainya. Selain itu, dukungan Perseroan juga direalisasikan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR). Selanjutnya, untuk mewujudkan penerapan kegiatan berkelanjutan yang efektif, Perseroan mengadopsi 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan sebagai panduan yaitu prinsip investasi bertanggung jawab; prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup;

Building a Sustainability Culture [OJK F.1]

SPTP's support for sustainable activities is demonstrated through financing or investments that align with sustainable principles, such as prioritizing efficiency and reducing social disparities. Additionally, the company supports sustainability through the implementation of its Social and Environmental Responsibility (TJSL) or Corporate Social Responsibility (CSR) programs. To effectively implement sustainable activities, the company adopts eight sustainable finance principles as guidelines, including: responsible investment principles; principles of sustainable business strategy and practices; principles of social and environmental risk management; governance principles; informative communication principles; inclusive principles;



prinsip tata kelola; prinsip komunikasi yang informatif; prinsip inklusif; prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Berlandaskan kedelapan prinsip tersebut, SPTP menetapkan budaya keberlanjutan yang disosialisasikan kepada seluruh manajemen dan karyawan sehingga keberadaannya menjangkau seluruh insan Perseroan. Budaya keberlanjutan merujuk pada budaya Perseroan sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Sosialisasi untuk membangun budaya keberlanjutan dilakukan Perseroan melalui berbagai media dan kesempatan, seperti situs/website, media sosial, pertemuan antara manajemen dengan pegawai atau pertemuan dengan mitra kerja, masyarakat atau pemangku kepentingan eksternal lainnya, baik yang terjadwal maupun yang insidental.

Selain itu, sosialisasi budaya keberlanjutan juga dilakukan SPTP melalui berbagai kegiatan yang sejalan dengan kaidah kegiatan berkelanjutan seperti melalui program TJSL/CSR, maupun operasional usaha dan perkantoran yang ramah lingkungan. Operasional ramah lingkungan diimplementasikan melalui serangkaian program seperti efisiensi penggunaan listrik, bahan bakar minyak dan air, serta melakukan pengelolaan secara optimal terkait emisi, limbah, air limbah dan sebagainya. Seiring dengan itu, Perseroan juga mengoptimalkan budaya keberlanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sesuai dengan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan tujuan tidak terjadi kecelakaan kerja dan serta terdapat penyakit akibat kerja

principles for developing priority sectors; and principles of coordination and collaboration.

Based on these eight principles, SPTP has established a sustainability culture that is communicated to all management and employees, ensuring that it reaches everyone within the company. This sustainability culture aligns with the company's values as a State-Owned Enterprise (SOE), namely AKHLAK (Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative). The promotion of this sustainability culture is carried out through various media and opportunities, such as the company website, social media, meetings between management and employees, and interactions with partners, communities, or other external stakeholders, both scheduled and incidental.

Moreover, SPTP promotes its sustainability culture through activities that align with sustainable practices, such as TJSL/CSR programs and environmentally friendly office operations. Environmentally friendly operations are implemented through various programs, including the efficient use of electricity, fuel, and water, as well as optimal management of emissions, waste, and wastewater. Concurrently, the company also emphasizes a sustainability culture to create a safe and healthy work environment in accordance with Occupational Health and Safety (OHS) principles, aiming to prevent work accidents and occupational diseases.



KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN

Sustainable Economic Performance

Sekilas Perekonomian Nasional

Keberhasilan pemerintah menangani pandemi COVID-19 tahun 2022 merupakan basis yang sangat kuat untuk terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia tahun 2023. Terlebih lagi, pada 30 Desember 2022, pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi COVID-19. Dengan pencabutan tersebut, maka masyarakat lebih leluasa menjalankan aktivitas, termasuk menjalankan profesi atau pekerjaan yang sebelumnya sempat berheni atau tidak optimal saat pandemi.

Perpaduan antara keberhasilan penanganan pandemi dan keleluasaan masyarakat beraktivitas bermuara dengan bertumbuhnya perekonomian Indonesia, melanjutkan pencapaian tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,05% *year-on-year* (yoy), sedikit melambat dibandingkan raihan tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Walau demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas prediksi sejumlah lembaga ekonomi global. Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Asian Development Bank (ADB), ketiganya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5%.

Perlambatan perekonomian Indonesia sejalan dengan *trend* perekonomian global karena masih diwarnai ketidakpastian. Kondisi tersebut

Overview of the National Economy

The government's success in handling the COVID-19 pandemic in 2022 provided a strong foundation for social and economic stability in Indonesia for 2023. Furthermore, on December 30, 2022, the government officially lifted the Community Activity Restrictions (PPKM) policy related to the COVID-19 pandemic. With this lifting, the public could resume activities more freely, including professions or jobs that had been halted or were not optimal during the pandemic.

The combination of successful pandemic management and the freedom for people to resume activities led to the growth of Indonesia's economy, continuing the achievements of the previous year. The Central Statistics Agency (BPS) recorded Indonesia's economic growth for 2023 at 5.05% year-on-year (yoy), slightly slowing from the 5.31% growth achieved in 2022. Despite this, Indonesia's economic growth remains above the forecasts of several global economic institutions. The World Bank, International Monetary Fund (IMF), and Asian Development Bank (ADB) all estimated Indonesia's economic growth at 5%.

The slowdown in Indonesia's economy aligns with global economic trends due to ongoing uncertainties. This situation is influenced by



dipengaruhi oleh dinamika negara-negara maju yang berdampak secara global. Amerika Serikat misalnya, masih menghadapi inflasi di atas target, tingginya suku bunga, meningkatnya tekanan fiskal, serta tergerusnya *excess saving* yang membayangi pelemahan ekonomi. Sementara itu, China masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca COVID-19, sedangkan Eropa kondisinya ekonominya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh *core inflation* yang masih tinggi.

Ketidakpastian perekonomian global juga dipengaruhi oleh kondisi geopolitik pada tahun 2023 yang menunjukkan kecenderungan risiko yang makin tinggi. Perang Rusia melawan Ukraina belum ada tanda-tanda akan berakhir, kemudian disusul terjadinya konflik di Timur Tengah, yaitu Israel melawan Palestina yang juga masih berkepanjangan. Kondisi tersebut menimbulkan *downside risk* terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global, terlebih lagi ada kemungkinan perang akan melebar, terkhusus antara Israel vs Palestina.

Becermín pada kondisi faktual tersebut, lembaga ekonomi global seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melemah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 direvisi turun oleh IMF menjadi hanya 3%, sedangkan Bank Dunia justru menyebut pertumbuhan ekonomi global hanya 2,1%. Di sisi lain, inflasi juga diprediksi mencapai level 5,8%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.

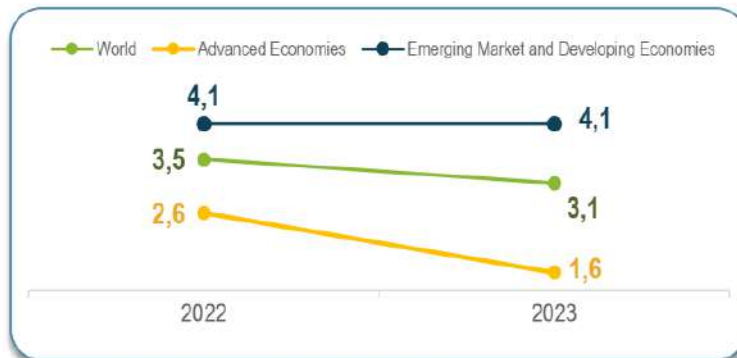
dynamics in advanced countries that impact the global economy. For example, the United States continues to face inflation above targets, high interest rates, increased fiscal pressures, and diminishing excess savings, which threaten economic weakness. Meanwhile, China is still grappling with economic weakness following COVID-19, and Europe is experiencing economic decline with increasing fiscal deficits and persistently high core inflation.

Global economic uncertainty is also affected by geopolitical conditions in 2023, which show a rising risk trend. The Russia-Ukraine war shows no signs of ending, and there are ongoing conflicts in the Middle East, notably between Israel and Palestine. These conditions pose downside risks to global economic growth prospects, especially with the potential for the conflict between Israel and Palestine to widen.

Reflecting on these factual conditions, global economic institutions such as the IMF and World Bank predict that global economic growth will weaken compared to the previous year. The IMF has revised down its global economic growth forecast for 2023 to only 3%, while the World Bank projects it at just 2.1%. On the other hand, inflation is also expected to reach 5.8%, higher than the pre-pandemic period.

Pertumbuhan Ekonomi Global, 2022–2023

Global Economic Growth, 2022–2023



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 5 Februari 2024, mengutip IMF World Economic Outlook (Januari 2024)
 Source: BPS Official Statistics News, February 5, 2024, citing IMF World Economic Outlook (January 2024)

Kinerja Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Tahun 2023 [GRI 3-3]

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,05% ditopang oleh bertumbuhnya 17 lapangan usaha yang dijadikan dasar BPS untuk menyusun pertumbuhan ekonomi nasional. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%; diikuti Jasa Lainnya –termasuk pariwisata di dalamnya– sebesar 10,52%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01%. Menurut BPS, ketiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat; penyelenggaraan event internasional, seperti Piala Dunia U-17, pertemuan KTT ASEAN, MotoGP Mandalika, dan persiapan pemilihan umum.

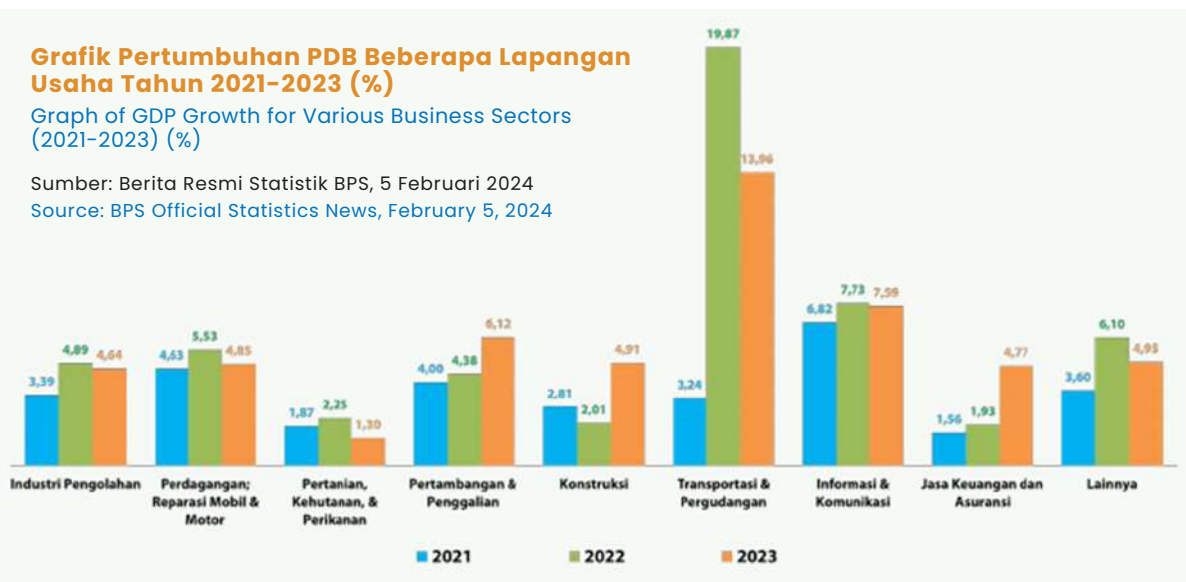
Performance of the Transportation and Warehousing Sector in 2023 [GRI 3-3]

Indonesia's economic growth in 2023, at 5.05%, was supported by the growth of 17 business sectors used by BPS to compile national economic growth. The sector with the highest growth was Transportation and Warehousing at 13.96%, followed by Other Services—including tourism—at 10.52%, and Accommodation and Food Services at 10.01%. According to BPS, these top three sectors were driven by increased public mobility, the hosting of international events such as the U-17 World Cup, the ASEAN Summit, MotoGP Mandalika, and preparations for the general elections.

Grafik Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2021–2023 (%)

Graph of GDP Growth for Various Business Sectors (2021–2023) (%)

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 5 Februari 2024
 Source: BPS Official Statistics News, February 5, 2024



Selain disokong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh solid, bahkan menempati peringkat pertumbuhan tertinggi, juga dipengaruhi adanya kenaikan pengguna jasa angkutan penumpang, peningkatan volume pengiriman barang ekspor-impor, peningkatan kunjungan wisatawan, dan rangkaian persiapan pemilihan umum. Secara spesifik, data BPS menunjukkan selama Januari–Desember 2023, jumlah barang yang diangkut selama Januari–Desember 2023 mencapai 351,0 juta ton atau naik 9,47% dibanding periode yang sama tahun 2022. Peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Panjang sebesar 11,61%; Tanjung Perak sebesar 5,95%; dan Tanjung Priok sebesar 5,31%. Sebaliknya, penurunan jumlah barang terjadi di Pelabuhan Makassar sebesar 6,53% dan Balikpapan sebesar 3,29%.

Rencana Kerja dan Inisiatif Strategis SPTP Tahun 2023 [GRI 3-3][OJK A.1]

Peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi laut yang ditandai dengan peningkatan jumlah barang yang diangkut sebagaimana disampaikan BPS berdampak positif terhadap SPTP dengan kegiatan usaha di antaranya penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas. Dampak tersebut antara lain tercermin dengan adanya peningkatan kinerja ekonomi Perseroan seperti disampaikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Selain faktor eksternal, kinerja positif yang diraih Perseroan pada tahun 2023 merupakan cerminan atas ketepatan rencana kerja dan inisiatif strategis yang ditetapkan SPTP sebagaimana disampaikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023. Rencana kerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2021–2025 dengan strategi perusahaan yang dituangkan dalam Rumah Strategi sebagai berikut:

In addition to being supported by increased public mobility, the Transportation and Warehousing sector experienced solid growth and achieved the highest growth ranking due to an increase in passenger transport services, higher export-import cargo volumes, a rise in tourist visits, and preparations for the general elections. Specifically, BPS data shows that from January to December 2023, the total cargo volume reached 351.0 million tons, an increase of 9.47% compared to the same period in 2022. The increase in cargo volume occurred at Port of Panjang (11.61%), Tanjung Perak (5.95%), and Tanjung Priok (5.31%). Conversely, cargo volumes decreased at Port of Makassar (6.53%) and Balikpapan (3.29%).

SPTP's Work Plan and Strategic Initiatives for 2023 [GRI 3-3][OJK A.1]

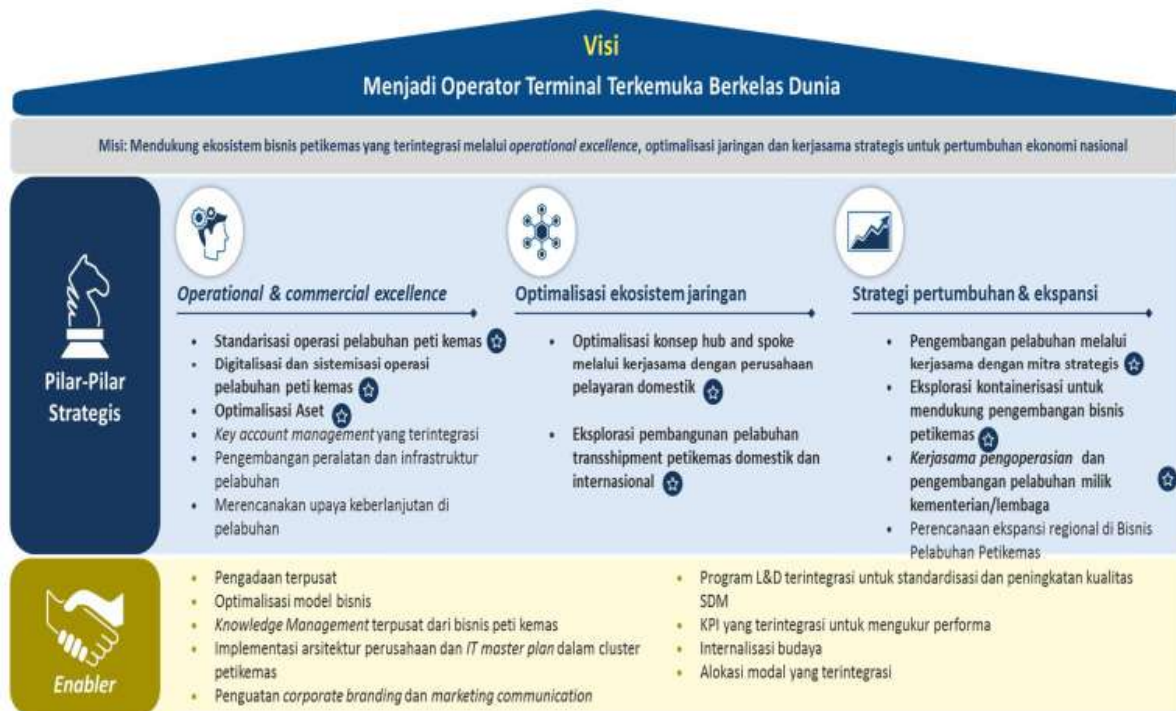
The improved performance of the maritime transportation sector, marked by increased cargo volume as reported by BPS, positively impacted SPTP with business activities including the provision and/or provision of dock services for the implementation of loading and unloading activities for goods and containers. This impact is reflected in the company's economic performance, as outlined in the audited financial reports by Public Accounting Firms.

In addition to external factors, the positive performance achieved by the company in 2023 reflects the effectiveness of the work plan and strategic initiatives established by SPTP, as detailed in the 2023 Work Plan and Budget (RKAP). This work plan is based on the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2021–2025, with the company strategy outlined in the Strategic Framework as follows:



Rumah Strategi Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas

Strategic Framework of PT Pelindo Terminal Petikemas Subholding



Strategi SPTP diturunkan dari visi dan misi, serta tujuan berdirinya Perseroan. Selanjutnya, untuk mencapai visi misi telah diformulasikan tema strategis yang menjadi pilar utama rumah strategi Perseroan yaitu:

1. *Operational and Commercial Excellence*
2. *Network Ecosystem Optimization*
3. *Growth and Expansion Strategy*

Untuk mendukung ketercapaian pilar strategis utama telah dirancang pula *key enablers* yang harus dipenuhi. *Key enablers* merupakan sekumpulan tindakan dan aktivitas utama yang akan mendorong kelancaran implementasi strategi SPTP dan memperkuat fondasi Perseroan dalam mencapai visi "Menjadi Operator Terminal Terkemuka Berkelas Dunia".

Dalam menyusun RKAP, Perseroan menyelaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020–2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Rencana strategis Kementerian BUMN. Proses penyelarasan antara RKAP Perusahaan dengan RJPP Kementerian BUMN dilakukan dengan menyerasikan komponen pilar strategis dengan agenda prioritas Kementerian BUMN sebagaimana berikut:

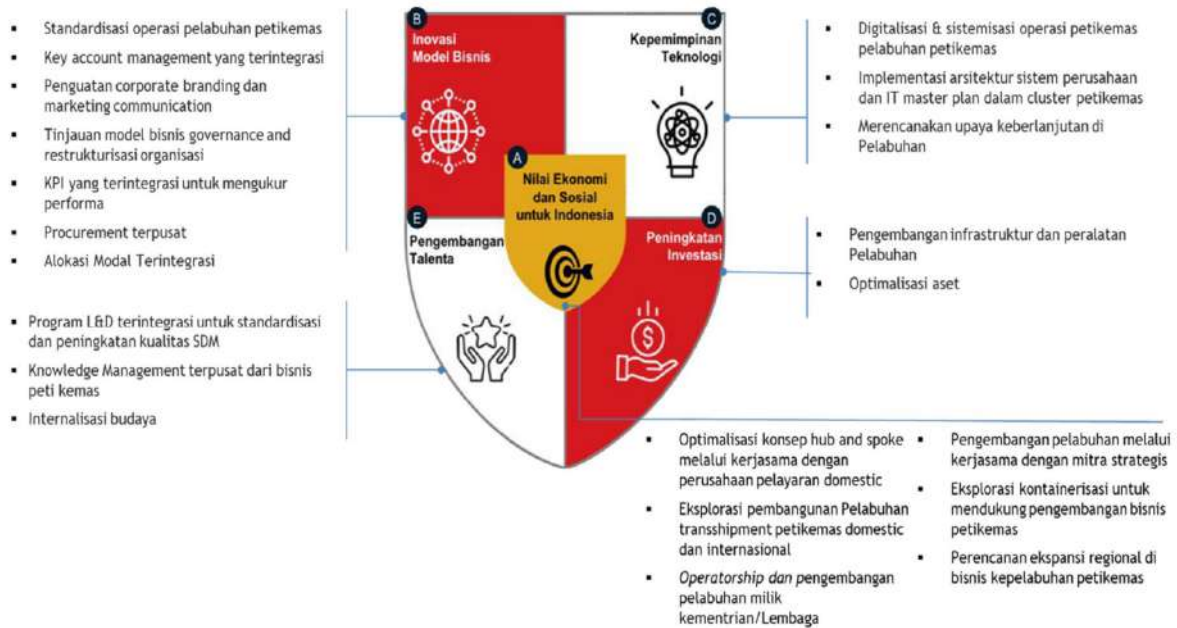
SPTP's strategy is derived from the vision and mission, as well as the purpose of the company's establishment. To achieve the vision and mission, strategic themes have been formulated that serve as the main pillars of the company's strategic framework, which are:

1. Operational and Commercial Excellence
2. Network Ecosystem Optimization
3. Growth and Expansion Strategy

To support the achievement of these main strategic pillars, key enablers have been designed that must be fulfilled. These key enablers consist of a set of essential actions and activities that will facilitate the smooth implementation of SPTP's strategy and strengthen the company's foundation in achieving the vision of "Becoming a World-Class Leading Terminal Operator."

In drafting the Annual Work Plan and Budget (RKAP), the company aligns it with the Strategic Plan of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) for 2020–2024, as outlined in the Regulation of the Minister of SOE Number PER-08/MBU/08/2020 dated August 7, 2020, concerning the Strategic Plan of the Ministry of SOE. The alignment process between the company's RKAP and the Ministry of SOE's Long-Term Corporate Plan (RJPP) is done by harmonizing the strategic pillar components with the Ministry of SOE's priority agendas as follows:

Alignment Agenda Prioritas BUMN Alignment with SOE Priority Agenda



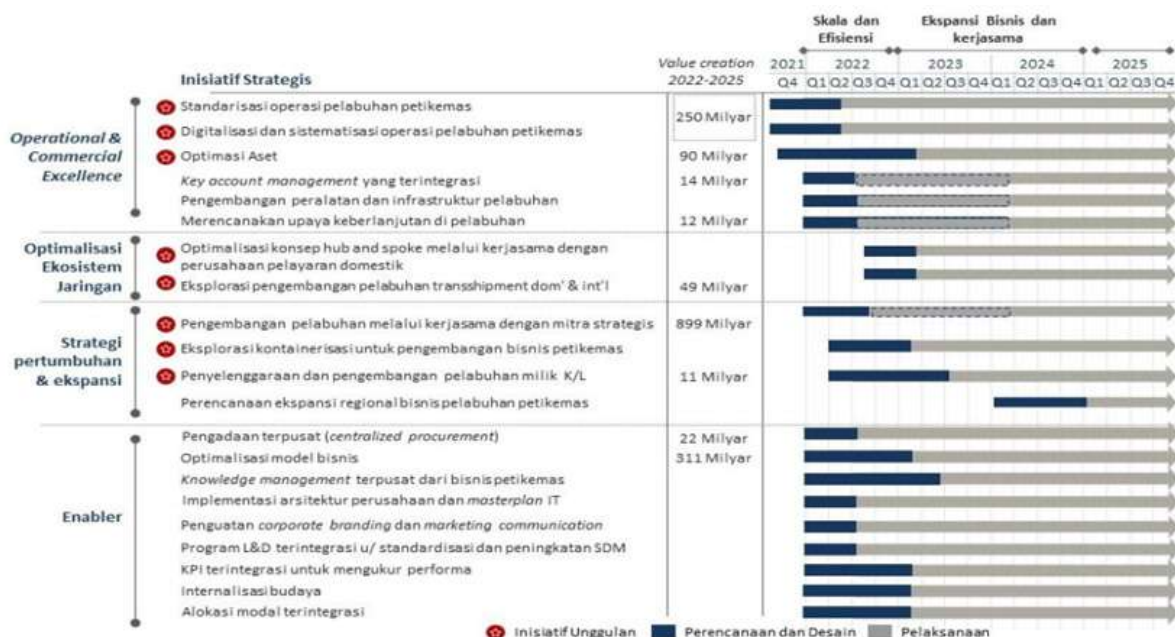
Inisiatif Strategis Rencana Kerja Tahun 2024

Untuk mendukung dan mewujudkan target dalam RKAP 2023, Perusahaan menyusun rencana kerja berupa inisiatif strategis tahun 2023 yang telah sejalan dengan agenda prioritas BUMN, sebagaimana tabel di bawah ini:

Strategic Initiatives for the 2024 Work Plan

To support and achieve the targets set in the 2023 Annual Work Plan and Budget (RKAP), the Company has developed a work plan comprising strategic initiatives for 2023 that align with the SOE priority agenda, as outlined in the table below:

Inisiatif Strategis Rencana Kerja Tahun 2023 Strategic Initiatives for the 2023 Work Plan



Secara ringkas, beberapa sasaran Perusahaan yang selaras dengan Agenda Prioritas BUMN adalah sebagai berikut:

In summary, some of the Company's goals that align with the SOE Priority Agenda are as follows:

Sasaran Perusahaan

Sasaran Perusahaan



Berdasarkan penetapan RKAP Tahun 2023, selanjutnya SPTP menyusun serangkaian inisiatif strategis di antaranya Standardisasi Operasi Pelabuhan Petikemas; Digitalisasi & Sistemisasi Operasi Pelabuhan Petikemas; Pengembangan Peralatan dan Infrastruktur Pelabuhan; Key Account Management yang Terintegrasi; Pengembangan Pelabuhan melalui Kerjasama dengan Mitra Strategis; Optimalisasi Konsep Hub and Spoke melalui Kerjasama dengan Perusahaan Pelayaran Domestik; Alokasi Modal Terintegrasi; Penguatan Corporate Branding & Marketing Communication; Program Learning & Development Terpadu untuk Standarisasi dan Peningkatan Kualitas SDM; Perencanaan Ekspansi Regional di Bisnis Petikemas; Eksplorasi Pengembangan Pelabuhan Transshipment Petikemas Domestik & Internasional; dan Eksplorasi Kontainerisasi untuk Mendukung Pengembangan Bisnis Petikemas. Untuk merealisasikan inisiatif-inisiatif strategis tersebut, Perseroan telah memprogramkan 60 Rencana Kerja Manajemen (RKM) yang dilaksanakan di sepanjang tahun 2023.

Based on the determination of the 2023 RKAP, SPTP subsequently developed a series of strategic initiatives including the Standardization of Container Port Operations; Digitalization & Systematization of Container Port Operations; Development of Port Equipment and Infrastructure; Integrated Key Account Management; Development of Ports through Partnerships with Strategic Partners; Optimization of the Hub and Spoke Concept through Collaboration with Domestic Shipping Companies; Integrated Capital Allocation; Strengthening Corporate Branding & Marketing Communication; Integrated Learning & Development Programs for Standardizing and Improving Human Resource Quality; Planning for Regional Expansion in the Container Terminal Business; Exploration of Domestic & International Container Transshipment Port Development; and Exploration of Containerization to Support the Development of the Container Business. To realize these strategic initiatives, the Company has scheduled 60 Management Work Plans (RKM) to be implemented throughout 2023.

Kinerja Ekonomi SPTP 2023

Selama tahun pelaporan segenap karyawan dan manajemen SPTP secara kolektif melakukan sosialisasi berbagai inisiatif strategis dan rencana kerja sebagaimana disampaikan dalam Revisi RKAP 2023. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan, termasuk saat manajemen melakukan rapat yang terjadwal maupun pertemuan-pertemuan lain yang bersifat insidental. Sosialisasi kebijakan dan inisiatif strategis yang dilakukan Perusahaan sekaligus merupakan bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan di lingkungan SPTP. Sementara itu, sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti pelanggan, kreditur, media, regulator, masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dilakukan melalui berbagai sarana seperti publikasi melalui media massa, *website*, dan sebagainya.

Selaras dengan sosialisasi yang dilakukan secara kontinu, SPTP secara konsisten melaksanakan inisiatif strategis dan rencana kerja tahun 2023. Pelaksanaannya terus dipantau dan dievaluasi sehingga Perusahaan bisa menentukan solusi terbaik apabila ditemukan deviasi atau hambatan di lapangan. Komitmen dan kesungguhan tersebut membawa hasil dengan pencapaian kinerja positif Perusahaan pada tahun 2023, termasuk berhasil mewujudkan beberapa target kinerja dalam RKAP tahun 2023 sebagai berikut:

[OJK F.2]

SPTP Economic Performance in 2023

During the reporting year, all employees and management of SPTP collectively conducted the dissemination of various strategic initiatives and work plans as outlined in the Revised 2023 RKAP. Dissemination to internal stakeholders was carried out using various media and opportunities, including scheduled management meetings and other incidental meetings. The dissemination of policies and strategic initiatives by the company also served as part of the effort to build a sustainability culture within SPTP. Dissemination to external stakeholders, such as customers, creditors, media, regulators, the community, and other stakeholders, was conducted through various means such as publications in mass media, the website, and more.

In line with continuous dissemination, SPTP consistently implemented strategic initiatives and the 2023 work plan. The implementation was continuously monitored and evaluated, allowing the company to determine the best solutions if any deviations or obstacles were encountered in the field. This commitment and determination led to positive performance results in 2023, including the achievement of several performance targets outlined in the 2023 RKAP [OJK F.2]

Tabel Realisasi Kinerja Ekonomi Tahun 2021-2023 (Jutaan Rupiah)
Economic Performance Realization Table for 2021-2023 (in Millions of Rupiah)

Uraian Description	Satuan Units	2023			2022		
		Target	Realisasi Realization	%	Target	Realisasi Realization	%
Trafik/Traffic							
Arus Barang Goods Flow	Ton	4.671.934	2.727.097	58	3.382.665	2.497.556	73
	M3	-	294.535	-	-	44.087	-
	MMBTU	-	-	-	-	-	-
Arus Petikemas Container Flow	Unit	4.050	5.415	134	-	5.682	-
	Boks	9.460.652	9.250.846	97,78	8.568.588	8.212.579	95
	Teu's	11.709.201	11.530.293	98,47	10.656.169	10.249.213	96
Posisi Keuangan/ Financial Position							
Aset Assets	Rp Juta Rp million	18.985.884	18.658.563	98,28	14.017.189	14.986.840	107
Liabilitas Liabilities	Rp Juta Rp million	6.048.546	4.988.202	82,47	6.167.678	6.810.326	73,27
Ekuitas Equity	Rp Juta Rp million	12.284.821	13.670.361	111,28	2.875.885	5.971.611	208

Tabel Realisasi Kinerja Ekonomi Tahun 2021–2023 (Jutaan Rupiah)
 Economic Performance Realization Table for 2021–2023 (in Millions of Rupiah)

Uraian Description	Satuan Units	2023			2022		
		Target	Realisasi Realization	%	Target	Realisasi Realization	%
Perhitungan Laba (Rugi)/ Profit and Loss Calculation							
Pendapatan Usaha Operating Income	Rp Juta Rp million	13.213.594	12.736.418	96,39	11.717.475	11.274.072*	
Beban Usaha Operating Expenses	Rp Juta Rp million	(10.481.675)	(10.313.504)	98,40	(9.085.673)	(8.969.783)*	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	Rp Juta Rp million	2.080.719	2.205.055	105,98	1.770.817	1.572.235	

*disajikan kembali/ [Restated](#)

Informasi selengkapnya tentang kinerja ekonomi disampaikan dalam Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023.

For more detailed information on economic performance, please refer to the Management Analysis and Discussion chapter of the Company's 2023 Annual Report.

Perbandingan Target dan Realisasi Program Pembiayaan/Investasi Kegiatan Berkelanjutan [OJK F.3]

SPTP tidak termasuk emiten dan perusahaan publik sehingga tidak wajib menerapkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Peraturan tersebut antara lain mengatur tentang perlunya emiten dan perusahaan publik menyelenggarakan program pembiayaan atau investasi pada instrumen atau proyek yang sejalan dengan keuangan kegiatan berkelanjutan. Adapun kriteria program pembiayaan atau investasi yang sejalan dengan keuangan/kegiatan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
2. Mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial; atau
3. Memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.

Walau tidak termasuk emiten atau perusahaan publik, SPTP telah melakukan berbagai program

Comparison of Targets and Realization of Sustainable Activity Financing/ Investment Programs [OJK F.3]

SPTP is not a listed company or public corporation, so it is not required to implement POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies or the Sustainable Finance POJK. This regulation includes the need for issuers and public companies to organize financing or investment programs in instruments or projects aligned with sustainable finance activities. The criteria for financing or investment programs aligned with sustainable finance activities are as follows:

1. Prioritize efforts to sustainably use natural resources efficiently and effectively;
2. Prevent/limit/reduce/remedy environmental damage, pollution, waste, ecosystem destruction, and social inequality/gaps; or
3. Provide solutions for communities facing the impacts of climate change.

Although not an issuer or public company, SPTP has implemented various programs that meet

yang memenuhi rujukan tersebut antara lain elektrifikasi peralatan yang semula menggunakan bahan bakar minyak (BBM), yang dikemas melalui program Implementasi Green Technology. Per 31 Desember 2023, realisasi KPI Implementasi Green Technology tercatat sebesar 100%. Realisasi tersebut terdiri dari rata-rata Implementasi Green Technology di Pelabuhan sebagai berikut:

- Elektrifikasi 4 Unit RTG TPK Banjarmasin capaiannya adalah 100%. Telah dilakukan monitoring proses pekerjaan elektrifikasi di mana saat ini telah dilaksanakan pekerjaan elektrifikasi dengan progress fisik sebesar 3,048% per tanggal 24 Desember 2023 sesuai dengan BA Kemajuan Pekerjaan Elektrifikasi RTG di TPK Banjarmasin Nomor: PD.05.01/24/12/1/PIPL/TKNK/REG3-23 tanggal 27 Desember 2023. Proses elektrifikasi akan dilanjutkan pada tahun 2024.
- Elektrifikasi 2 Unit RMGC TPK Pontianak capaiannya adalah 100%. Telah dilakukan monitoring proses pekerjaan elektrifikasi 2 Unit RMGC Pontianak Tahap 2 di mana saat ini telah dilaksanakan proses pengadaan sesuai Nota Dinas Regional Head 2 kepada Direktur SDM dan Umum HO Nomor: PD.05.01/26/12/1/PFSB/RH2.2-23 tanggal 26 Desember 2023. Proses elektrifikasi akan dilanjutkan pada tahun 2024.
- Elektrifikasi 3 Unit RMGC TPK Jambi capaiannya adalah 100%. Telah dilakukan monitoring proses pekerjaan elektrifikasi 3 Unit RMGC Jambi di mana saat ini telah dilaksanakan proses pengadaan sesuai Nota Dinas Regional Head 2 kepada Direktur SDM dan Umum HO Nomor : PD.05.01/26/12/1/PFSB/RH2.2-23 tanggal 26 Desember 2023. Proses elektrifikasi akan dilanjutkan pada tahun 2024.

Selain implementasi Green Technology, Perseroan juga telah menyelenggarakan program pembiayaan atau investasi untuk mengurangi kesenjangan sosial, sekaligus pemberdayaan masyarakat, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Distribusi Nilai Ekonomi

Berdasarkan kinerja ekonomi di atas, maka distribusi nilai ekonomi SPTP, yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, nilai ekonomi yang didistribusikan, dan nilai ekonomi yang ditahan, dapat dihitung. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis Perseroan. Sedangkan nilai ekonomi

these references, including the electrification of equipment previously using fossil fuels, packaged through the Green Technology Implementation program. As of December 31, 2023, the realization of the Green Technology Implementation KPI was recorded at 100%. This realization consists of the average Green Technology Implementation at the ports as follows:

- Electrification of 4 RTG Units at TPK Banjarmasin reached 100%. Monitoring of the electrification work process has been conducted, where the electrification work has been carried out with a physical progress of 3.048% as of December 24, 2023, according to the BA Progress of RTG Electrification Work at TPK Banjarmasin Number: PD.05.01/24/12/1/PIPL/TKNK/REG3-23 dated December 27, 2023. The electrification process will continue in 2024.
- Electrification of 2 RMGC Units at TPK Pontianak reached 100%. Monitoring of the electrification work process for 2 RMGC Units in Pontianak Phase 2 has been conducted, where the procurement process has been carried out according to the Regional Head 2 Memorandum to the HR and General Director HO Number: PD.05.01/26/12/1/PFSB/RH2.2-23 dated December 26, 2023. The electrification process will continue in 2024.
- Electrification of 3 RMGC Units at TPK Jambi reached 100%. Monitoring of the electrification work process for 3 RMGC Units in Jambi has been conducted, where the procurement process has been carried out according to the Regional Head 2 Memorandum to the HR and General Director HO Number: PD.05.01/26/12/1/PFSB/RH2.2-23 dated December 26, 2023. The electrification process will continue in 2024.

In addition to the Green Technology Implementation, the Company has also organized financing or investment programs to reduce social inequality, as well as community empowerment, through the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program.

Economic Value Distribution

Based on the economic performance above, the economic value distribution of SPTP, which includes the direct economic value generated, the distributed economic value, and the retained economic value, can be calculated. The direct economic value generated refers to the revenue obtained from the Company's business activities. The distributed economic value represents

yang didistribusikan merupakan sejumlah pengeluaran yang didistribusikan sebagai bentuk kontribusi Perseroan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para pemangku kepentingan, seperti pembayaran gaji, pajak, dividen, pembayaran untuk pemasok, maupun realisasi dana untuk masyarakat sebagai salah satu bentuk perwujudan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang diimplementasikan melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Adapun nilai ekonomi yang ditahan adalah selisih antara nilai ekonomi yang dihasilkan dikurangi dengan nilai ekonomi yang didistribusikan, yang digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan [GRI 201-1]

the amount of expenditure distributed as the Company's contribution to enhancing economic growth and the welfare of stakeholders, such as salary payments, taxes, dividends, payments to suppliers, and the realization of funds for the community as a form of Corporate Social Responsibility (CSR), which is implemented through various CSR programs. The retained economic value is the difference between the generated economic value and the distributed economic value, which is used for the Company's business development. [GRI 201-1]

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan (Jutaan Rupiah)

Direct and Distributed Economic Value (in Million Rupiah)

Deskripsi Description		2023	2022	2021
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan/ Generated Economic Value				
Pendapatan operasi	Operating revenue	12.736.418	11.274.072	7.408.000
Pendapatan konstruksi	Construction revenue	24.463	13.734	233.559
Pendapatan keuangan	Financial revenue	172.562	116.930	84.292
Bagian laba entitas asosiasi, neto	Share of profit from associate entities, net	326.624	244.266	136.675
Jumlah Nilai Ekonomi yang Dihasilkan	Total Generated Economic Value	13.260.067	11.649.002	7.862.526
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan/ Distributed Economic Value				
Beban operasi	Operating expenses	(10.313.504)	(8.969.783)	(5.868.370)
Beban konstruksi	Construction expenses	(24.464)	(13.734)	(233.559)
Pendapatan (Beban) operasi lainnya, neto	Other operating income (expenses), net	(13.826)	(171.970)	253.575
Beban keuangan	Financial expenses	(245.135)	(435.162)	(465.431)
Manfaat (Beban) pajak penghasilan badan:	Corporate income tax (expenses) benefits:			
Kini	Current	(544.040)	(537.126)	(402.539)
Tangguhan	Deferred	85.956	51.008	17.776
Pembayaran dividen	Dividend payments	(37.164)	(5.821)	(563)
Investasi sosial untuk masyarakat (CSR/TJSL)	Social investments for the community (CSR/ TJSL)	(20.250)	(9.058)	(9.587)
Jumlah Nilai Ekonomi yang Didistribusikan	Total Distributed Economic Value	(11.112.427)	(10.091.646)	(6.708.698)
Nilai Ekonomi yang Ditahan	Retained Economic Value	2.147.640	1.557.356	1.153.828

Berdasarkan tabel di atas, nilai ekonomi yang dihasilkan SPTP pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp13,26 triliun, naik dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp11,65 triliun. Kenaikan dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan operasi, pendapatan konstruksi, pendapatan keuangan, dan bagian laba entitas asosiasi neto. Sementara itu, nilai ekonomi yang didistribusikan terbilang sebesar Rp11,11 triliun, naik dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp10,09 triliun. Kenaikan antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya beban operasi dan beban konstruksi. Dengan kinerja tersebut, nilai ekonomi yang ditahan pada tahun 2023 terbilang sebesar Rp2,15 triliun, naik dibandingkan tahun 2022, yang mencapai Rp1,56 triliun.

Pengungkapan Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

SPTP berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan melalui ketaatan dalam pembayaran pajak. Selama tahun 2023, Perusahaan telah mematuhi semua peraturan dan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga tidak menerima denda/sanksi terkait dengan perpajakan.

Berkaitan dengan laporan pajak, SPTP hanya beroperasi di Indonesia dan tidak memiliki cabang atau kantor operasional di luar negeri. Dengan demikian, laporan perpajakan hanya dilakukan untuk Indonesia. Adapun pajak yang dibayarkan Perseroan tahun 2023 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Based on the table above, the economic value generated by SPTP in 2023 was recorded at IDR 13.26 trillion, an increase from IDR 11.65 trillion in 2022. This increase was influenced by higher operating revenue, construction revenue, financial revenue, and the share of profit from associate entities, net. Meanwhile, the distributed economic value amounted to IDR 11.11 trillion, up from IDR 10.09 trillion in 2022. The rise was partly due to increased operating expenses and construction expenses. With this performance, the retained economic value in 2023 was IDR 2.15 trillion, an increase from IDR 1.56 trillion in 2022.

Disclosure of Governance, Management, and Control Framework for Taxation Aspects

SPTP is committed to contributing to development through compliance with tax payments. Throughout 2023, the Company adhered to all regulations and fulfilled its tax obligations in accordance with applicable laws and regulations, resulting in no fines or sanctions related to taxation.

Regarding tax reporting, SPTP only operates in Indonesia and does not have any branches or operational offices abroad. Therefore, tax reporting is conducted solely for Indonesia. The taxes paid by the Company in 2023 are detailed as follows:

Tabel Kontribusi Pajak SPTP Tahun 2023 (Rp Juta)

SPTP Tax Contribution Table for 2023 (IDR Million)

Uraian Description			2023
1	PPh Pasal 21	Income Tax Article 21	205.910
2	PPh Pasal 22	Income Tax Article 22	2.005
3	PPh Pasal 23	Income Tax Article 23	118.116
4	PPh Pasal 4(2)	Income Tax Article 4(2)	20.400
5	PPh Pasal 15	Income Tax Article 15	-
6	PPh Pasal 26	Income Tax Article 26	-
7	PPh Pasal 25 / 29	Income Tax Article 25/29	540.286
8	PBB	Land and Building Tax	49.844
9	PPN WAPU	VAT Collector	79.073
10	PPN	VAT	275.915
Total			1.291.548

Implikasi Finansial Serta Risiko dan Peluang Lain Akibat dari Perubahan Iklim

Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan isu global yang menuntut kepedulian bersama warga dunia. Tanpa komitmen untuk bergerak dan menangani secara bersama-sama, maka dampak negatif pemanasan global dan perubahan iklim akan semakin besar bagi bumi dan makhluk hidup di atasnya. Beberapa fenomena yang terjadi akibat perubahan iklim dan perlu diantisipasi antara lain peningkatan atau penurunan curah hujan, peningkatan kejadian cuaca ekstrem, peningkatan volume dan suhu lautan, peningkatan tinggi muka laut dan sebagainya. Bagi SPTP, fenomena tersebut turut berpengaruh terhadap operasional bisnis sehari-hari. Namun demikian, pada tahun pelaporan, Perseroan belum menghitung implikasi finansial akibat perubahan iklim. [GRI 3-3, 201-2]

Program Imbalan Pascakerja

SPTP menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetap yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut. [GRI 3-3]

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir

Financial Implications, Risks, and Other Opportunities Due to Climate Change

Climate change and global warming are global issues that demand the collective attention of the world's citizens. Without a commitment to act together, the negative impacts of global warming and climate change will only worsen for the Earth and its inhabitants. Some of the phenomena resulting from climate change that need to be anticipated include increased or decreased rainfall, increased extreme weather events, rising ocean volumes and temperatures, rising sea levels, and more. For SPTP, these phenomena also affect daily business operations. However, during the reporting year, the Company has not yet calculated the financial implications of climate change. [GRI 3-3, 201-2]

Post – Employment Benefits Program

SPTP operates a defined contribution pension plan (Pension Program) for all permanent employees who meet the criteria, as well as an unfunded employee benefit liability determined based on the prevailing Collective Labor Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefits employees will receive at normal retirement age from the Pension Program with the benefits provided under the CLA, after deducting the accumulated employer contributions and their returns. If the employer's portion of the Pension Program benefits is less than the benefits required by the CLA, the Company will reserve the shortfall. [GRI 3-3]

The Company also provides other employee benefits, such as health benefits and reward money. These benefits are generally provided when employees work until retirement age and meet certain length-of-service criteria. The estimated cost of these benefits is accrued over the employees' working lives using the same accounting methodology as that used for calculating defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the end

periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Per 31 Desember 2023, Beban Imbalan Pascakerja SPTP tercatat sebesar Rp136,23 miliar, naik dibanding tahun 2022, yang mencapai Rp76,90 miliar. [GRI 201-3]

Bantuan Finansial yang Diterima dari Pemerintah

Pada tahun 2023, SPTP tidak menerima bantuan finansial dari pemerintah baik dalam bentuk pembebasan pajak dan kredit pajak, subsidi, hibah investasi, maupun bentuk lainnya. [GRI 201-4]

of the reporting period, minus the fair value of plan assets and adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the *projected-unit-credit* method.

The expense for employee benefits based on the CLA/laws/post-employment health benefits is determined using the *projected-unit-credit* method. Expenses for employee benefits based on the CLA/laws/post-employment health benefits are determined using the *projected-unit-credit* method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net accumulated unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting year exceed 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

Gains or losses exceeding the 10% threshold are recognized over the estimated average remaining service lives of the employees participating in the program. Additionally, past service costs that occur when the Company introduces a defined benefit program or changes benefits owed under the current program must be amortized over the period until those benefits become vested.

Other long-term employee benefits, including long leave, are determined based on Company regulations. The estimated cost of these benefits is calculated and recognized over the employees' working lives using the same method as that used for calculating post-employment benefit obligations. This obligation is calculated at least once a year by an independent actuary. Other long-term benefits that have vested are immediately recognized as an expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023, SPTP's Post-Employment Benefits Expense was recorded at IDR 136.23 billion, up from IDR 76.90 billion in 2022. [GRI 201-3]

Financial Assistance Received from the Government

In 2023, SPTP did not receive any financial assistance from the government, whether in the form of tax exemptions and credits, subsidies, investment grants, or other forms. [GRI 201-4]





KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

Sustainability Environmental Performance

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Selain terjadi karena faktor alam, kerusakan lingkungan yang ditandai dengan turunnya kualitas lingkungan juga dipicu oleh berbagai aktivitas/kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan, penebangan hutan/pepohonan ilegal, pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan, membuang limbah/sampah sembarangan, dan sebagainya. Akibat kerusakan lingkungan, sejumlah dampak negatif terjadi, seperti pencemaran tanah, udara maupun air, serta memicu berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya.

Untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan, Indonesia sudah memiliki berbagai perangkat dan regulasi terkait lingkungan. Regulasi itu, antara lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta aturan-aturan turunannya. Terdapat setidaknya sepuluh tujuan yang hendak dicapai undang-undang ini di antaranya menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Upaya memperbaiki lingkungan serta meningkatkan daya dukung lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah

Environmental degradation is one of the major issues facing Indonesia today. It occurs not only due to natural factors but also due to various human activities that are not environmentally friendly, such as improper land use, illegal logging/deforestation, exploitation of natural resources without considering environmental impact analysis, and improper waste disposal. As a result of environmental degradation, numerous negative impacts arise, such as soil, air, and water pollution, as well as triggering natural disasters like floods, landslides, and more.

To prevent or reduce the negative impacts of environmental degradation, Indonesia has established various environmental regulations and frameworks. One such regulation is the Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, along with its derivative regulations. This law aims to achieve at least ten objectives, including ensuring the continuity of life for living beings and the sustainability of ecosystems, maintaining the preservation of environmental functions, and anticipating global environmental issues.

The effort to restore the environment and enhance its carrying capacity is a shared responsibility. It is not only the responsibility of the government and the public but also of business entities and



dan masyarakat, upaya tersebut juga menjadi tanggung jawab para pelaku usaha atau korporasi. Dalam hal ini, sinergi merupakan kata kunci untuk meraih hasil yang optimal. Terlebih lagi, apabila bencana terjadi akibat kerusakan lingkungan, dampaknya bisa menimpa siapa saja, termasuk berdampak bagi keberlanjutan dunia usaha.

PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) berkomitmen untuk berkontribusi secara maksimal demi terwujudnya lingkungan yang lebih baik serta meningkatnya daya dukung lingkungan. Perseroan memegang teguh komitmen tersebut karena meyakini bahwa lingkungan yang baik merupakan hak bagi setiap orang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H Ayat 1, UUD 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Landasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan [GRI 3-3]

Kepedulian SPTP terhadap terwujudnya lingkungan yang lebih baik berpedoman pada sejumlah regulasi lingkungan di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

corporations. In this context, synergy is the key to achieving optimal results. Moreover, when disasters occur due to environmental damage, the impact can affect anyone, including the sustainability of businesses.

PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) is committed to contributing maximally to creating a better environment and improving environmental resilience. The Company holds firmly to this commitment, believing that a good environment is a right for everyone, as emphasized in Article 28H, Paragraph 1, of the 1945 Constitution, which states, "Every person has the right to live in physical and spiritual prosperity, to reside, and to obtain a good and healthy living environment, and has the right to receive healthcare services."

Environmental Management Policy Framework [GRI 3-3]

SPTP's commitment to achieving a better environment is guided by several environmental regulations, including:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2007 on Energy
2. Law No. 18 of 2008 on Waste Management
3. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi
6. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan RKL-RPL
13. Peraturan Menteri Perhubungan No 60 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.
4. Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law
5. Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management
6. Government Regulation No. 74 of 2001 on Hazardous and Toxic Material Management
7. Government Regulation No. 33 of 2023 on Energy Conservation
8. Presidential Instruction No. 13 of 2011 on Energy Conservation
9. Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 12 of 2010 on the Implementation of Air Pollution Control in Regions
10. Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 6 of 2021 on Procedures and Requirements for the Management of Hazardous and Toxic Waste
11. Decree of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 111 of 2003 on Guidelines for Licensing Requirements and Procedures, and Guidelines for Assessing Wastewater Disposal into Water or Water Sources
12. Decree of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 45 of 2005 on Guidelines for the Preparation of RKL-RPL Implementation
13. Regulation of the Minister of Transportation No. 60 of 2014 on the Implementation and Operation of Loading and Unloading Goods from and to Vessels

Berdasarkan berbagai regulasi di atas, selanjutnya SPTP merumuskan berbagai peraturan internal guna mengimplementasikan kinerja keberlanjutan di bidang lingkungan, terkhusus yang berkaitan dengan operasional usaha dan perkantoran yang ramah lingkungan. Seiring dengan itu, Perseroan juga berupaya secara maksimal untuk meningkatkan daya dukung lingkungan di lingkup SPTP, memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), memenuhi baku mutu lingkungan, mengedepankan operasional perusahaan yang ramah lingkungan, dan sebagainya.

Based on the above regulations, SPTP has developed various internal policies to implement sustainability performance in the environmental field, particularly those related to environmentally friendly business operations and office activities. Along with these efforts, the Company also strives to enhance the environmental resilience within SPTP by conducting environmental impact analyses (AMDAL), implementing environmental management and monitoring efforts (UKL-UPL), meeting environmental quality standards, prioritizing eco-friendly company operations, and more.



Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan [GRI 3-3]

Komitmen SPTP terhadap kelestarian lingkungan direalisasikan melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya, Perusahaan mengadopsi standard global Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 sesuai dengan SNI 19-14001-2005 dengan Surat Keputusan penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 54/KEP/BSN/05/2002 dan ISO 14001:2015 yang mengacu pada Surat Keputusan penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 282/KEP/BSN/12/2015. Saat ini ISO 14001:2015 telah diterapkan pada tujuh cabang terminal dan satu untuk Kantor Pusat SPTP.

Implementation of Environmental Management System [GRI 3-3]

SPTP's commitment to environmental sustainability is realized through various programs and policies. One key initiative is the adoption of the global Environmental Management System standard ISO 14001:2015, in accordance with SNI 19-14001-2005, as established by the National Standardization Agency's Decree No. 54/KEP/BSN/05/2002, and ISO 14001:2015, as referenced in the National Standardization Agency's Decree No. 282/KEP/BSN/12/2015. Currently, ISO 14001:2015 has been implemented in seven terminal branches and the SPTP Head Office.

Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Tahun 2023 ISO 14001:2015 Environmental Management System Certificates for 2023

No.	Cabang Branch	Versi Version	No. Sertifikat Certificate Number	Badan Sertifikasi Certification Body	Masa Berlaku Validity Period
1	Kantor Pusat Head Office	2015	08 04 A 23000036	TUV Nord Indonesia	17 Januari 2023 s.d 16 Januari 2026
2	TPK. Ambon				
3	TPK. Banjarmasin				
4	TPK. Belawan				
5	TPK. Bitung				
6	TPK. Nilam				
7	TPK. Semarang				
8	TPK. New Makassar				



Peningkatan Kapasitas Personel di Bidang Lingkungan

Pengelolaan lingkungan yang optimal memerlukan personel-personel yang memiliki kapasitas mumpuni di bidang lingkungan. Untuk itu, SPTP secara berkala menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi para personel yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan. Selain menambah wawasan dan pengetahuan, pengembangan kompetensi yang diwujudkan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan juga akan meningkatkan keahlian, termasuk membuka peluang untuk mengadopsi berbagai teknologi terbaru di bidang pengelolaan lingkungan.

Biaya Lingkungan Hidup

Perseroan berkomitmen untuk turut menjaga lingkungan dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk biaya lingkungan. Dana dialokasikan untuk berbagai kegiatan/program lingkungan antara lain pemeliharaan lingkungan, dokumentasi lingkungan, pemantauan lingkungan, pengelolaan lingkungan dan pemeliharaan instalasi/alat pengelolaan lingkungan. [OJK F.4]

Pengelolaan Material/Bahan Baku

SPTP sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas tidak menggunakan material atau bahan spesifik yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Namun demikian, Perseroan menggunakan bahan atau material pendukung berupa kertas yang digunakan untuk kelancaran administrasi perkantoran. Oleh karena bahan baku kertas adalah bubur kertas dari pohon tertentu, maka Perseroan melakukan efisiensi penggunaan kertas sehingga turut membantu mengurangi penebangan pohon dalam proses pembuatan kertas. Efisiensi dilakukan melalui optimalisasi implementasi teknologi informasi yang sejalan dengan program paperless, serta kebijakan lain seperti mencetak bolak-balik untuk draft atau dokumen tertentu, memanfaatkan kertas bekas yang salah satu halamannya masih kosong untuk mencetak draft dokumen, serta menekankan pentingnya mengecek isi dokumen sebelum dicetak sehingga tidak perlu mencetak ulang karena kesalahan ejaan.

Environmental Personnel Capacity Building

Optimal environmental management requires personnel with competent expertise in environmental matters. To achieve this, SPTP regularly organizes competency enhancement programs for employees responsible for environmental management. These programs not only broaden knowledge and awareness but also improve skills, including the opportunity to adopt the latest technologies in environmental management.

Environmental Expenses

The company is committed to environmental stewardship by allocating funds for various environmental activities and programs, such as environmental maintenance, documentation, monitoring, and management, as well as maintaining environmental management installations and equipment. [OJK F.4]

Material/Raw Material Management

SPTP, as a company engaged in providing or servicing terminals for cargo and container handling activities, does not rely on specific materials or raw materials for its business operations. However, the company uses supporting materials such as paper for smooth office administration. Since paper is made from pulp derived from certain trees, the company implements paper usage efficiency measures to help reduce deforestation in paper production. Efficiency is achieved by optimizing the implementation of information technology aligned with the paperless program, as well as other policies such as double-sided printing for drafts or certain documents, reusing paper with one blank side for draft printing, and emphasizing the importance of checking document content before printing to avoid reprinting due to spelling errors.



Selanjutnya, dari penggunaan kertas, Perseroan menghasilkan limbah kertas berupa kertas bekas, termasuk dokumen-dokumen yang tidak terpakai. Untuk mengelola limbah kertas, SPTP menyerahkan kepada pihak ketiga untuk digunakan kembali maupun didaur ulang. Walaupun kertas termasuk material ramah lingkungan yang bisa didaur ulang menjadi kertas daur ulang, souvenir dan sebagainya, namun saat ini Perseroan tidak menggunakan hasil daur ulang limbah kertas tersebut. [OJK F.5]

Furthermore, from its paper usage, the company generates paper waste, including used documents. To manage paper waste, SPTP entrusts third parties to either reuse or recycle it. Although paper is an environmentally friendly material that can be recycled into products such as recycled paper, souvenirs, and more, the company currently does not utilize recycled paper products. [OJK F.5]

Pengelolaan Energi

Energi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi SPTP dalam menjalankan usaha. Perseroan memanfaatkan dua sumber energi utama yaitu listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang dipasok dari pihak ketiga. Selain untuk sumber penerangan, listrik dimanfaatkan sebagai sumber energi berbagai sarana dan prasarana elektronik perkantoran serta sumber energi program elektrifikasi peralatan bongkar muat. Adapun bahan bakar jenis solar dan bensin digunakan sebagai sumber energi peralatan bongkar muat serta kendaraan operasional.

SPTP menyadari bahwa pasokan dan ketersediaan BBM dan listrik –yang sebagian besar masih menggunakan batu bara sebagai energi pembangkit–sangat terbatas karena masuk

Energy Management

Energy is one of the essential needs for SPTP in carrying out its business operations. The company utilizes two main energy sources: electricity and fuel oil (BBM) supplied by third parties. In addition to being used for lighting, electricity serves as the energy source for various office electronic infrastructure and equipment, as well as for the electrification of loading and unloading equipment. Diesel and gasoline fuels are used as energy sources for loading and unloading equipment and operational vehicles.

SPTP recognizes that the supply and availability of fuel and electricity—which mostly still relies on coal as the energy source—are limited, as they fall under non-renewable energy categories.



dalam kategori energi tidak terbarukan. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan kedua jenis energi, yang sekaligus berdampak positif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai salah satu penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.

Efisiensi energi di SPTP dilakukan melalui Program Penghematan Penggunaan Energi (PPE) di antaranya dengan mengganti lampu penerangan jalan dan penerangan dermaga yang semula lampu konvensional menjadi lampu LED. Langkah efisiensi energi yang lain, Perseroan melanjutkan kebijakan saat pandemi COVID-19 yaitu melakukan rapat secara online dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi untuk jenis rapat tertentu. Dengan demikian, peserta yang tidak berkantor di lokasi rapat tidak harus datang secara fisik dengan moda transportasi tertentu, termasuk menggunakan kendaraan operasional sehingga efisiensi BBM dilaksanakan. Selain itu, terkhusus efisiensi BBM, Perseroan melakukan program elektrifikasi peralatan bongkar muat yang semula menggunakan bahan bakar minyak, serta menyediakan *supply* listrik darat (*shore plug connection*) yang bisa dimanfaatkan pada saat kapal *standby* di tambatan sehingga BBM kapal bisa ditekan atau dikurangi. [OJK F.7, F.12]

Per 31 Desember 2023, beban langganan listrik tercatat sebesar Rp170,18 miliar, naik 20% dibandingkan tahun 2022, yang mencapai Rp141,91 miliar. Sementara itu, beban bahan bakar tahun 2023 tercatat sebesar Rp535,92 miliar, naik 14% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp471,81 miliar. [GRI 302-1] [OJK F.6]

Untuk konsumsi energi di luar organisasi di antaranya pemakaian energi oleh pemasok yang tergabung dalam rantai pasokan, Perseroan tidak bisa menyampaikan datanya karena dalam perjanjian kerja sama dengan pemasok tidak terdapat klausul tentang pencatatan volume energi yang dikeluarkan oleh mitra. Namun demikian, sesuai dengan Standar Akuntansi dan Pelaporan Rantai Nilai Korporat (Cakupan 3) Protokol GRK (Gas Rumah Kaca), SPTP melakukan identifikasi konsumsi energi yang relevan di luar organisasi, yaitu kategori hulu berupa perjalanan bisnis, terkhusus perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang. [GRI 302-2]

Dalam laporan ini, perjalanan dengan pesawat terbang merujuk pada perjalanan Dewan Komisaris dan Direksi. Volume energi atau

Therefore, the company is committed to energy efficiency in using both types of energy, which simultaneously has a positive impact on reducing greenhouse gas emissions, a significant contributor to global warming and climate change.

Energy efficiency at SPTP is carried out through the Energy Use Efficiency Program (PPE), including replacing conventional street and terminal lighting with LED lamps. Another energy efficiency measure continued from the COVID-19 pandemic policy is holding online meetings using information technology applications for specific types of meetings. This approach allows participants not located at the meeting venue to avoid physical travel, including using operational vehicles, thereby contributing to fuel efficiency. Additionally, specifically for fuel efficiency, the company implements a program to electrify loading and unloading equipment that initially used fuel oil and provides shore plug connections that vessels can utilize while on standby at the berths, thereby reducing or limiting fuel consumption. [OJK F.7, F.12]

As of December 31, 2023, electricity subscription costs were recorded at IDR 170.18 billion, an increase of 20% compared to 2022, which amounted to IDR 141.91 billion. Meanwhile, fuel costs in 2023 amounted to IDR 535.92 billion, up 14% from 2022, which reached IDR 471.81 billion. [GRI 302-1] [OJK F.6]

Regarding energy consumption outside the organization, such as energy usage by suppliers involved in the supply chain, the company cannot provide this data because the cooperation agreements with suppliers do not include clauses on recording the volume of energy consumed by partners. However, in line with the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard of the Greenhouse Gas (GHG) Protocol, SPTP identifies relevant energy consumption outside the organization, such as upstream categories, including business travel, particularly air travel. [GRI 302-2]

In this report, air travel refers to the travels of the Board of Commissioners and Directors. The volume of energy or fuel consumed from business trips by air in 2023 was calculated using the ICAO

bahan bakar yang dikonsumsi dari perjalanan dinas dengan pesawat terbang pada tahun 2023 dihitung dengan kalkulator emisi karbon ICAO (*International Civil Aviation Organization*/Asosiasi Penerbangan Sipil Internasional). [GRI 302-2, 302-4]

(*International Civil Aviation Organization*) carbon emission calculator. [GRI 302-2, 302-4]

Kilograms to Liters Conversion: <https://>

Konsumsi Energi dari Perjalanan Dinas dengan Pesawat oleh Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021-2023

Energy Consumption from Business Travel by Air by the Board of Commissioners and Directors in 2021-2023

Tahun Year	Total Perjalanan Total Travel	Total Jarak (KM) Total Distance (KM)	Total BBM (KG) Total Fuel (KG)	Total BBM Total Fuel		Total Energi Total Energy (GJ)
				Liter Liters	Kiloliter Kiloliters	
2023	669	705.409	4.194.950	5.243.688	5.244	210.796
2022	515	481.731	2.644.348	3.305.435	3.305	132.853.
2021	109	86.333	497.857	622.321	622	25.003

Konversi kilogram ke liter: <https://iataops.com/conversion/>

Konversi liter ke Gigajoules: <https://www.unitconverters.net/energy/fuel-oil-equivalent-kiloliter-to-gigajoule.htm>

iataops.com/conversion/

Liters to Gigajoules Conversion: <https://www.unitconverters.net/energy/fuel-oil-equivalent-kiloliter-to-gigajoule.htm>

Berkaitan dengan pengurangan energi yang dibutuhkan untuk produk/jasa yang terjual, SPTP tidak bisa menerapkan kebijakan efisiensi secara spesifik. Sesuai dengan bidang usaha Perseroan yaitu penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas, maka penggunaan energi turut dipengaruhi oleh volume bongkar muat yang dilaksanakan Perseroan. Saat volume bongkar muat meningkat, maka energi yang digunakan dalam aktivitas bongkar muat akan bertambah, begitu pula sebaliknya. [GRI 302-5]

Regarding the reduction of energy required for products/services sold, Pelindo PTK is unable to implement specific efficiency policies. Given the nature of the company's business, which involves providing and/or servicing wharves for loading and unloading goods and containers, energy usage is directly influenced by the volume of loading and unloading activities carried out by the company. When the volume of these activities increases, the energy used will also increase, and vice versa. [GRI 302-5]

Pengelolaan Emisi

Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Oleh karena dampak negatif pemanasan global dan perubahan iklim sudah semakin nyata, maka SPTP berkomitmen untuk mengelola emisi dengan baik. Kebijakan nyata yang dilakukan adalah mengurangi emisi dengan melakukan efisiensi penggunaan energi. [GRI 3-3]

Perseroan menghasilkan emisi dari penggunaan listrik dan BBM dari operasional kantor dan terminal pelabuhan. Dalam laporan ini, emisi yang

Emission Management

Greenhouse gas (GHG) emissions are one of the causes of global warming and climate change, which can trigger hydrometeorological disasters in Indonesia, such as floods, landslides, and more. Given the increasingly apparent negative impacts of global warming and climate change, SPTP is committed to effectively managing emissions. A tangible policy in place is to reduce emissions through energy efficiency. [GRI 3-3]

The company generates emissions from electricity and fuel oil (BBM) used in office and port terminal operations. In this report, the emissions presented are GHG emissions (Scope 3) from business



disampaikan adalah emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya dari perjalanan dinas dengan pesawat terbang. Adapun emisi GRK dominan yang dihasilkan karbon dioksida (CO₂). Untuk menghitung emisi ini, Perseroan menggunakan kalkulator karbon ICAO (International Civil Aviation Organization/ Asosiasi Penerbangan Sipil Internasional). Penghitungan dilakukan berdasarkan kelas kabin dan jarak antara bandara keberangkatan dengan bandara kedatangan. Berdasarkan perhitungan tersebut, emisi GRK [Cakupan 3] tidak langsung lainnya pada tahun 2023 tercatat sebesar 8.683 kgCO₂eq, naik dibandingkan tahun 2022, yang tercatat sebesar 45.666 kgCO₂eq. [OJK F.11]

travel by airplane. The dominant GHG emission produced is carbon dioxide (CO₂). To calculate these emissions, the company uses the ICAO (International Civil Aviation Organization) carbon calculator. The calculation is based on cabin class and the distance between the departure and arrival airports. According to these calculations, Scope 3 indirect emissions for 2023 are recorded at 8,683 kgCO₂eq, an increase compared to 45,666 kgCO₂eq in 2022. [OJK F.11]

Total Emisi Gas Rumah Kaca (Cakupan 3) Tidak Langsung Lainnya dari Perjalanan Dinas dengan Pesawat Terbang Tahun 2021-2023

Total Greenhouse Gas (GHG) Emissions (Scope 3) Indirect from Business Air Travel 2021-2023

2023		2022		2021	
Jumlah Penggunaan Pesawat Terbang Number of Flights	Emisi Emissions (Kg CO ₂ eq)	Jumlah Penggunaan Pesawat Terbang Number of Flights	Emisi Emissions (Kg CO ₂ eq)	Jumlah Penggunaan Pesawat Terbang Number of Flights	Emisi Emissions (Kg CO ₂ eq)
669	63.733	515	45.802	109	8.683

Perhitungan Emisi GRK dari perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan standar ICAO (International Civil Aviation Organization)

Emission calculations from business travel are conducted in accordance with ICAO standards.

Lebih lanjut, berkaitan dengan upaya mendukung terciptanya kualitas udara bersih, Perseroan melakukan berbagai kebijakan berikut: [GRI 3-3]

- Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau
- Melakukan penanaman pohon di area kegiatan usaha;

Further, in support of clean air quality, the Company implements the following policies: [GRI 3-3]

- Maintaining Green Open Spaces
- Planting trees in business activity areas

Selain emisi GRK Cakupan 1, 2 dan 3, serta emisi udara, Perseroan mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memperketat penggunaan berbagai bahan yang menghasilkan emisi zat perusak lapisan ozon (*Ozone Depletion Potential/ ODP*) atau Bahan Perusak Ozon (BPO). Zat ini biasa terdapat di mesin pendingin ruangan (AC), kulkas, dan tabung pemadam api. BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer. Ada 23 senyawa kimia yang dikategorikan sebagai BPO, yakni CC-14, CH-3, CC-13, CH3BR, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-13, CFC-111, CFC-217, CFC-216, CFC-215, CFC-214, CFC-213, CFC-212, CFC-211, Halon-1211, Halon-1301, Halon-2402, R-500, R-502

In addition to GHG emissions from Scope 1, 2, and 3, and air emissions, the Company fully supports government policies to tighten the use of substances that produce ozone-depleting substances (ODS) or substances that deplete the ozone layer (ODP). These substances are commonly found in air conditioning units (AC), refrigerators, and fire extinguishers. ODS are chemical compounds that can potentially react with ozone molecules in the stratospheric layer. There are 23 chemical compounds categorized as ODS, including CC-14, CH-3, CC-13, CH3BR, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-13, CFC-111, CFC-217, CFC-216, CFC-215, CFC-214, CFC-213, CFC-212, CFC-211, Halon-1211, Halon-1301, Halon-2402, R-500, and R-502.

Sebagai korporasi yang bergerak di bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat

As a corporation engaged in providing and/or servicing port facilities for cargo and container handling, the Company does not produce,



barang dan petikemas, Perseroan tidak memproduksi, mengimpor, dan mengekspor BPO untuk menjalankan operasional usaha. Namun demikian, Perseroan menggunakan senyawa aktif untuk beberapa peralatan kerja, seperti refrigeran atau pendingin untuk AC dan kulkas, maupun zat pemadam api untuk alat pemadam api ringan (APAR). Penggunaan refrigeran atau pemadam api, SPTP telah menggunakan senyawa yang ramah lingkungan dan tidak merusak lapisan ozon. [OJK F.12]

Pengelolaan Air dan Air Limbah

SPTP menyadari bahwa akses terhadap air bersih sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia, dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu hak asasi manusia. Selaras dengan itu, tujuan ke-6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menyatakan, “Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.” Berkaitan dengan itu, Perseroan berupaya untuk mengelola penggunaan air semaksimal mungkin agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. [GRI 3-3]

Perseroan memerlukan air bersih atau air tawar (≤ 1.000 mg/l Total Padatan Terlarut) untuk berbagai keperluan seperti untuk wudu, kamar

import, or export ODS for its operational activities. However, the Company uses active compounds for some work equipment, such as refrigerants for AC and refrigerators, as well as fire extinguishing agents for portable fire extinguishers (APAR). For refrigerants and fire extinguishing agents, SPTP uses environmentally friendly compounds that do not harm the ozone layer. [OJK F.12]

Water and Wastewater Management

SPTP recognizes that access to clean water is crucial for human life and well-being, and is acknowledged by the United Nations (UN) as a fundamental human right. In line with this, Sustainable Development Goal (SDG) 6 states, “Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.” Accordingly, the Company strives to manage water use as efficiently as possible to minimize negative impacts on the environment and local communities where the company operates. [GRI 3-3]

The Company requires clean or fresh water ($\leq 1,000$ mg/l Total Dissolved Solids) for various purposes such as for ablution, toilets, cleaning equipment,



kecil (toilet), mencuci peralatan, mencuci kendaraan operasional, mencuci alat bongkar muat, menyiram tanaman, dan sebagainya. Saat ini, air yang digunakan bersumber dari air tanah dan air dari perusahaan air minum (PAM). Dalam menggunakan air, SPTP berupaya untuk melakukan efisiensi karena pasokan bahan baku untuk PAM semakin terbatas akibat banyak sumber air baku yang tercemar, sedangkan air tanah ketersediaannya kian terbatas seiring makin masifnya pengambilan untuk berbagai keperluan, seperti untuk industri, perhotelan dan lain-lain. Selain air tawar, dalam menjalankan usaha, Perseroan tidak mengambil air lainnya (>1.000 mg/l Total Padatan Terlarut).

Kebijakan efisiensi air dilakukan dengan memberikan himbauan agar menggunakan air secara bijaksana, disertai dengan melakukan pengecekan kondisi jaringan pipa dan keran air secara berkala sehingga bisa segera dilakukan perbaikan/penggantian apabila ada pipa, keran atau *valve* yang bocor/rusak.

Per 31 Desember 2023, beban langganan air tercatat sebesar Rp7,31 miliar, naik 27% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp5,74 miliar. [GRI 303-3][OJF.8]

Berdasarkan penggunaan air bersih tersebut, Perseroan menghasilkan air limbah yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk pengelolaan air limbah, sebelum dibuang ke badan air, seperti saluran atau got, SPTP melakukan *treatment* di instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dengan demikian, kualitas air limbah yang dibuang telah memenuhi baku mutu sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak lain secara aman. Dengan pengelolaan seperti itu, maka selama tahun pelaporan tidak ada laporan pengaduan berkaitan dengan badan air yang tercemar akibat pelepasan air limbah dari Perseroan. [GRI 303-2]

Dalam pengambilan air bersih, khususnya penggunaan air tanah, selama pelaporan, Perseroan tidak mengambil air dari suatu wilayah yang mengalami stres air, yaitu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan air untuk manusia dan ekologi setempat. Dengan demikian, penggunaan air tanah oleh SPTP tidak berdampak negatif bagi lingkungan atau masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. [GRI 303-1]

washing operational vehicles, cleaning cargo handling equipment, watering plants, and so on. Currently, the water used is sourced from groundwater and from water supply companies (PAM). In using water, SPTP aims to practice efficiency due to the limited supply of raw materials for PAM caused by the contamination of many raw water sources, while groundwater availability is increasingly limited due to the growing demand for various uses, such as for industry, hotels, and others. Besides fresh water, in conducting its business, the Company does not extract other types of water (>1,000 mg/l Total Dissolved Solids).

Water efficiency policies include encouraging the wise use of water and conducting regular checks of pipe and faucet conditions to enable prompt repairs or replacements if any pipes, faucets, or valves are leaking or damaged.

As of December 31, 2023, the water subscription costs amounted to IDR 7.31 billion, a 27% increase compared to IDR 5.74 billion in 2022. [GRI 303-3][OJK F.8]

Based on the use of clean water, the Company generates wastewater that has the potential to pollute the environment if not properly managed. For wastewater management, before being discharged into water bodies such as drains or gutters, SPTP performs treatment at its wastewater treatment plants (WWTP). Thus, the quality of the discharged wastewater meets standards and can be safely used by others. With such management, there have been no reports of complaints related to water bodies being polluted due to wastewater discharge from the Company during the reporting year. [GRI 303-2]

Regarding the extraction of clean water, specifically groundwater, during the reporting period, the Company does not extract water from areas experiencing water stress, which are areas unable to meet the water needs for human and ecological requirements. Thus, the use of groundwater by SPTP does not negatively impact the environment or communities around the company's operations. [GRI 303-1]



Pengelolaan Limbah

Limbah merupakan sumber pencemaran bagi tanah, air dan udara apabila tidak dikelola dengan baik. Ekses limbah bagi lingkungan sangat beragam, tergantung volume, jenis dan rentang waktu paparan limbah terjadi. Becermin pada bahaya dan dampak buruk bagi lingkungan, maka SPTP berkomitmen untuk mengelola limbah dengan baik. Komitmen ini dibangun karena dalam operasional usaha, Perseroan menghasilkan limbah padat dan cair, baik yang termasuk dalam limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) maupun non-B3. Sesuai regulasi yang ada, Perseroan mengelola limbah-limbah tersebut seusai dengan jenisnya. Sebagian besar pengelolaan limbah diserahkan dan diangkut oleh pihak ketiga yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan untuk dimanfaatkan atau dimusnahkan. [OJK F.13, F.14]

Komitmen SPTP dalam mengelola limbah membawa hasil dengan tidak adanya insiden tumpahan yang signifikan selama tahun pelaporan. Selain itu juga tidak ada laporan tentang tumpahan zat-zat berbahaya lain yang berdampak buruk bagi lingkungan dan manusia, baik tumpahan zat kimia, bahan bakar, dan sebagainya. [OJK F.15]

Waste Management

Waste can be a source of pollution to soil, water, and air if not managed properly. The environmental impacts of waste vary depending on the volume, type, and duration of exposure to the waste. Reflecting on the dangers and negative impacts on the environment, SPTP is committed to managing waste effectively. This commitment arises from the fact that the Company generates both solid and liquid waste, including hazardous and toxic waste (B3) as well as non-hazardous waste. In accordance with existing regulations, the Company manages these wastes according to their type. Most waste management is handled and transported by third parties who are licensed by the Ministry of Environment for utilization or disposal. [OJK F.13, F.14]

SPTP's commitment to waste management is reflected in the absence of significant spill incidents during the reporting year. Additionally, there have been no reports of spills involving other hazardous substances that have adverse effects on the environment and human health, including chemical spills, fuel spills, and so forth. [OJK F.15]



Keanekaragaman Hayati

Upaya menjaga keanekaragaman hayati merupakan salah satu kontribusi nyata SPTP bagi lingkungan. Perseroan menyadari bahwa upaya melindungi keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting untuk memastikan kemampuan spesies tanaman dan hewan, keanekaragaman genetik, dan ekosistem alami untuk bertahan hidup. Selain itu, sulit dimungkiri bahwa ekosistem alami menyediakan air dan udara bersih, dan berkontribusi pada keamanan pangan dan kesehatan manusia. Keanekaragaman hayati juga berkontribusi secara langsung pada penghidupan masyarakat lokal sehingga terjaganya keanekaragaman hayati turut berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dukungan Perseroan terhadap keanekaragaman hayati antara lain ada pemastian bahwa lokasi kantor dan terminal pelabuhan tidak ada yang berdekatan dengan kawasan lindung atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Dengan demikian, kegiatan operasional Perseroan tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati di sekitarnya. Sementara itu, berkaitan dengan pelaksanaan TJSL/CSR bidang lingkungan hidup sebagai bentuk dukungan terhadap konservasi lingkungan dan upaya menjaga keanekaragaman hayati, pada tahun pelaporan dilakukan melalui program penanaman pohon/mangrove, transplantasi terumbu karang, bersih-bersih pantai, dan sebagainya. [OJK F.9, F.10]

Pengaduan Masalah Lingkungan [GRI 2-25]

Kepatuhan terhadap regulasi terkait lingkungan merupakan salah satu prinsip yang dipegang SPTP dalam menjalankan usaha. Melalui kepatuhan tersebut, maka dampak negatif terhadap lingkungan bisa dicegah atau diminimalkan. Walau demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan atas risiko lingkungan yang mungkin terjadi, Perseroan membuka diri dan menyediakan saluran pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain apabila mereka menemukan atau merasakan dampak lingkungan akibat beroperasinya Perseroan. Terhadap pengaduan yang masuk, Perseroan akan menindaklanjuti segera sesuai prosedur yang berlaku.

Biodiversity

Efforts to preserve biodiversity are a significant contribution of SPTP to the environment. The Company recognizes that protecting biodiversity is crucial for ensuring the survival of plant and animal species, genetic diversity, and natural ecosystems. Moreover, it is undeniable that natural ecosystems provide clean water and air, contribute to food security, and enhance human health. Biodiversity also directly supports local livelihoods, so maintaining biodiversity helps reduce poverty and achieve sustainable development.

The Company supports biodiversity by ensuring that its office and port terminal locations are not close to protected areas or areas with high biodiversity value outside of protected zones. Thus, the Company's operational activities do not have significant negative impacts on local biodiversity. Additionally, in relation to environmental CSR/Community Social Responsibility activities as part of supporting environmental conservation and biodiversity efforts, the reporting year included programs such as tree/mangrove planting, coral reef transplantation, beach cleanups, and others. [OJK F.9, F.10]

Environmental Complaints Management [GRI 2-25]

Compliance with environmental regulations is one of SPTP's core principles in conducting its operations. Through this compliance, negative environmental impacts can be prevented or minimized. However, as part of its accountability to stakeholders for potential environmental risks, the Company remains open and provides a complaints channel for the community and other stakeholders who may experience or observe environmental impacts from the Company's operations. Complaints received will be addressed promptly in accordance with applicable procedures.

Apabila masyarakat menemukan keluhan yang terkait dengan Perusahaan, maka dapat menyampaikan keluhan tersebut melalui Humas Perusahaan. Jika terkait dengan pelanggan maka mekanisme yang disediakan SPTP adalah sebagai berikut:

- a. User Internal atau user eksternal menyampaikan suara melalui salah satu media komunikasi.
- b. Bagi user internal dan petugas *gateway* akan menerima dan mencatat suara pelanggan ke dalam *Customer Portal*.
- c. TIM CRO melakukan pengklasifikasian suara pelanggan untuk kemudian didistribusikan kepada unit kerja terkait.
- d. Unit kerja terkait segera menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas suara pelanggan.
- e. Cabang segera menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas suara pelanggan.
- f. Kantor pusat segera menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas suara pelanggan.

Per 31 Desember 2023, Perseroan tidak menerima pengaduan lingkungan sehingga tidak menerima denda atau sanksi terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan. [GRI 2-27] [OJK F.16]

If the public encounters issues related to the Company, they can submit their complaints through the Company's Public Relations department. For customer-related matters, SPTP provides the following mechanism:

- a. Internal users or external users submit their feedback through one of the communication channels.
- b. Internal users and gateway officers will receive and record the feedback in the Customer Portal.
- c. The CRO team classifies the customer feedback and then distributes it to the relevant work units.
- d. The relevant work unit will promptly address the feedback with a response and/or answer.
- e. Branches will promptly address the feedback with a response and/or answer.
- f. The head office will promptly address the feedback with a response and/or answer.

As of December 31, 2023, the Company did not receive any environmental complaints, and therefore, did not incur any fines or sanctions related to non-compliance with environmental regulations. [GRI 2-27] [OJK F.16]





KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

Sustainability in Social Performance

Keberadaan dan keberlangsungan PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP selama dua dasawarsa menjalankan bidang usaha manajemen terminal peti kemas dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah keberhasilan Perseroan memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan yang begitu beragam, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal SPTP adalah pemegang saham, manajemen, karyawan lintas divisi dan beragam level jabatan. Adapun pemangku kepentingan eksternal di antaranya konsumen/pelanggan, pemerintah pusat/daerah, regulator, mitra/pemasok, media massa, dan masyarakat di sekitar lokasi Perseroan beroperasi, termasuk penerima manfaat Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Berkaca pada keberagaman pemangku kepentingan SPTP, maka aktivitas aspek sosial untuk memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan juga beraneka rupa, seperti ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hak asasi manusia, tanggung jawab atas produk/jasa, inovasi produk dan jasa/layanan, pelibatan masyarakat, dampak operasional perusahaan dan sebagainya. Keberhasilan Perseroan memenuhi tanggung jawab sosial tak lepas dari ketepatannya dalam melakukan pemetaan dan merumuskan pelibatan yang sesuai dengan harapan masing-masing pemangku kepentingan.

The existence and sustainability of PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) over the past two decades in managing container terminal operations are influenced by many factors. One crucial factor is the company's success in fulfilling its responsibilities to a diverse range of stakeholders, both internal and external. Internal stakeholders of SPTP include shareholders, management, and employees across various divisions and levels of responsibility. External stakeholders encompass consumers/customers, central and local governments, regulators, partners/suppliers, the media, and communities around the company's operational areas, including beneficiaries of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR).

Given the diversity of SPTP's stakeholders, social activities to fulfill responsibilities to these stakeholders also vary widely, covering areas such as employment, Occupational Health and Safety (OHS), human rights, product/service responsibility, product and service/innovation, community involvement, operational impact, and more. The company's success in meeting its social responsibilities is largely due to its accuracy in mapping out and formulating engagement strategies that align with the expectations of each stakeholder.



SPTP berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap segenap pemangku kepentingan karena meyakini hal tersebut merupakan sarana terbaik untuk menjalin hubungan dan menciptakan komunikasi positif dengan para pemangku kepentingan. Lebih lanjut, komunikasi yang berkualitas tersebut akan memperkuat posisi dan keberadaan Perseroan sebagai entitas bisnis, sekaligus modal penting untuk terus maju dan berkembang mewujudkan misi dan visi SPTP.

Landasan Kebijakan [GRI 3-3]

Komitmen SPTP memenuhi tanggung jawabnya pada aspek sosial merujuk pada berbagai regulasi yang berlaku di antaranya:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

SPTP is committed to fulfilling its social responsibilities to all stakeholders, believing that this is the best way to establish relationships and foster positive communication with them. Moreover, this quality communication strengthens the company's position and presence as a business entity and serves as an important foundation for continued growth and development in realizing SPTP's mission and vision.

Policy Framework [GRI 3-3]

SPTP's commitment to fulfilling its social responsibilities is grounded in adherence to various applicable regulations, including:

1. Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety
2. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection
3. Law No. 13 of 2003 on Employment
4. Law No. 25 of 2007 on Investment
5. Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE)
6. Law No. 24 of 2011 on Social Security Administration Bodies
7. Law No. 6 of 2023 on the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law



Kinerja Sosial
Keberlanjutan
Sustainability Social
Performance

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
12. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
14. Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
15. Permenaker RI Nomor PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3.

Berdasarkan berbagai regulasi tersebut, selanjutnya SPTP menerbitkan serangkaian kebijakan internal sesuai dengan keperluan masing-masing pemangku kepentingan. Kebijakan internal tersebut antara lain berkaitan dengan kepegawaian, penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat sesuai kaidah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sebagainya. Sebagai bentuk kepatuhan, Perseroan menjalankan berbagai regulasi tersebut dalam operasional bisnis keseharian.

Layanan Setara untuk Konsumen [OJK F.17]

SPTP berkomitmen untuk memberikan layanan setara kepada konsumen/pelanggan karena mereka adalah salah satu pemangku kepentingan utama. Penerimaan konsumen terhadap produk dan layanan Perseroan akan sangat menentukan keberlanjutan bisnis di masa depan. Semakin banyak konsumen yang puas, maka kemajuan dan keberlangsungan usaha SPTP akan terjaga. Begitu pula sebaliknya.

Berpegang pada prinsip kesetaraan, maka Perseroan memberikan layanan terbaik kepada konsumen tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, pandangan politik, dan sebagainya. Prinsip ini dipegang teguh sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7, huruf

8. Law No. 17 of 2023 on Health
9. Government Regulation No. 36 of 2021 on Wages
10. Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed-Term Employment Contracts, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment
11. Government Regulation No. 50 of 2012 on the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems
12. Government Regulation No. 50 of 2012 on the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems (K3).
13. Presidential Regulation No. 7 of 2019 on Occupational Diseases
14. Minister of Manpower Regulation No. PER.04/MEN/1987 on the Occupational Safety and Health Steering Committee and Procedures for Appointing Occupational Safety Experts
15. Minister of Manpower Regulation No. PER.02/MEN/1992 on Procedures for Appointment, Obligations, and Authorities of K3 Experts.

Based on these various regulations, SPTP has subsequently issued a series of internal policies tailored to the needs of each stakeholder. These internal policies cover areas such as employment and the creation of a safe and healthy work environment in accordance with Occupational Health and Safety (K3) principles, among others. As a form of compliance, the company implements these regulations in its daily business operations.

Equal Service for Consumers [OJK F.17]

SPTP is committed to providing equal services to consumers/customers, as they are one of the primary stakeholders. Consumer acceptance of the company's products and services is crucial for the future sustainability of the business. The more satisfied the consumers are, the more the progress and continuity of SPTP's operations will be maintained, and vice versa.

Adhering to the principle of equality, the company provides the best service to consumers without discrimination based on ethnicity, religion, race, skin color, political views, etc. This principle is firmly upheld as part of the company's compliance with consumer rights as stipulated in the Consumer Protection Law, Article 7, letter c, which states, "treating or serving consumers



c, “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.” Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan, “Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.”

properly and honestly and without discrimination.” The explanation of the article mentions, “Business actors are prohibited from differentiating between consumers in providing services. Business actors are prohibited from varying the quality of service to consumers.”

Rekrutmen dan Turnover

Perseroan melakukan rekrutmen secara terbuka/ transparan dan berlaku bagi siapapun yang memenuhi kualifikasi tanpa membedakan suku, agama, ras dan sebagainya. Rekrutmen dilakukan untuk mencari kandidat terbaik yang memiliki kemampuan serta kapasitas yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan Perseroan. Sejalan dengan komitmen agar keberadaannya memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, Perseroan memberikan kesempatan kepada kandidat yang berdomisili di sekitar perusahaan beroperasi (tenaga kerja lokal) untuk bergabung sesuai dengan kriteria kebutuhan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Namun demikian, pada tahun pelaporan, SPTP tidak melakukan rekrutmen sesuai dengan kebijakan induk Perusahaan “minus growth” (baik pegawai organik Pelindo, organik anak Perusahaan, PKWT, tenaga alih daya dan Pemegang Saham lainnya). Dengan demikian, Perseroan tidak menyampaikan laporan hasil

Recruitment and Turnover

The company conducts recruitment in an open and transparent manner, applicable to anyone meeting the qualifications without discrimination based on ethnicity, religion, race, and so on. Recruitment is aimed at finding the best candidates with the skills and capacity matching the job specifications needed by the company. In line with its commitment to benefit the local community, the company provides opportunities for candidates residing in the vicinity of its operations (local workforce) to join, provided they meet the required criteria and competency standards. However, in the reporting year, SPTP did not conduct recruitment in accordance with the parent company's “minus growth” policy (affecting both organic employees of Pelindo, its subsidiaries, fixed-term contract workers, outsourced employees, and other shareholders). Consequently, the company does not report recruitment outcomes based on status, work region, age range, or gender. [GRI 3-3, 401-1]



rekrutmen berdasarkan status, wilayah kerja, rentang usia dan jenis kelamin. [GRI 3-3, 401-1]

Selain bertambah karena proses rekrutmen, jumlah karyawan SPTP berkurang dengan adanya karyawan yang berhenti atau meninggalkan Perseroan karena berbagai alasan. Per 31 Desember 2023, terdapat 19 karyawan yang meninggalkan Perseroan, turun dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 112 orang. [GRI 401-1]

Tunjangan Karyawan Berdasarkan Status

Berdasarkan statusnya, karyawan SPTP terbagi menjadi tiga kategori yaitu karyawan organik/karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), karyawan tidak tetap/karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta karyawan alih daya. Perbedaan status tersebut memengaruhi tunjangan yang diterima oleh karyawan. [GRI 401-2]

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [OJK F.18]

Kesetaraan kesempatan bekerja atau non-diskriminasi bagi karyawan SPTP diberlakukan sejak proses rekrutmen dan berkelanjutan serta berlaku dalam hal pengembangan kompetensi, karier, remunerasi, dan sebagainya. Merujuk prinsip tersebut, Perseroan memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada seluruh karyawan pria maupun wanita untuk bekerja, meniti karier dan menempati posisi-posisi penting, termasuk di jajaran *top management*. [GRI 3-3]

Di SPTP, pola karir pegawai diatur melalui Peraturan Direksi SPTP No. PER.19/KP.0403/P.III-2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Penyempurnaan Peraturan Direksi No. PER.88/KP.0403/P.III-2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.26/KP.0403/P.III-2014 tentang Karier Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan. Keberadaan pola karir tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kesempatan pengembangan karir yang sama kepada masing-masing pegawai SPTP. Dalam peraturan Direksi tersebut dijelaskan mengenai penjenjangan karir pegawai Perusahaan berdasarkan pendidikan pegawai dan keahlian pegawai. Selain itu juga dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dalam jabatan untuk kepentingan promosi dan mutasi pegawai.

In addition to the increase from recruitment, the number of SPTP employees has decreased due to employees leaving the company for various reasons. As of December 31, 2023, there were 19 employees who left the company, a decrease compared to the previous year, which recorded 112 departures. [GRI 401-1]

Employee Benefits by Status

Based on their status, SPTP employees are categorized into three groups: permanent employees (those with an indefinite-term employment contract), fixed-term contract employees, and outsourced employees. This status distinction affects the benefits received by the employees. [GRI 401-2]

Equal Employment Opportunities [OJK F.18]

Equal employment opportunities, or non-discrimination for SPTP employees, are applied from the recruitment process and continue throughout their employment, including in areas such as competency development, career advancement, and remuneration. Adhering to this principle, the company provides equal opportunities for both male and female employees to work, advance in their careers, and hold important positions, including in top management. [GRI 3-3]

At SPTP, employee career paths are regulated by Director Regulation No. PER.19/KP.0403/P.III-2016 dated July 1, 2016, which updates Director Regulation No. PER.88/KP.0403/P.III-2014 regarding Amendments to Director Regulation No. PER.26/KP.0403/P.III-2014 on Employee Career and Promotion. This career path regulation aims to provide clarity and equal career development opportunities for all SPTP employees. It details the career progression based on employee education and skills, as well as the requirements and procedures for promotions and job rotations.

Implementasi kesetaraan kesempatan bekerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi tersebut sejalan dengan spirit Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Selain itu, juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Penghormatan terhadap kesetaraan kesempatan dalam bekerja juga sejalan dengan Konvensi 111 Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang mendeklarasikan bahwa hak asasi manusia harus dapat dinikmati tanpa adanya perbedaan apapun seperti ras atau warna kulit, gender, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal usul bangsa atau sosial, harta benda, kelahiran, atau status lainnya. Konsep non-diskriminasi ini turut mendasari Perseroan untuk memberikan rasio gaji pokok dan remunerasi yang sama antara karyawan perempuan dan laki-laki. [GRI 405-2]

Secara spesifik, keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan di SPTP antara lain ditunjukkan dengan adanya dua Direktur perempuan dalam jajaran Direksi, yaitu Direktur Strategi dan Komersial: Rima Novianti, dan Direktur Teknik: Dothy. Sedangkan keanekaragaman karyawan tercermin dalam demografi karyawan, baik segi jenis kelamin, rentang usia, jenjang pendidikan, dan lain-lain. [GRI 405-1]

Kesungguhan SPTP menerapkan kesetaraan kesempatan bekerja membawa hasil dengan tidak adanya insiden diskriminasi pada tahun pelaporan. Dengan demikian, tidak ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan Perseroan terkait dengan pengelolaan antar karyawan.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [OJK F.19]

SPTP mendukung sepenuhnya penghapusan tenaga kerja anak dan praktik tenaga kerja paksa karena keduanya merupakan pelanggaran hak

The implementation of equal employment opportunities, as outlined in the Director Regulation, aligns with Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states: "Everyone has the right to be free from discriminatory treatment of any kind and to receive protection against such discriminatory treatment." It also complies with Law No. 7 of 1984 on the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and Presidential Instruction No. 9 of 2000 on Gender Mainstreaming in National Development.

Respect for equal employment opportunities is also in line with ILO Convention No. 111 on Discrimination (Employment and Occupation), and the Universal Declaration of Human Rights of 1948, which declares that human rights should be enjoyed without discrimination of any kind, including race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. This non-discrimination concept underpins the company's practice of providing equal base salary and remuneration ratios between male and female employees. [GRI 405-2]

Specifically, diversity in governance and employees at SPTP is evidenced by the presence of two female Directors in the Board of Directors: Director of Strategy and Commercial, Rima Novianti, and Director of Engineering, Dothy. Employee diversity is also reflected in the demographics of the workforce, including gender, age range, educational background, and more. [GRI 405-1]

SPTP's commitment to equal employment opportunities has been successful, with no incidents of discrimination reported in the reporting year. As a result, no corrective actions were needed related to employee management.

Child Labor and Forced Labor [OJK F.19]

SPTP is fully committed to eliminating child labor and forced labor, as both are violations of human rights. To support this commitment,

asasi manusia. Upaya nyata untuk mengukuhkan dukungan tersebut adalah Perseroan menetapkan secara jelas batas minimal usia karyawan dan jam kerjanya. Usia minimal karyawan adalah 18 tahun sehingga tidak termasuk dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan jam kerja yang disepakati adalah 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (Senin-Jumat) sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, pada unit kerja dan level karyawan tertentu, Perseroan melaksanakan sistem kerja giliran (*shift work*) yang pengaturannya disesuaikan dengan kondisi lapangan pekerjaan. Dengan pengaturan tersebut, apabila terdapat kelebihan waktu kerja akan diperhitungkan sebagai kerja lembur yang besaran kompensasinya sudah ditetapkan dan tidak merugikan karyawan. Tak hanya itu, Perseroan juga memberikan kesempatan untuk beristirahat pada jam-jam tertentu.

Pengaturan tentang usia minimal dan jam kerja merupakan kepatuhan Perseroan terhadap sejumlah regulasi. Selain Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), komitmen tidak mempekerjakan anak juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Sementara itu, penentuan tentang jam kerja, termasuk kebijakan lembur, selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).

Konsistensi Perseroan menerapkan ketentuan tentang usia minimal pekerja serta jam kerja yang jelas berdampak positif dengan tidak adanya insiden/temuan terkait pekerja anak dan

the company has clearly established minimum age requirements and working hours for its employees. The minimum age for employment is set at 18 years, in compliance with Law No. 35 of 2014 on Amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, thus excluding those considered children. The agreed working hours are 8 hours per day and 40 hours per week for 5 working days (Monday to Friday), as specified in Article 77 of Law No. 13 of 2003 on Manpower.

In certain work units and employee levels, the company implements a shift work system, with schedules adjusted according to the conditions of the job. Any excess working hours are calculated as overtime, with compensation rates set to ensure employees are not disadvantaged. Additionally, employees are given opportunities for breaks during certain hours.

The regulations on minimum age and working hours reflect the company's adherence to several legal standards. Besides Law No. 13 of 2003 on Manpower and Law No. 20 of 1999 on the Ratification of ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment, the company's commitment to not employing children is also in line with Law No. 1 of 2000 on the Ratification of ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. Furthermore, regulations on working hours and overtime policies align with Law No. 19 of 1999 on the Ratification of ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour.

The consistent application of clear minimum age and working hour regulations has positively impacted SPTP, with no incidents or findings related to child labor or forced labor reported. As

praktik kerja paksa di SPTP. Dengan demikian, Perseroan tidak menerima denda/sanksi atas ketidakpatuhan terhadap regulasi terkait pekerja anak dan kerja paksa. [GRI 2-27]

Upah Minimum Regional [OJK F.20]

Upah atau imbalan kerja/remunerasi merupakan hak normatif pegawai yang dijunjung tinggi pemenuhannya oleh SPTP. Perseroan memberikan remunerasi berdasarkan pengalaman, kompetensi dan kinerja setiap karyawan tanpa membedakan gender sehingga setiap karyawan berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan. Jika terdapat perbedaan jumlah upah yang diterima, hal itu lebih disebabkan oleh pencapaian kinerja atau prestasi masing-masing karyawan. Komitmen Perseroan memberikan kesetaraan remunerasi tanpa memandang gender merupakan implementasi undang-undang ketenagakerjaan, serta Konvensi ILO No: 100/1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (*Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value*).

Pemberian upah di SPTP diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak bagi karyawan. Dengan pendekatan itu, maka besaran upah minimum bagi karyawan tetap level terendah akan menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lainnya di provinsi di mana Perseroan beroperasi. Berdasarkan prinsip tersebut, Perseroan memberikan upah untuk karyawan tetap level terendah dengan merujuk ketentuan upah minimum provinsi yang ditetapkan pemerintah. Sesuai prinsip tersebut, SPTP menjamin bahwa upah karyawan tetap level terendah telah sesuai dengan ketentuan upah minimum regional di masing-masing daerah.

Mekanisme dan proses pemberian upah di SPTP di atas, termasuk bagi karyawan tetap di tingkat terendah, telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

a result, the company has not faced any fines or sanctions for non-compliance with regulations concerning child labor and forced labor. [GRI 2-27]

Regional Minimum Wage [OJK F.20]

Wages or remuneration is a fundamental right of employees that SPTP prioritizes. The company provides remuneration based on each employee's experience, competency, and performance without gender discrimination, ensuring that all employees receive equal treatment in the wage system. Any differences in wages are primarily due to individual performance or achievements. SPTP's commitment to equal remuneration regardless of gender reflects compliance with labor laws and ILO Convention No. 100/1951 on Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value.

SPTP aims to ensure that wages meet a decent standard of living for employees. Accordingly, the minimum wage for employees at the lowest level adjusts based on basic living costs, inflation rates, living standards, and other relevant variables in the region where the company operates. In line with this principle, SPTP ensures that the wages for permanent employees at the lowest level adhere to the regional minimum wage regulations set by the government. In accordance with this principle, SPTP guarantees that the wages of the lowest level permanent employees are in accordance with the regional minimum wage provisions in each region.

The wage determination mechanism and process at SPTP, including for permanent employees at the lowest level, comply with the Minister of Manpower and Transmigration Decree No. 226 of 2000 concerning Amendments to Articles 1, 3, 4, 8, 11, 20, and 21 of the Minister of Manpower Regulation No. PER-01/MEN/1999 on Minimum Wage, as well as the Minister of Manpower Regulation No. 18 of 2022 on the Determination of Minimum Wages for 2023.

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai [OJK F.22]

Peningkatan kapasitas dan kemampuan karyawan merupakan kunci penting untuk mewujudkan pertumbuhan dan kinerja keberlanjutan SPTP. Untuk itu, Perseroan secara berkesinambungan menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi baik soft skills maupun *hard skills*. Program pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan sifatnya terbuka bagi seluruh karyawan tanpa membedakan jenis kelamin. [GRI 3-3]

Per 31 Desember 2023, Perseroan telah menyelenggarakan 212 judul pelatihan yang diikuti oleh 4.080 karyawan organik dan non-organik dengan persentase rasio pekerja yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 162% dari total pekerja dari target sebanyak 2.520 orang. Untuk membiayai program ini, Perseroan merealisasikan anggaran sebesar Rp47.968.482.536 dari RKAP Tahun 2023 sebesar Rp48.414.107.255 atau tercapai sebesar 99%. [GRI 404-1]

Employee Training and Development [OJK F.22]

Enhancing employee capacity and capability is crucial for achieving growth and sustainable performance at SPTP. To this end, the company continuously organizes various competency development programs, covering both soft skills and hard skills. These competency development programs are conducted based on the company's needs and are open to all employees regardless of gender. [GRI 3-3]

As of December 31, 2023, the company has conducted 212 training sessions attended by 4,080 organic and non-organic employees, with a training participation ratio of 162% of the target number of 2,520 employees. The company allocated IDR 47,968,482,536 for this program, which is 99% of the IDR 48,414,107,255 budgeted in the 2023 RKAP. [GRI 404-1]

Tabel Kegiatan Pelatihan 2023
 2023 Training Activities Table

No	Keterangan Description	Jumlah Pekerja Number of Workers	Jumlah Pekerja yang Mengikuti Pelatihan Number of Workers Attending Training	Persentase Pekerja yang Mengikuti Pelatihan Percentage of Workers Attending Training
1	Seluruh Pekerja All Workers	1.786	4.080	228%

Selama tahun pelaporan, SPTP menyelenggarakan tiga jenis pelatihan sebagai berikut: [GRI 404-2]

1. Pelatihan Mandatory

Pelatihan mandatory adalah pelatihan yang bertujuan mengembangkan keterampilan teknis yang bersifat wajib sesuai peraturan yang berlaku. Pelatihan mandatory yang dilakukan tahun 2023 yaitu sertifikasi SIO Alat Angkat & Angkut, pelatihan dan refreshment AK3 Umum.

2. Pelatihan Manajerial

Pelatihan manajerial adalah pelatihan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan struktural tertentu yang terdiri atas diklat manajerial tingkat BOD, BOD -1, BOD -2 dan BOD -3. Pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi bagi pejabat struktural yang telah dilaksanakan di tahun 2023 meliputi Executive

Throughout the reporting year, SPTP organized three types of training: [GRI 404-2]

1. Mandatory Training

Mandatory training aims to develop technical skills required by regulations. In 2023, mandatory training included SIO Lift & Transport Equipment certification and AK3 General training and refreshment.

2. Managerial Training

Managerial training is required for certain structural positions and includes managerial courses for BOD, BOD -1, BOD -2, and BOD -3 levels. Managerial competency enhancement training conducted in 2023 included the Executive Director Course, Human Capital Level Manager Training and Certification,



Director Course, Pelatihan dan Sertifikasi Human Capital Level Manager, Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI), dan lain-lain. Pelatihan Managerial mayoritas diselenggarakan secara terpusat oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Tahun 2023, fokus utama PT Pelindo Terminal Petikemas adalah pada Program Taskforce Transformation yang dilakukan di beberapa terminal di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas yang terdiri dari: program standarisasi dan sistemisasi operasi. Program ini bertujuan untuk melakukan standarisasi kompetensi pekerja khususnya di bidang operasi.

3. Diklat Substansial

Diklat substansial terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Pelatihan *Technical Skill*

Pelatihan *technical skill* bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis di bidang tertentu. Pelatihan yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah pelatihan-pelatihan pada program Standarisasi dan Sistemisasi/digitalisasi Terminal Petikemas, pelatihan aplikasi BPC RKAP, Training Soft Skill Series Batch I, Pelatihan Auditor SMK3, Pelatihan DasarDasar Audit, dan lain-lain.

Accelerated. Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI), and others. Managerial training is primarily centralized by PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

In 2023, PT Pelindo Terminal Petikemas focused on the Taskforce Transformation Program, which was implemented across several terminals within PT Pelindo Terminal Petikemas. This program includes operational standardization and systemization aimed at standardizing worker competencies, especially in operational areas.

3. Substantial Training

Substantial training is divided into four categories:

1. Technical Skill Training

Technical skill training aims to develop technical skills in specific areas. Training conducted in 2023 included programs on the Standardization and Systemization/Digitalization of Container Terminals, BPC RKAP application training, Soft Skill Series Batch I, SMK3 Auditor Training, Basic Audit Training, and others.

2. Pelatihan *Leadership Skill*

Pelatihan *leadership skill* bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan. Pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah Executive Director Course, dan Pelatihan Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) BOD-2.

3. Pelatihan *Soft Skill*

Pelatihan *soft skill* bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan sikap, perilaku atau karakter. Pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah Training Soft Skill Series Batch I dan II untuk Key Account Management (KAM) Officer.

4. Pelatihan *Strategic Business Development Skill*

Pelatihan *strategic business development skill* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan strategis dalam mengembangkan suatu usaha. Pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah Strategi Implementasi Governance, Risk and Compliance dan Risk Control di Dalam Perusahaan (SVP).

2. Leadership Skill Training

Leadership skill training is aimed at developing leadership competencies. In 2023, training included the Executive Director Course and the Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) BOD-2.

3. Soft Skill Training

Soft skill training focuses on shaping and developing attitudes, behaviors, or character. Training conducted in 2023 included Soft Skill Series Batch I and II for Key Account Management (KAM) Officers.

4. Strategic Business Development Skill Training

Strategic business development skill training aims to enhance strategic abilities in business development. Training conducted in 2023 included Governance, Risk, and Compliance Strategy and Risk Control in Companies (SVP).

Rekapitulasi Pelaksanaan Diklat Tahun 2023

2023 Training Implementation Recap Table

No	Jenis Pelatihan Training Types	Tingkat/Level						Jumlah Peserta Total Participants
		BOD	BOD -1	BOD -2	BOD -3	Staff	TAD	
1	Pelatihan / Sertifikasi Mandatory	0	32	150	121	246	234	783
2	Pelatihan Manajerial	0	6	6	8	0	0	20
3	Sertifikasi	2	13	45	7	37	3	107
4	Pelatihan Substansial	19	105	405	338	1.480	823	3.170
TOTAL		21	156	606	1.563	1.763	1.060	4.080

Tinjauan Rutin Pekerja dan Jenjang Karier [OJK F.22]

SPTP memberikan apresiasi kepada semua karyawan (100%) dengan melakukan penilaian prestasi kerja yang hasilnya disampaikan kepada karyawan. Penilaian dilakukan untuk mewujudkan keadilan, dukungan, serta menetapkan target pencapaian kepada seluruh karyawan. Dalam melakukan penilaian, Perseroan bertindak adil kepada semua pegawai dengan mendasarkan diri pada prestasi kerja tanpa membedakan jenis kelamin. [GRI 404-3]

Routine Worker Reviews and Career Paths [OJK F.22]

SPTP provides performance evaluations to all employees (100%), and the results are communicated to the employees. These evaluations are conducted to ensure fairness, support, and to set achievement targets for all employees. In performing these evaluations, the Company acts fairly towards all employees based on performance without discrimination based on gender. [GRI 404-3]

Penilaian kinerja karyawan merujuk pada Peraturan Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas No. KP.05.02./1/11/1/PSOR/SDMN/PLTP-22 tanggal 01 November 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu di Lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas dengan meratifikasi Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/15/8/1/KPIU/UTMA/PLND-22 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Sejak Oktober 2021, penilaian kinerja pegawai Perseroan dilaksanakan secara online di situs <https://my.pelindo.co.id/performance/login>. Kebijakan tersebut diambil agar penilaian kinerja pegawai menjadi lebih *real time* setelah pekerjaan selesai, ada *alignment* sehingga selaras dengan KPI unit dan direktorat, serta lebih obyektif.

Adapun penanggung jawab penilaian kinerja pegawai adalah Departemen Pengelolaan & Pembelajaran SDM di bawah Vice President Pengelolaan & Pembelajaran SDM. Hasil penilaian kinerja pegawai dapat digunakan dalam proses manajemen sumber daya manusia di lingkungan SPTP di antaranya menjadi pertimbangan promosi/mutasi/rotasi/demosi, pengembangan karier, perhitungan bonus, dan data talent management. [GRI 404-3]

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Kebebasan bagi karyawan untuk berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak normatif karyawan yang dijamin implementasinya oleh SPTP, termasuk di dalamnya mendirikan Serikat Pekerja. Adanya kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja merupakan kepatuhan Perseroan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan International Labour Organization (ILO) Convention 87. Regulasi tersebut mengatur tentang perlunya jaminan kebebasan bagi semua karyawan untuk masuk dalam organisasi pekerja yang dikelola secara profesional sebagai sarana penghubung antar karyawan dan perusahaan demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan semua pihak. Lebih dari itu, SPTP juga memberikan keleluasaan kepada karyawan yang menjadi pengurus serikat pekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan melaksanakan kegiatan organisasi Serikat Pekerja.

Employee performance evaluations are based on the Director's Regulation of PT Pelindo Terminal Petikemas No. KP.05.02./1/11/1/PSOR/SDMN/PLTP-22 dated November 1, 2022, on the Guidelines for Individual Performance Management within PT Pelindo Terminal Petikemas, ratifying the Director's Regulation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/15/8/1/KPIU/UTMA/PLND-22 dated August 15, 2022, on the Guidelines for Individual Performance Management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Since October 2021, employee performance evaluations have been conducted online via <https://my.pelindo.co.id/performance/login>. This policy was adopted to make performance evaluations more real-time after the completion of work, ensuring alignment with unit and directorate KPIs, and enhancing objectivity.

The responsibility for employee performance evaluations lies with the Human Resources Management & Learning Department under the Vice President of Human Resources Management & Learning. The results of these performance evaluations can be used in the human resources management process at SPTP, including considerations for promotions/mutations/rotations/demotions, career development, bonus calculations, and talent management data. [GRI 404-3]

Freedom of Association and Assembly

The freedom for employees to associate and assemble is one of the normative rights guaranteed by SPTP, including the establishment of a Labor Union. This freedom is in compliance with Law No. 21 of 2000 on Labor Unions and International Labour Organization (ILO) Convention 87. The regulation ensures that all employees have the freedom to join professionally managed worker organizations as a means of linking employees and the company to create a harmonious and mutually beneficial industrial relationship. Furthermore, SPTP also provides flexibility to employees who are union officials to fulfill their responsibilities by carrying out union activities.



Dalam konteks hubungan antara manajemen dengan karyawan, keberadaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi perangkat yang menegaskan komitmen bersama antara karyawan dan Perseroan dalam menciptakan iklim hubungan industrial harmonis dan berkeadilan. PKB bersifat mengikat dan melindungi karyawan SPTP. PKB juga menjadi acuan bersama dalam penyelesaian setiap perselisihan hubungan industrial dan ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selama tahun 2023 tidak ada laporan terkait tindakan atau kebijakan Perusahaan yang dapat digolongkan sebagai bentuk-bentuk penekanan terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat. Di sisi lain, sepanjang tahun 2023, hubungan industrial antara SPTP dengan karyawan melalui Serikat Pekerja telah berjalan dengan baik. [GRI 2-30]

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman [OJK F.21]

Penciptaan lingkungan kerja yang layak dan aman sesuai kaidah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan berbanding lurus dengan tingkat kinerja pegawai. Oleh karena itu, SPTP berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan lingkungan kerja terbaik dengan mematuhi regulasi yang berlaku, baik yang berkaitan dengan keselamatan kerja, kesehatan, maupun penyakit akibat kerja. Dengan upaya tersebut, Perseroan optimistis bisa mewujudkan tujuan penerapan K3, yaitu tidak ada kecelakaan kerja (*zero accident*) dan tidak terdapat penyakit akibat kerja. [GRI 3-3]

Kesehatan kerja menjadi fokus Perseroan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 99 (1), yang mengatur tentang upaya kesehatan kerja yang ditujukan untuk melindungi pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan Kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.

Sejalan dengan itu, keselamatan kerja juga mendapat perhatian SPTP karena hal tersebut sesuai dengan spirit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas

In the context of the relationship between management and employees, the Collective Labor Agreement (PKB) serves as a tool to reinforce the mutual commitment between employees and the Company to create a harmonious and fair industrial climate. The PKB is binding and protects SPTP employees. It also serves as a reference in resolving any industrial and labor disputes while adhering to the applicable laws and regulations in Indonesia.

Throughout 2023, there were no reports related to actions or company policies that could be classified as forms of repression against freedom of expression and association. On the other hand, throughout 2023, the industrial relations between SPTP and employees through the Labor Union have proceeded well. [GRI 2-30]

Decent and Safe Work Environment [OJK F.21]

Creating a decent and safe work environment in accordance with Occupational Health and Safety (OHS) principles directly correlates with employee performance levels. Therefore, SPTP strives to establish the best possible work environment by adhering to applicable regulations related to workplace safety, health, and occupational diseases. Through these efforts, the Company is optimistic about achieving the goals of OHS implementation, namely zero work accidents (*zero accidents*) and no occupational diseases. [GRI 3-3]

Occupational health is a focus for the Company as a form of compliance with the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2023 on Health, Article 99 (1), which regulates occupational health efforts aimed at protecting workers and others in the workplace to ensure healthy living and freedom from health disturbances and adverse effects caused by work.

In line with this, workplace safety also receives attention from SPTP, as it aligns with the spirit of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1970 on Occupational Safety, which states that every worker has the right to protection for their safety while performing their work for the welfare of life and to increase national production and productivity. Additionally, the safety of everyone



nasional, dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Berkaitan dengan implementasi K3, penyakit akibat kerja juga tidak diabaikan oleh Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, yang mendefinisikan penyakit akibat kerja sebagai penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

Prinsip-Prinsip K3 Perusahaan

Prinsip penerapan K3 di SPTP adalah "Zero Tolerance for Accident" yang bermakna bahwa SPTP berkomitmen untuk tidak menerima terjadinya insiden dengan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja sesuai kaidah-kaidah K3; serta dalam pengelolaan K3 di unit kerja diberlakukan sistem *reward* dan *punishment* ke seluruh insan SPTP.

Organ Pengelola K3 Perusahaan

SPTP menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) karena memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan

else present in the workplace must also be guaranteed. Concerning the implementation of OHS, occupational diseases are not overlooked by the Company. In this regard, the Company refers to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2019 on Occupational Diseases, which defines occupational diseases as diseases caused by work and/or the work environment.

Company OHS Principles

The principle of OHS implementation at SPTP is "Zero Tolerance for Accidents," meaning that SPTP is committed to preventing incidents by making every effort to prevent workplace accidents according to OHS principles. Additionally, in managing OHS at work units, a reward and punishment system is applied to all SPTP employees.

Company OHS Management

Body SPTP implements the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) because it meets the qualifications as stipulated in the Government Regulation on the Implementation of the Occupational Health and Safety Management System, as well as the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia on the Implementation of OHSMS Assessments. These



dan Kesehatan Kerja. Kualifikasi tersebut adalah mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. SMK3 diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Perseroan sehingga semua karyawan (100%) tercakup dalam sistem ini.

Adapun penerapan SMK3 bertujuan untuk: [GRI 403-1, 403-8]

- meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Selanjutnya, sebagai persyaratan penerapan SMK3, SPTP membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang menjadi wadah antara Perusahaan dan pegawai untuk bersama-sama menerapkan K3. Penanggung jawab penerapan SMK3 adalah pimpinan puncak Perusahaan, yaitu Direktur Utama untuk unit Kantor Pusat SPTP, dan *General Manager/Terminal Head* untuk Terminal/UPP.

P2K3 merupakan gugus tugas fungsional yang tugas pokoknya memberikan saran dan pertimbangan terkait permasalahan K3 kepada manajemen Perusahaan, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai bentuk integrasi, seluruh sistem manajemen telah diterapkan di Perusahaan, yaitu meliputi Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Keamanan dan Lingkungan (Sistem Manajemen MK4L). [GRI 403-4]

Struktur P2K3 digabungkan dengan struktur *Top Management* sebagai penanggung jawab penerapan sistem yang dimaksud. Penerapan Sistem Manajemen MK4L di Kantor Pusat menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja Kantor Pusat yang dikoordinir oleh Divisi Sistem Manajemen Mutu dan HSSE dibawah pimpinan koordinator *Top Management* dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (TM dan P2K3) yang melekat pada jabatan SVP Sistem Manajemen Mutu dan HSSE.

qualifications include employing at least 100 (one hundred) workers or having a high level of potential hazards. OHSMS is comprehensively applied within the Company, so all employees (100%) are covered by this system.

The implementation of OHSMS aims to: [GRI 403-1, 403-8]

- Improve the effectiveness of occupational health and safety protection that is planned, measured, structured, and integrated;
- Prevent and reduce workplace accidents and occupational diseases by involving management, workers, and/or labor unions; and
- Create a safe, comfortable, and efficient workplace to encourage productivity.

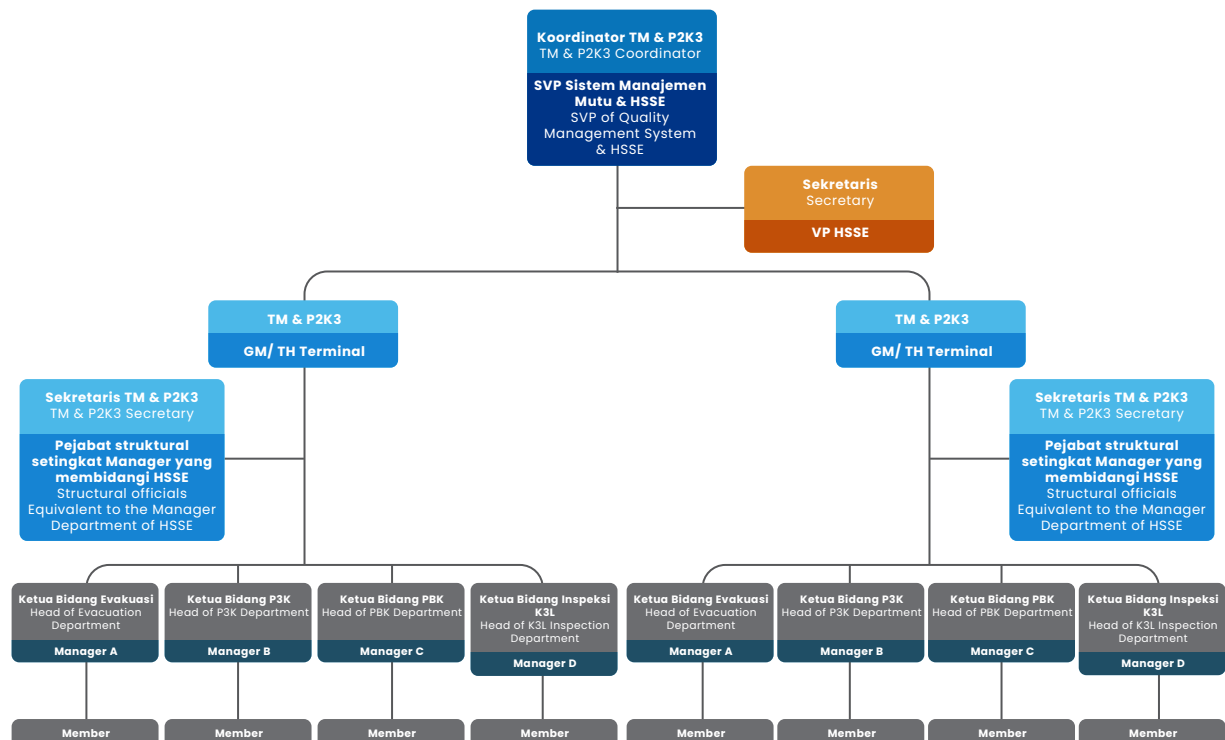
Furthermore, as a requirement for the implementation of OHSMS, SPTP established the Occupational Health and Safety Committee (P2K3), which serves as a forum between the Company and employees to jointly implement OHS. The responsibility for implementing OHSMS lies with the top leadership of the Company, namely the President Director for the SPTP Headquarters, and the General Manager/Terminal Head for Terminals/UPPs.

P2K3 is a functional task force whose main task is to provide advice and considerations related to OHS issues to the Company's management, whether requested or not. As a form of integration, all management systems have been implemented in the Company, including the Quality, Occupational Health and Safety, and Security and Environmental Management System (MK4L Management System). [GRI 403-4]

The P2K3 structure is combined with the Top Management structure as the entity responsible for implementing the system. The implementation of the MK4L Management System at the Headquarters is the responsibility of all Headquarters work units, coordinated by the Quality Management System and HSSE Division under the leadership of the Top Management coordinator and the Occupational Health and Safety Committee (TM and P2K3), which is attached to the SVP of Quality Management System and HSSE.

Pada Terminal/UPP, penerapan Sistem Manajemen MK4L menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja terminal yang dikoordinir oleh Unit HSSE di bawah pimpinan TM dan P2K3 dari terminal terkait. Struktur TM dan P2K3 selengkapnya digambarkan dalam bagan berikut:

At the Terminal/UPP level, the implementation of the MK4L Management System is the responsibility of all terminal work units, coordinated by the HSSE Unit under the leadership of TM and P2K3 from the relevant terminal. The complete TM and P2K3 structure is depicted in the following chart:



Standar K3 yang Dimiliki

SPTP berkomitmen untuk melaksanakan secara konsisten pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dan efisien dengan cara:

- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Minimalisasi terjadinya penyakit akibat kerja dan nihilnya ancaman keamanan dan kecelakaan kerja;
- Menumbuhkan kesadaran kerja yang mengutamakan kaidah-kaidah K3;
- Melibatkan seluruh komponen Perusahaan ikut bertanggung jawab atas terlaksananya program K3 agar tercapainya kinerja usaha yang optimal;
- Mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dalam bidang Jasa Kepelabuhanan, terutama yang berkaitan dengan aspek K3.

OHS Standards in Place

SPTP is committed to consistently implementing effective and efficient Occupational Health and Safety (OHS) management by:

- Implementing the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) in accordance with applicable regulations;
- Minimizing the occurrence of occupational diseases and eliminating security threats and workplace accidents
- Fostering a work culture that prioritizes OHS principles;
- Involving all Company components in taking responsibility for the implementation of OHS programs to achieve optimal business performance;
- Complying with laws and other requirements in the Port Services sector, particularly those related to OHS aspects.



Selaras dengan komitmen untuk memenuhi regulasi yang berlaku, SPTP memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilaksanakan secara aman dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi SPTP No. PER.0036/SM.04/PLTP-2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kebijakan Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan. Perusahaan juga menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di 7 terminal dan 1 unit kantor pusat di lingkungan Perusahaan. Berikut adalah daftar terminal yang telah menerapkan SMK3 beserta nomor sertifikatnya:

In line with its commitment to comply with applicable regulations, SPTP ensures that all operational activities are conducted safely by applying high standards to Occupational Health and Safety (OHS) aspects, as stipulated in the Decision of the Board of Directors of SPTP No. PER.0036/SM.04/PLTP-2021 dated December 30, 2021, concerning Quality, Occupational Health and Safety, Security, and Environmental Policies. The Company also implements the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) at 7 terminals and 1 head office unit within the Company. Below is the list of terminals that have implemented SMK3 along with their certificate numbers:

Sertifikat SMK3

Sertifikat SMK3

OHS Management System Certificate

No	Cabang Terminal Terminal Branch	Auditor Auditor	Nomor Sertifikat Certificate Number	Masa Berlaku Validity Period
1	Kantor Pusat Head Office	PT. Sapta Mutu Utama	REG.SMK3.2023.SMU.SK-1668	Juni/ June 2026
2	TPK. Nilam	PT. Sapta Mutu Utama	REG.SMK3.2023.SMU.SK-1744	Juni/ June 2026
3	TPK. Semarang	PT. Sapta Mutu Utama	REG.SMK3.2023.SMU.SK-1745	Juni/ June 2026
4	TPK. Banjarmasin	PT. Sapta Mutu Utama	SKA Nomor 5/827/AS.01.03/V/2023	Juni/ June 2026
5	TPK. Belawan	PT. Sapta Mutu Utama	SKA Nomor 5/244/AS.01.03/II/2023	Juni/ June 2026
6	TPK. Makassar	PT. Sapta Mutu Utama	REG.SMK3.2023.SMU.SK-1736	Juni/ June 2026
7	TPK. Ambon	PT. Sapta Mutu Utama	SKA Nomor 5/257/AS.01.03/II/2023	Juni/ June 2026
8	TPK. Bitung	PT. Sapta Mutu Utama	REG.SMK3.2023.SMU.SK-1746	Juni/ June 2026
9	TPK Kendari	PT. Sapta Mutu Utama	SKA Nomor 5/234/AS.01.03/II/2024	Juni/ June 2027
10	TPK Pantoloan	PT. Sapta Mutu Utama	SKA Nomor 5/233/AS.01.03/II/2024	Juni/ June 2027
11	TPK Perawang	PT. Sapta Mutu Utama	SKA Nomor 5/232/AS.01.03/II/2024	Juni/ June 2027
12	TPK Kupang	PT. Sapta Mutu Utama	SKA Nomor 5/231/AS.01.03/II/2024	Juni/ June 2027
13	TPK Tarakan	PT. Sapta Mutu Utama	SKA Nomor 5/235/AS/01/03/II/2024	Juni/ June 2027
14	TPK Jayapura	PT. Sapta Mutu Utama	SKA Nomor 5/240/AS.01.03/II/2024	Juni/ June 2027
15	TPK Sorong	PT. Sapta Mutu Utama	SKA Nomor 5/631/AS.01.03/III/2024	Juni/ June 2027

SMK3 Certificates

Fasilitas K3 yang Dimiliki

OHS Facilities in Place

No	Data Sarana dan Prasarana K3 OHS Infrastructure and Facilities Data	Jumlah Quantity	Masa Berlaku Validity Period
1	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah Low Voltage Electrical Power Utilization Installation	1 unit	Sertifikat Laik Operasi dikeluarkan oleh PT Intek Electrical Indonesia, berlaku s.d. 23 Agustus 2035. Operating Worthiness Certificate issued by PT Intek Electrical Indonesia, valid until August 23, 2035.
2	Pesawat Angkat dan Angkut Gondola Gondola Lift and Transport Equipment	2 unit	Surat Keterangan dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Certificate of Statement issued by the East Java Provincial Department of Manpower and Transmigration, valid as long as there are no changes to the object of testing and/or until the next testing is conducted in accordance with the applicable regulations.
3	Elevator Elevator	11 unit	Surat Keterangan dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Certificate of Statement issued by the East Java Provincial Department of Manpower and Transmigration, valid as long as there are no changes to the object of testing and/or until the next testing is conducted in accordance with the applicable regulations.
4	Eskalator Escalator	6 unit	Surat Keterangan dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Certificate of Statement issued by the East Java Provincial Department of Manpower and Transmigration, valid as long as there are no changes to the object of testing and/or until the next testing is conducted in accordance with the applicable regulations.
5	Instalasi Penyalur Petir Lightning Protection Installation	1 unit	Surat Keterangan dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Certificate of Statement issued by the East Java Provincial Department of Manpower and Transmigration, valid as long as there are no changes to the object of testing and/or until the next testing is conducted in accordance with the applicable regulations.
6	Instalasi Tenaga Pembangkit Listrik Electric Power Generation Installation	2 unit	Sertifikat laik operasi dikeluarkan oleh PT. Sabda Duta Paramitha, berlaku s.d 31 Agustus 2025. Operating Worthiness Certificate issued by PT Sabda Duta Paramitha, valid until August 31, 2025.

Fasilitas K3 yang Dimiliki
OHS Facilities in Place

No	Data Sarana dan Prasarana K3 OHS Infrastructure and Facilities Data	Jumlah Quantity	Masa Berlaku Validity Period
7	Alat pelindung diri dan perlengkapan K3 - Rompi paramedik/tanggap darurat, helm paramedik/tanggap darurat. - Lampu senter, alat bantu pernafasan, kotak P3K, police line, respirator. Personal Protective Equipment and OHS Supplies - Paramedic/emergency response vests, paramedic/emergency response helmets. - Flashlights, breathing apparatus, first aid kits, police lines, respirators.		
8	Pelayanan Kesehatan Kerja - Pemeriksaan kesehatan medical check- up kepada seluruh pekerja Kantor Pusat KP.21.02/14/11/1/HLTH/SDMN/PLTP-22 - Fasilitas klinik K3 yang terdapat di 15 terminal di wilayah kerja SPTP Occupational Health Services - Medical check-ups for all employees at the Head Office KP.21.02/14/11/1/HLTH/SDMN/PLTP-22. - OHS clinic facilities located at 15 terminals within SPTP's operational areas.		
9	Fasilitas Kesejahteraan (kantin/ruang makan, tempat ibadah, rekreasi, dan lain-lain). - Disediakan fasilitas kantin/ruang makan di area kantin. - Disediakan fasilitas tempat ibadah di gedung per lantai serta masjid. Welfare Facilities (canteens/dining areas, places of worship, recreation, etc.) - Canteens/dining areas are provided in the canteen area. - Places of worship are available on each floor of the building and a mosque.		
10	SOP (Standard Operasional Prosedur) - Permit/izin bekerja bagi mitra kerja di kantor pusat berkaitan dengan bekerja di ketinggian, akses tegangan tinggi, menggali membongkar, by pass sistem sudah tersedia SOP (Standard Operating Procedures) - Work permits/permissions for partners at the head office related to working at heights, high voltage access, digging, dismantling, and bypass systems are available.		
11	Rambu Rambu-rambu sudah dibuat dan ditempatkan baik di gedung, area CY, akses jalan dan dermaga. Signage Signage has been created and placed in buildings, CY areas, road access, and docks.		

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

SPTP menyadari bahwa pegawai adalah mitra Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi setiap tenaga kerja. Dalam hal ini, Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Seiring dengan komitmen tersebut, Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja, serta selalu mengusahakan agar pekerja memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan selalu memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Komitmen Perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja pegawai telah dituangkan dalam Peraturan Direksi No. PER.0036/SM.04/PLTP-2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kebijakan Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan. Melalui keputusan tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk:

- Membangun Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sebagai landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3.
- Menetapkan dan mengkaji sasaran, melakukan penilaian dan pelaporan kinerja SMK3.
- Memberikan dukungan penuh terhadap penerapan SMK3 di lingkungan Perusahaan dalam upaya memberikan perlindungan optimal kepada pegawai dari gangguan dan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan
- Memastikan pemahaman yang lebih baik oleh pekerja dan mitra kerja mengenai masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan aktivitas Perusahaan.
- Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan SMK3.
- Menempatkan SMK3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP dan laporan tahunan.
- Menyertakan partisipasi pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan SMK3.

Occupational Health and Safety (OHS)

SPTP recognizes that employees are partners in running the company's business activities. Therefore, the company is committed to always prioritizing occupational health and safety for every worker. The company acknowledges that the management of occupational health and safety is crucial to the company's long-term success.

In line with this commitment, the company consistently takes appropriate actions to prevent accidents and health issues in the workplace and strives to provide workers with a safe and healthy work environment. To achieve this, the company ensures that its assets, business locations, and other facilities comply with the applicable regulations concerning occupational health and safety.

The company's commitment to employee health and safety has been formalized in the Directors' Regulation No. PER.0036/SM.04/PLTP-2021 dated December 30, 2021, regarding Quality, Occupational Health and Safety, Security, and Environmental Policies. Through this decision, the company commits to:

- Establishing an Occupational Health and Safety Management System (SMK3) as a foundation for compliance with OHS laws and regulations.
- Setting and reviewing targets, assessing, and reporting SMK3 performance.
- Fully supporting the implementation of SMK3 within the company to provide optimal protection for employees from risks and hazards that may threaten safety.
- Ensuring better understanding by workers and partners regarding health and safety issues related to the company's activities.
- Striving for continuous improvement in all aspects related to SMK3.
- Integrating SMK3 as an inseparable part of the RKAP and annual report.
- Involving employee participation as part of the effort to improve SMK3 implementation.





Rencana Program K3 dan Pelaksanaannya Tahun 2023

Pada tahun 2023, TM dan P2K3 SPTP telah menyusun program dan melaksanakan program tersebut untuk mendukung implementasi K3 secara optimal, baik kegiatan berkala maupun kegiatan rutin. Program K3 dan pelaksanaannya selama tahun pelaporan adalah sebagai berikut: [GRI 403-5, 403-7]

OHS Program Plan and Implementation for 2023

In 2023, TM and P2K3 SPTP have developed and implemented programs to optimally support the implementation of OHS, including both regular and routine activities. The OHS program and its implementation during the reporting year are as follows: [GRI 403-5, 403-7]

Tabel Program K3 dan Realisasi Tahun 2023
 OHS Program Table and Realization in 2023

Program Kerja Work program	Target/Tujuan Target/Objective	Realisasi Realization	
		Tanggal/Bulan/Lokasi Date/Month/Location	Jumlah Peserta Number of participants
Awareness TKBM	Membangun <i>safety culture</i> Building a <i>safety culture</i>	Februari 2023 / 35 Terminal February 2023 / 35 Terminals	850

Pemetaan Risiko Kerja dan Mitigasi Risiko

SPTP melakukan pemetaan risiko kerja sebagai upaya untuk mengetahui tingkat risiko terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan Perseroan. Pemetaan dilakukan karena kegiatan usaha di Perseroan memiliki risiko terjadinya kecelakaan kerja. Dalam hal ini, sekecil apapun risiko terjadinya kecelakaan kerja harus diantisipasi.

Work Risk Mapping and Risk Mitigation

SPTP conducts work risk mapping to assess the level of risk of workplace accidents within the company. Mapping is carried out because the company's business activities carry the risk of workplace accidents. In this regard, even the smallest risk of workplace accidents must be anticipated. In addition to causing direct harm

Selain menimbulkan kerugian secara langsung bagi korban, kecelakaan kerja juga berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih besar, seperti menurunnya reputasi perusahaan, hilangnya jam dan hari kerja, menimbulkan tuntutan hukum dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan pemetaan tersebut, Perseroan menyusun perencanaan program K3 yang sesuai sehingga kecelakaan kerja bisa dihindari. [GRI 403-2]

Program Peningkatan Keselamatan Kerja

Untuk mendukung terwujudnya keselamatan kerja, SPTP melengkapi kantor dan terminal petikemas dengan berbagai sarana dan sarana kelengkapan kerja serta mengecek fungsi sarana dan prasarana tersebut secara berkala. Selain alat pelindung K3, Perseroan juga menyiapkan kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), *emergency box*, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hydrant, dan sebagainya. Selain penyediaan sarana dan prasarana, Perseroan secara berkala juga melakukan simulasi menghadapi kondisi atau kegawatan tertentu, seperti tanggap gawat darurat kebakaran, gempa bumi, tumpahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Selaras dengan itu, Perseroan juga melaksanakan berbagai program sebagai berikut: [GRI 403-5]

- a) Kegiatan yang bersifat preventif, antara lain:
 - Pencanangan budaya K3 di lingkungan kerja,
 - Pemberian penghargaan K3,
 - Konvensi/Seminar/Lokakarya/Semiloka,
 - Pembentukan tim investigasi kecelakaan kerja,
 - Melaksanakan kegiatan Bulan K3 dengan tema yang sudah ditentukan oleh
 - Pemerintah setiap tahunnya,
 - Peningkatan kompetensi bidang K3 dan lingkungan kepada pekerja.
- b) Kegiatan yang bersifat promotif, antara lain:
 - Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul, dan baliho K3,
 - Pameran K3,
 - Sosialisasi dan publikasi K3,
 - Aksi sosial K3,
 - Cerdas cermat K3.
- c) Kegiatan yang bersifat implementatif, antara lain:
 - Penilaian penghargaan K3,
 - Pembinaan dan pengujian lisensi,
 - Pemeriksaan dan/atau pengujian objek K3,

to victims, workplace accidents can also have far-reaching impacts, such as damaging the company's reputation, resulting in lost work hours and days, legal liabilities, and more. Based on this mapping, the company develops an appropriate OHS program plan to prevent workplace accidents. [GRI 403-2]

Workplace Safety Improvement Program

To support workplace safety, SPTP equips its offices and container terminals with various work safety facilities and regularly checks their functionality. In addition to OHS protective equipment, the company also provides First Aid Kits (P3K), *emergency boxes*, Fire Extinguishers (APAR), hydrants, and more. Besides providing these facilities, the company also regularly conducts drills to handle specific emergency situations, such as fire emergencies, earthquakes, and hazardous and toxic waste spills. In line with this, the company also implements the following programs: [GRI 403-5]

- a) Preventive Activities include:
 - Launching a K3 (Occupational Health and Safety) culture in the workplace,
 - Providing K3 awards,
 - Holding conventions/ seminars/workshops,
 - Forming a workplace accident investigation team,
 - Conducting K3 Month activities with themes determined annually by the government,
 - Enhancing K3 and environmental competence for workers.
- b) Promotional Activities include:
 - Installing K3 flags, banners, pennants, and billboards,
 - Holding K3 exhibitions,
 - Conducting K3 awareness and publication campaigns,
 - Organizing K3 social actions,
 - Holding K3 quiz competitions.
- c) Implementative Activities include:
 - K3 award assessments,
 - Training and licensing examinations,
 - Inspection and/or testing of K3 objects,
 - Handling workplace accident cases,



- Penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja,
- Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja,
- Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja,
- Operasi tertib di bidang K3

Program Peningkatan Kesehatan Kerja [GRI 403-3, 403-6]

Kesungguhan SPTP mewujudkan lingkungan kerja terbaik tak hanya dilakukan dengan menyediakan sarana dan sarana fisik, tetapi juga dilengkapi dengan penyediaan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) secara berkala untuk karyawan. Program ini dilakukan sebagai upaya preventif/mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Perseroan juga memberikan perlindungan kerja dengan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pekerja Perseroan diberikan secara berkala. Apabila terbukti bahwa pekerja menderita sakit akibat hubungan kerja, maka Perseroan akan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, per 31 Desember 2023, Perseroan tidak menerima laporan tentang penyakit akibat kerja. [GRI 403-10]

Selain pemeriksaan berkala, SPTP menyelenggarakan berbagai program untuk meningkatkan kesehatan kerja karyawan sebagai berikut:

- *Medical check up* secara berkala;
- Melakukan *health risk assessment* di masing-masing unit kerja sesuai potensi bahayanya terhadap kesehatan;
- Memastikan ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri yang benar dan sesuai standar;
- Monitoring dan pengukuran Lingkungan kerja;
- Sertifikasi hygiene Lokasi kerja dan pendukung seperti kantin dll;
- Memberikan sosialisasi/penyuluhan kesehatan kerja;
- Program olahraga;
- Menyediakan fasilitas olah raga.

- Conducting health checks for workers,
- Measuring and testing the work environment,
- Conducting orderly operations in the K3 field.

Work Health Improvement Program [GRI 403-3, 403-6]

SPTP's commitment to creating the best working environment goes beyond providing physical facilities; it also includes regular health check-ups (medical check-ups) for employees. This program is conducted as a preventive effort to avoid occupational diseases. The company also provides job protection by enrolling all employees in BPJS Employment and BPJS Health.

Health examination facilities are provided regularly for all employees of the company. If it is proven that an employee suffers from a work-related illness, the company will be responsible according to applicable laws and regulations. However, as of December 31, 2023, the company has not received any reports of work-related illnesses. [GRI 403-10]

In addition to regular check-ups, SPTP implements various programs to enhance employee health at work, including:

- Regular medical check-ups;
- Conducting health risk assessments in each work unit according to potential health hazards;
- Ensuring the availability and correct use of personal protective equipment according to standards;
- Monitoring and measuring the work environment;
- Certifying the hygiene of work locations and support facilities such as canteens;
- Providing health work socialization/education;
- Sports programs;
- Providing sports facilities.

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Program K3

Per 31 Desember 2023, SPTP mengeluarkan dana untuk pelaksanaan program K3 sebesar Rp12.575.000.000.

Pengaduan Masalah K3 dan Tindak Lanjut

SPTP menghargai hak karyawan untuk mendapatkan layanan terbaik terkait K3. Sebab itu, Perseroan memberi kesempatan kepada karyawan –juga pemangku kepentingan yang lain–untuk menyampaikan pengaduan apabila ada layanan K3 yang tidak sesuai dengan harapan mereka.

Kinerja K3 Tahun 2023

Selama tahun pelaporan, manajemen dan karyawan SPTP telah menerapkan budaya K3 secara konsisten guna meraih kinerja K3 terbaik. Upaya tersebut membuahkan hasil kinerja K3 sebagai berikut:[GRI 403-9]

Funding Allocation for OHS Program Implementation

As of December 31, 2023, SPTP allocated IDR 12,575,000,000 for the implementation of the OHS (Occupational Safety and Health) program.

OHS Issues Complaints and Follow-up

SPTP values employees' rights to receive the best services related to OHS. Therefore, the company provides opportunities for employees—and other stakeholders—to file complaints if OHS services do not meet their expectations.

OHS Performance in 2023

During the reporting year, the management and employees of SPTP consistently applied OHS culture to achieve the best OHS performance. These efforts resulted in the following OHS performance outcomes: [GRI 403-9]

Tingkat Kecelakaan Kerja Tahun 2021–2023

Work Accident Rate for 2021–2023

Kategori Kecelakaan Accident Category	2023	2022	Upaya untuk mengurangi Kecelakaan Efforts to Reduce Accidents	
Kerusakan properti Property Damage	8	-	-	-
Cidera Ringan Minor Injuries	3	2	Pelatihan K3	OHS Training
Cidera Sedang Moderate Injuries	1	4	Teknik Investigasi Kecelakaan	Accident Investigation Techniques
Cidera Berat Severe Injuries	1	0	Penilaian Risiko dan Perbaikan Berkelanjutan	Risk Assessment and Continuous Improvement
Meninggal Fatalities	0	0	Perbaikan Sistem dan Prosedur	System and Procedure Improvements

Insiden K3 di Cabang Terminal 2021–2023

K3 Incidents at Terminal Branches 2021–2023

No	Cabang Branch	2023			2022		
		Cedera Injuries	Meninggal Fatalities	Kerusakan Properti Property Damage	Cedera Injuries	Meninggal Fatalities	Kerusakan Properti Property Damage
1	TPK Nilam	0	0	0	0	0	2
2	TPK Semarang	2	0	1	1	0	4
3	TPK Banjarmasin	0	0	1	0	0	3
4	TPK Belawan	0	0	0	1	0	2

Insiden K3 di Cabang Terminal 2021-2023

K3 Incidents at Terminal Branches 2021-2023

No	Cabang Branch	2023			2022		
		Cedera Injuries	Meninggal Fatalities	Kerusakan Properti Property Damage	Cedera Injuries	Meninggal Fatalities	Kerusakan Properti Property Damage
5	TPK Ambon	0	0	1	1	0	0
6	TPK New Makassar	2	0	1	1	0	5
7	TPK Bitung	0	0	0	0	0	1
8	TPK Perawang	0	0	1	0	0	0
9	TPK Pantoloan	0	0	1	1	0	0
10	TPK Kendari	0	0	0	0	0	0
11	TPK Sorong	0	0	0	1	0	0
12	TPK Kupang	0	0	1	0	0	0
13	TPK Jayapura	0	0	0	0	0	1
14	TPK Tarakan	1	0	1	0	0	0
Jumlah		5	0	8	6	0	18

Khusus mengenai penyakit akibat kerja, pada tahun pelaporan, Perseroan tidak menerima laporan adanya karyawan yang mengalami penyakit akibat kerja. [GRI 403-10]

Regarding occupational diseases, during the reporting year, the company did not receive any reports of employees experiencing occupational diseases. [GRI 403-10]

Hasil Audit SMK3 Tahun 2023

SPTP melakukan audit SMK3 sebagai bentuk kepatuhan terhadap berbagai regulasi, terkhusus Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Audit dilakukan untuk mengukur hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di Perseroan. Selanjutnya, sesuai hasil audit SMK3 tersebut, SPTP telah melakukan tindak lanjut dan koreksi sesuai dengan masing-masing kriteria dan dalam kurun waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

SMK3 Audit Results for 2023

SPTP conducted an SMK3 audit as part of its compliance with various regulations, particularly the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 26 of 2014 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management System (SMK3) Assessment. The audit was conducted to measure the results of planned and implemented activities in the application of SMK3 within the Company. Following the SMK3 audit results, SPTP has taken corrective actions according to each criterion and within the timeframe specified by applicable regulations.

Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar [OJK F.23]

Perseroan berkomitmen menjalankan usaha dengan memenuhi semua regulasi yang berlaku, baik di bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial. Komitmen itu dibangun karena SPTP tidak ingin keberadaannya berdampak negatif terhadap masyarakat. Di sisi lain, Perseroan berharap kehadirannya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Impact of Operations on Surrounding Communities [OJK F.23]

The Company is committed to conducting business in compliance with all applicable regulations, whether in the economic, environmental, or social fields. This commitment stems from SPTP's desire to avoid any negative impact on the community. Conversely, the Company hopes its presence brings maximum benefits to the community.



Sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan Perseroan, operasional usaha SPTP tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Justru sebaliknya, masyarakat mendapat dampak positif atas keberadaan Perseroan. Selain menyediakan lapangan kerja dan membuka kesempatan sebagai pemasok barang dan jasa, masyarakat juga memetik manfaat dari penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang jenis dan bentuk kegiatannya disesuaikan dengan harapan/kebutuhan masyarakat.

Pengaduan Masyarakat [OJK F.24][GRI 2-25]

Dalam menjalankan usaha, SPTP berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang berlaku guna meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Walau demikian, sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat, Perseroan membuka diri terhadap kemungkinan adanya pengaduan dari masyarakat yang terdampak oleh operasional SPTP dan berkomitmen untuk menyelesaikan pengaduan tersebut secepatnya. Perseroan menyediakan mekanisme pengaduan melalui kanal *whistleblowing system* (WBS), website, email maupun media sosial. Semua pengaduan akan ditindaklanjuti Perseroan dengan melakukan verifikasi atas keluhan yang diterima.

According to the Company's evaluation results, SPTP's business operations do not have a negative impact on the community. On the contrary, the community benefits positively from the Company's presence. In addition to providing employment opportunities and opening opportunities as suppliers of goods and services, the community also benefits from the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL), with the types and forms of activities tailored to the community's expectations/needs.

Community Complaints [OJK F.24][GRI 2-25]

In conducting its business, SPTP is committed to complying with all applicable regulations to minimize negative impacts on the community and environment. However, as part of fulfilling its responsibilities to the community, the Company remains open to the possibility of receiving complaints from communities affected by SPTP's operations and is committed to resolving these complaints promptly. The Company provides a complaint mechanism through the whistleblowing system (WBS), website, email, and social media. All complaints will be followed up by the Company by verifying the received complaints.

Selain pengaduan bagi masyarakat, secara spesifik, Perseroan juga memberikan fasilitas dan kanal keluhan untuk pelanggan dengan hasil penanganan tahun 2023 sebagai berikut:

In addition to complaints from the community, the Company also specifically provides facilities and complaint channels for customers, with the following results for 2023:

No	Terminal Petikemas Container Terminal	Status Keluhan Pelanggan Customer Complaint Status	
		Ditutup Closed	Jumlah Total
1	PT TPS	5.769	5.769
2	TPK Ambon	162	162
3	TPK Banjarmasin	720	720
4	TPK Belawan	1699	1699
5	TPK Bitung	19	19
6	TPK Jayapura	5	5
7	TPK Kendari	4	4
8	TPK Kupang	27	27
9	TPK New Makassar	2054	2054
10	TPK Nilam	12	12
11	TPK Pantoloan	22	22
12	TPK Perawang	4	4
13	TPK Semarang	784	784
14	TPK Sorong	1	1
15	TPK Tarakan	1	1
Jumlah/Total		11.283	11.283

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) [OJK F.25]

Keberadaan SPTP menjalankan usaha di bidang manajemen terminal peti kemas tidak semata-mata mengejar keuntungan. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tujuan pendirian Perseroan juga memiliki nilai luhur, yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sebab itu, sesuai dengan tujuan pendiriannya, maka Perseroan berupaya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, sekaligus tetap mengukuhkan komitmennya untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), koperasi, dan masyarakat di sekitarnya.

Kontribusi BUMN dalam pemberdayaan terhadap UMKM, koperasi dan masyarakat dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social Responsibility (TJSL) Activities [OJK F.25]

SPTP's presence in the container terminal management business is not solely for profit. As part of a State-Owned Enterprise (BUMN), the Company's founding also carries a noble value: to actively provide guidance and assistance to small economic entrepreneurs, cooperatives, and the community. Therefore, in line with its founding goals, the Company strives to achieve maximum profits while reaffirming its commitment to empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), cooperatives, and surrounding communities.

The contribution of BUMNs in empowering MSMEs, cooperatives, and communities is reinforced by the issuance of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Corporate Social and

Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan terbaru tersebut, BUMN bisa menerapkan TJSL melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau Program Pendanaan UMK, serta Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya, termasuk Pembinaan.

Peraturan baru yang terbit dan mulai berlaku pada 24 Maret 2023 itu menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan regulasi terbaru, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSL BUMN) adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Spirit program ini sejalan dengan TJSL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Secara faktual, Program TJSL di SPTP telah berjalan sejak Oktober 2021. Pelaksanaan program ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam berperan mendorong, serta meningkatkan pemberdayaan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan agar semakin sejahtera. Serangkaian program telah dilaksanakan Perseroan dengan mengakomodasi kepentingan pihak masyarakat di lingkungan kerja perusahaan, antara lain bantuan pembinaan seperti pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, bantuan sosial, bantuan ibadah keagamaan, dan penghijauan yang dapat diakses oleh publik maupun penyempurnaan infrastruktur yang dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.

Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises. Under the latest regulation, BUMNs can implement TJSL through Micro and Small Business Funding Programs or UMK Funding Programs, as well as other assistance and/or activities, including training.

The new regulation, which was issued and came into effect on March 24, 2023, replaces the previous regulation, namely the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 on Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises, as amended by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-6/MBU/09/2022 on Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 on Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.

In accordance with the latest regulations, the Corporate Social and Environmental Responsibility Program of BUMNs (BUMN TJSL Program) is an activity that reflects the commitment and dedication of BUMNs to sustainable development by providing benefits to the economy, society, environment, as well as legal and governance aspects with a more integrated, targeted, measurable impact, and accountable approach, making it a part of the company's business strategy. The spirit of this program aligns with TJSL as regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which is further implemented by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.

In practice, the TJSL Program at SPTP has been ongoing since October 2021. The implementation of this program has made significant contributions to encouraging and enhancing the empowerment of the social and economic conditions of the community and environment, leading to greater prosperity. The Company has carried out a series of programs that accommodate the interests of the community within the company's work environment, including training assistance, provision of facilities and infrastructure, social assistance, religious worship assistance, and greening projects accessible to the public, as well as the improvement of infrastructure that can be widely used by the community.



Program TJSL direalisasikan SPTP melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan *sponsorship*. Program CSR lebih menekankan pada pembangunan sosial dan mengembangkan potensi masyarakat yang kemudian diarahkan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan sehingga dapat menciptakan peluang-peluang usaha, menyerap tenaga kerja, serta menata lingkungan dengan lebih baik. Pelaksanaan berbagai program tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya dan dukungan masyarakat atas kehadiran Perusahaan. Sedangkan *sponsorship* ditujukan untuk mempublikasikan nama Perusahaan agar dapat memperkuat citra sehingga proses bisnis yang dilakukan SPTP dapat berkelanjutan.

Dalam melaksanakan program TJSL, SPTP berkoordinasi juga dengan Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelindo Kantor Pusat. Koordinasi dilakukan agar penyaluran dana dapat mendukung upaya Perusahaan dalam menunjang program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten.

Struktur Pengelola TJSL [GRI 3-3]

Mengacu pada Peraturan Direksi No. HK.01/1/8/1/PSOR/SDMN/PLTP-22 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kantor Pusat PT Pelindo Terminal Petikemas, Unit Kerja Departemen TJSL melekat pada Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan Direktur SDM sebagai Direktur Pembina TJSL.

Per 31 Desember 2023, pelaksana kegiatan TJSL di Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

- Direktur SDM: Edi Priyanto
- SVP Sekretaris Perusahaan: Widyas Wendra
- VP TJSL: Herry Wismanto
- Staf: Eka Cahyani, Kharis Fauzi, Dina Herdaningrum dan Luqman Firmansyah

Program TJSL dilakukan secara tersentralisasi di kantor pusat dan pelaksanaan penyalurannya mengutamakan wilayah sekitar Perusahaan termasuk terminal.

Gambaran Umum Program TJSL [GRI 3-3]

Program TJSL dilaksanakan SPTP sebagai bentuk kepedulian Perseroan terhadap

The TJSL Program is realized by SPTP through its CSR (*Corporate Social Responsibility*) and *sponsorship* programs. The CSR program emphasizes social development and the development of community potential, which is then directed towards the development of a people's economy, creating business opportunities, absorbing labor, and organizing the environment more effectively. The implementation of these various programs is expected to foster trust and support from the community for the Company's presence. Meanwhile, *sponsorship* is aimed at publicizing the Company's name to strengthen its image so that SPTP's business processes can be sustainable.

In implementing the TJSL program, SPTP also coordinates with the Social and Environmental Responsibility Unit of Pelindo's Head Office. This coordination ensures that fund distribution supports the Company's efforts in supporting government programs to improve community welfare and enhance harmonious relationships and cooperation with local/regional governments.

TJSL Management Structure [GRI 3-3]

Referring to the Board of Directors Regulation No. HK.01/1/8/1/PSOR/SDMN/PLTP-22 dated August 1, 2022, concerning the Organization Structure and Governance of the Head Office of PT Pelindo Terminal Petikemas, the TJSL Department Unit is attached to the Corporate Secretary and directly reports to the President Director, with the HR Director serving as the TJSL Supervisory Director.

As of December 31, 2023, the TJSL program implementers at the Head Office are as follows:

- HR Director: Edi Priyanto
- SVP Corporate Secretary: Widyas Wendra
- VP TJSL: Herry Wismanto
- Staff: Eka Cahyani, Kharis Fauzi, Dina Herdaningrum, and Luqman Firmansyah

The TJSL program is centrally managed at the head office, with implementation focused on the areas surrounding the Company, including the terminal.

Overview of the TJSL Program [GRI 3-3]

The TJSL Program is implemented by SPTP as a form of the Company's concern for the



kondisi sosial masyarakat di lingkungan kerja perusahaan. Melalui program TJSL diharapkan kondisi masyarakat dapat diberdayakan dan dikembangkan menuju kemandirian secara bersinergi.

Bagi Perseroan, pelaksanaan program TJSL diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembentukan *corporate image* dan opini masyarakat terhadap eksistensi perusahaan. Dengan demikian, dalam jangka panjang, dapat tercipta iklim yang kondusif terhadap kegiatan usaha dan pengamanan aset perusahaan (*assets safeguarding*).

Program TJSL perusahaan dilaksanakan berdasarkan 4 pilar utama, yaitu:

- Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
- Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
- Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
- Hukum dan Tata Kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

social conditions of the communities within the company's work environment. Through the TJSL program, the Company aims to empower and develop the community toward self-sufficiency in a synergistic manner.

For the Company, the implementation of the TJSL program is expected to contribute positively to shaping corporate image and public opinion about the Company's existence. In the long term, this can create a conducive environment for business activities and asset safeguarding.

The Company's TJSL program is implemented based on four main pillars:

- Social, To achieve the fulfillment of quality basic human rights in an equitable and equal manner to improve the welfare of all communities.
- Environment, For the sustainable management of natural resources and the environment, supporting all life forms.
- Economy, To achieve quality economic growth through sustainable job and business opportunities, innovation, inclusive industries, adequate infrastructure, affordable clean energy, and supported partnerships.
- Law and Governance, To realize legal certainty and effective, transparent, accountable, and participatory governance to create security stability and achieve a rule-of-law-based state.



Sasaran program TJSL adalah masyarakat sekitar Perusahaan dengan sifat bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Melalui pelaksanaan program tersebut diharapkan bisa menciptakan pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset perusahaan.

Visi, Misi serta Sasaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan [GRI 3-3]

SPTP sebagai terminal yang berwawasan lingkungan tidak bisa lepas dari keberadaannya sebagai entitas sosial (*corporate citizenship*) yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan Perseroan selayaknya memberikan manfaat bagi lingkungan, terutama masyarakat yang berada di sekitar aktivitas usahanya.

Menyadari hal tersebut, SPTP berkewajiban memberikan perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan menyusun dan melaksanakan TJSL melalui serangkaian program yang berkelanjutan (*sustainable*). Untuk itu, Perseroan berkomitmen mengalokasikan dana TJSL setiap tahun sebagai upaya dalam mewujudkan kemandirian masyarakat yang akan mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan.

Visi TJSL:

"Mewujudkan tanggungjawab lingkungan dan sosial berkelanjutan"

Visi TJSL PT Pelindo Terminal Petikemas adalah mewujudkan tanggungjawab lingkungan dan sosial berkelanjutan dengan Misi meningkatkan pemberdayaan masyarakat, yang mandiri dan berwawasan lingkungan dengan berperan aktif dalam pengembangan komunitas yang harmonis yang pada akhirnya akan menciptakan nilai bersama "shared values" bagi para pemangku kepentingan.

Misi TJSL:

- Menjalin hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan citra dan reputasi perusahaan yang peduli lingkungan;
- Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat;
- Mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui

The target of the TJSL program is the community surrounding the Company, with the nature of assistance aimed at community empowerment. Through the implementation of this program, it is hoped that a harmonious and mutualistic relationship can be established, fostering a conducive climate for the continuity of business activities and the safeguarding of company assets.

Vision, Mission, and Objectives of the Social and Environmental Responsibility Program [GRI 3-3]

As an environmentally-conscious terminal, SPTP cannot be separated from its role as a social entity (*corporate citizenship*) that influences and is influenced by the social and environmental conditions around it. Therefore, the Company's presence should benefit the environment, especially the communities surrounding its business activities.

Recognizing this, SPTP is obliged to pay attention to the community and environment by developing and implementing TJSL through a series of sustainable programs. To this end, the Company is committed to allocating TJSL funds annually as an effort to realize community self-sufficiency that will support the Company's business continuity.

TJSL Vision:

"Realizing sustainable environmental and social responsibility"

The vision of PT Pelindo Terminal Petikemas's TJSL is to realize sustainable environmental and social responsibility with the mission of enhancing community empowerment that is self-sufficient and environmentally conscious, by actively participating in the development of harmonious communities, ultimately creating shared values for stakeholders.

TJSL Mission:

- Foster harmonious relationships with stakeholders to enhance the Company's image and reputation as environmentally conscious.
- Build economic independence and community welfare through community empowerment programs.
- Encourage the use of technology in community empowerment processes through



proses bisnis perusahaan yang terintegrasi serta keterlibatan karyawan dalam aktivitas TJSL;

- Berperan aktif dalam melestarikan lingkungan dengan kearifan lokal.

the Company's integrated business processes and employee involvement in TJSL activities.

- Actively participate in environmental preservation with local wisdom.

Kinerja Program TJSL [GRI 203-1, 203-2][OJK F.25]

Pelaksanaan Program TJSL STPT mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Gambaran secara keseluruhan TPB yang dilaksanakan Perusahaan sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

TJSL Program Performance [GRI 203-1, 203-2][OJK F.25]

The implementation of the TJSL Program at STPT refers to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 111 of 2022 concerning the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs). The overall overview of the SDGs implemented by the Company is as outlined in the following table:

Tabel Kinerja Program TJSL Tahun 2023
Performance Table of the TJSL Program for 2023

No	Uraian Description	RKA 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp) 2023 Realization (IDR)	%
A	PILAR SOSIAL/SOCIAL PILAR			
1	TPB 1: Tanpa Kemiskinan SDG 1: No Poverty	Rp1.679.433.672	Rp1.144.534.528	68,15%
2	TPB 2: Tanpa Kelaparan SDG 2: No Hunger	Rp4.837.734.114,00	Rp3.931.162.291,00	81,26%
3	TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera SDG 3: Healthy and Prosperous Life	Rp1.740.638.285,00	Rp1.502.384.684,00	86,31%
4	TPB 4: Pendidikan Berkualitas SDG 4: Quality Education	Rp2.350.814.748,00	Rp2.195.246.992,00	93,38%
5	TPB 5: Kesenjangan Gender SDG 5: Gender Equality	Rp50.000.000,00	-	0,00%
	TOTAL	Rp10.658.620.819,00	Rp8.773.328.495,00	82,31%

Tabel Kinerja Program TJSL Tahun 2023
 Performance Table of the TJSL Program for 2023

No	Uraian Description		RKA 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp) 2023 Realization (IDR)	%
B	PILAR EKONOMI/ECONOMIC PILARS				
1	TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau	SDG 7: Clean and Affordable Energy	Rp249.386.881,00		0,00%
2	TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	SDG 8: Decent Work and Economic Growth	Rp422.741.528,00	Rp154.015.159,00	36,43%
3	TPB 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur	SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure	Rp1.323.114.906,00	Rp1.638.360.997,00	123,83%
4	TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan	SDG 10: Reduced Inequality	Rp1.133.400.000,00	Rp630.686.000,00	55,65%
5	TPB 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	SDG 17: Partnerships to Achieve Goals	Rp3.600.000.000,00	Rp5.082.870.839,00	141,19%
TOTAL			Rp6.728.643.315,00	Rp7.505.932.995,00	111,55%
C	PILAR LINGKUNGAN/ENVIRONMENT PILLAR				
1	TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	SDG 6: Clean Water and Adequate Sanitation	Rp960.000.000,00	Rp315.050.000,00	32,82%
2	TPB 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	SDG 11: Sustainable Cities and Settlements	Rp1.893.085.204,00	Rp1.034.446.807,00	54,64%
3	TPB 12: Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab	SDG 12: Responsible Consumption & Production	Rp782.160.220,00	Rp540.000.000,0	69,04%
4	TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim	SDG 13: Addressing Climate Change	Rp377.841.143,00	Rp109.390.000,00	28,95%
5	TPB 14: Ekosistem Lautan	SDG 14: Marine Ecosystems	Rp1.303.040.840,00	Rp1.575.384.514,00	120,90%
6	TPB 15: Ekosistem Daratan	TPB 15: Terrestrial Ecosystems	Rp942.286.910,00	Rp329.086.540,00	34,92%
TOTAL			Rp6.258.414.317,00	Rp3.903.357.861,00	62,37%
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA/LAW AND GOVERNANCE PILARS				
1	TPB 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions	Rp702.072.313,00	Rp67.750.000,00	9,65%
TOTAL			Rp24.347.750.764,00	Rp20.250.369.351,00	83,17%

Pelaksanaan Program TJLS Tahun 2023 selengkapny adalah sebagai berikut:

PILAR SOSIAL

Pilar Sosial Program TJSL dilaksanakan oleh Subdit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang meliputi:

TPB 1: Tanpa Kemiskinan

Pelaksanaan TPB 1 terealisasi sebesar Rp1.144 juta atau 68,15% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp 1.679 juta. Realisasi kegiatan berupa bantuan hewan qurban dalam memperingati Hari Raya Idul Adha Tahun 2023, bantuan dana Peringatan Isra Mi'raj, santunan anak yatim, serta Bantuan Sosial Tanggap Bencana Kebakaran Plumpang pada IPC TPK.

The implementation of the TJSL Program for 2023 is detailed as follows:

SOCIAL PILLAR

The Social Pillar of the TJSL Program is managed by the Social and Environmental Responsibility Subdivision, including:

SDG 1: No Poverty

The implementation of SDG 1 achieved IDR 1.144 billion, or 68.15% of the 2023 budget of IDR 1.679 billion. Activities included providing sacrificial animals for the celebration of Eid al-Adha 2023, financial support for the Isra Mi'raj commemoration, aid for orphans, and disaster relief assistance for the Plumpang fire at IPC TPK.

TPB 2 (Tanpa Kelaparan)

Pelaksanaan TPB terealisasi sebesar Rp 3.931 juta atau 81,26% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp 4.837 juta. Realisasi kegiatan berupa bantuan sembako disekitar wilayah TPK dengan Program Pelindo Berbagi Ramadhan dan Natal Tahun 2023 dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadhan dan Natal tahun 2023.

TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

Pelaksanaan TPB 3 terealisasi sebesar Rp 1.502 juta atau 86,31% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.740 juta. Realisasi kegiatan berupa pembiayaan pemeriksaan dan penanganan Covid-19 (Swab Antigen dan RT PCR) Pegawai, bantuan pendukung perlengkapan olahraga pada SSB Sememi, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dan partisipasi sunatan massal Yayasan Amanah Insan Rohilah, Kota Surabaya, pada Termina Teluk Lamong, serta Program Bestie Stunting bekerja sama dengan Kecamatan Pabean Cantikan dan PHC Surabaya.

TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)

Pelaksanaan TPB 4 terealisasi sebesar Rp2.195 juta atau 93,38% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp2.350 juta. Realisasi kegiatan berupa bantuan Sarpras Pasai Coworking Space ASEEC Tower UNAIR, bantuan perlengkapan fasilitas sekolah berupa notebook dan handphone pada Program Pelindo Mengajar 2023, Program Matching Fund ITS 2023 dan Program Beasiswa sejumlah 60 anak yang bekerjasama dengan Yayasan Barunawati Surabaya.

PILAR EKONOMI

Pilar Ekonomi Program TJSL perusahaan dilaksanakan oleh Subdit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang meliputi:

TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

Pelaksanaan TPB 8 terealisasi sebesar Rp 154 juta atau 36,43% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp 422 juta. Realisasi kegiatan berupa bantuan Program pelatihan pembesaran kepiting menggunakan teknik *crab house gen 3* dan hibah 1 (satu) set *crab house* kepada Perkom Teluk Lamong, serta Program Bersih Laut di sekitar perairan Teluk Lamong yang dilakukan oleh para nelayan ring 1 (satu) Terminal Teluk Lamong.

SDG 2 (Zero Hunger)

The implementation of SDG 2 achieved IDR 3.931 billion, or 81.26% of the 2023 budget of IDR 4.837 billion. Activities included distributing food packages in the TPK area through the Pelindo Berbagi Ramadhan and Christmas 2023 programs in anticipation of Ramadan and Christmas 2023.

SDG 3 (Good Health and Well-being)

The implementation of SDG 3 achieved IDR 1.502 billion, or 86.31% of the 2023 budget of IDR 1.740 billion. Activities included financing COVID-19 testing and treatment (Antigen Swabs and RT PCR) for employees, providing sports equipment to SSB Sememi, Pakal District, Surabaya City, and participating in a mass circumcision event organized by the Amanah Insan Rohilah Foundation, Surabaya City, at Terminal Teluk Lamong, as well as the Bestie Stunting program in collaboration with the Pabean Cantikan District and PHC Surabaya.

SDG 4 (Quality Education)

The implementation of SDG 4 achieved IDR 2.195 billion, or 93.38% of the 2023 budget of IDR 2.350 billion. Activities included providing support for the Pasai Coworking Space at ASEEC Tower UNAIR, school supplies such as notebooks and phones for the Pelindo Mengajar 2023 program, the Matching Fund ITS 2023 program, and scholarships for 60 children in collaboration with the Barunawati Foundation, Surabaya.

ECONOMIC PILLAR

The Economic Pillar of the TJSL Program is managed by the Social and Environmental Responsibility Subdivision, including:

SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)

The implementation of SDG 8 achieved IDR 154 million, or 36.43% of the 2023 budget of IDR 422 million. Activities included providing training for crab farming using the crab house Gen 3 technique and a grant of one crab house set to Perkom Teluk Lamong, as well as the Clean Ocean Program around Teluk Lamong waters carried out by fishermen in Ring 1 at Terminal Teluk Lamong.



TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)

Pelaksanaan TPB 9 terealisasi sebesar Rp 1.638 juta atau 123,83% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.323 juta. Realisasi kegiatan Pelindo Day berupa Bazar UMKM, Bantuan Sarana dan Prasarana Program TJSL pada Ring I PT Terminal Teluk Lamong.

TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan)

Pelaksanaan TPB 10 terealisasi sebesar Rp 630 juta atau 55,65% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.133 juta. Realisasi kegiatan berupa bantuan dana PHBI Isro Miroj dan dalam rangka kegiatan bulan Ramadhan 1444 H/2023 kepada beberapa masjid di sekitar Terminal Petikemas. Selain itu, juga berupa pembiayaan Program Mudik Bersama BUMN dengan kapal bekerja sama dengan PELNI, sedangkan dengan angkutan bus bekerja sama dengan Pelindo Group Tahun 2023, serta Bantuan Penanggulangan Bencana Karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur.

TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Pelaksanaan TPB 17 terealisasi sebesar Rp 5.082 juta atau 141,19% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp 3.600 juta. Realisasi kegiatan berupa keikutsertaan sponsorship dengan mekanisme sharing biaya di antaranya kegiatan Peringatan Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama, Rakernas GPEI, Sponsorship Buku Agenda Kerja ALFI/ILFA, Turnamen Golf KAGAMA DKI Jakarta 2023, sponsorship Dharma Santi BUMN 2023, sponsorship kegiatan musik dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya bertajuk "Ngejazz,Rek!", serta sponsorship Event FI PowerBoat Toba 2023.

PILAR LINGKUNGAN

Pilar Lingkungan Program TJSL perusahaan dilaksanakan oleh Subdit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang meliputi:

TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)

Pelaksanaan TPB 6 terealisasi sebesar Rp 315 juta atau 32,82% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp960 juta. Realisasi kegiatan berupa bantuan sarana air bersih untuk Universitas NU Surabaya, dan pembangunan sumur bor pada TPK Kupang dan TPK Bitung.

TPB 9 (Industry, Innovation and Infrastructure)

The implementation of SDG 9 achieved IDR 1.638 billion, or 123.83% of the 2023 budget of IDR 1.323 billion. Activities included Pelindo Day, featuring a UMKM bazaar and support for TJSL program facilities at Ring I PT Terminal Teluk Lamong.

SDG 10: Reduced Inequalities

The implementation of SDG 10 was realized with an expenditure of IDR 630 million, which is 55.65% of the 2023 budget of IDR 1,133 million. Activities included financial assistance for the Isro Miroj celebration and Ramadan activities for several mosques around the Container Terminal, support for the Mudik Bersama BUMN program in collaboration with PELNI and Pelindo Group for 2023, and disaster relief for forest fire mitigation in Kotawaringin Timur.

SDG 17: Partnerships for the Goals

The implementation of SDG 17 was realized with an expenditure of IDR 5,082 million, or 141.19% of the 2023 budget of IDR 3,600 million. Activities included sponsorship and cost-sharing for events such as the 100th Anniversary of Nahdlatul Ulama, GPEI National Working Meeting, ALFI/ILFA Work Agenda Book Sponsorship, KAGAMA Jakarta Golf Tournament 2023, Dharma Santi BUMN 2023, "Ngejazz,Rek!" music event celebrating Surabaya's anniversary, and the FI PowerBoat Toba 2023.

ENVIRONMENTAL PILLAR

The Environmental Pillar of the TJSL Program is managed by the Social and Environmental Responsibility Subdivision and includes:

SDG 6: Clean Water and Sanitation

The implementation of SDG 6 was realized with an expenditure of IDR 315 million, or 32.82% of the 2023 budget of IDR 960 million. Activities included providing clean water facilities for Universitas NU Surabaya and drilling wells at TPK Kupang and TPK Bitung.

TPB 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)

Pelaksanaan TPB 11 terealisasi sebesar Rp 1.034 juta atau 54,64% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp 1.893 juta. Realisasi kegiatan berupa bantuan perbaikan lapangan sepak bola Prapat Kurung Surabaya dan bantuan sarana dan prasarana masjid.

TPB 12 (Konsumsi & Produksi yang Bertanggungjawab)

Pelaksanaan TPB 12 terealisasi sebesar Rp 540 juta atau 69,04% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp782 juta. Realisasi kegiatan berupa pembangunan paket solar panel pada Kampung Edukasi Sampah dan sharing biaya pengelolaan sampah di Pulau Doom pada TPK Sorong.

TPB 13 (Penanganan Perbuahan Iklim)

Pelaksanaan TPB 13 terealisasi sebesar Rp 109 juta atau 28,95% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp 377 juta. Realisasi kegiatan berupa bantuan untuk korban bencana gempa di Jayapura.

TPB 14 (Ekosistem Lautan)

Pelaksanaan TPB 14 terealisasi sebesar Rp 1.575 juta atau 120,9% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp 1.303 juta. Realisasi kegiatan berupa penanaman 100.000 mangrove oleh Kelompok Masyarakat Sumber Barokah di Bangkalan Madura; program transplantasi terumbu karang dan mangrove di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu bekerja sama dengan Smiling Coral Indonesia; penanaman mangrove di Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya oleh Pokdarwis Sontoh Laut dan TPK Kendari.

TPB 15 (Ekosistem Daratan)

Pelaksanaan TPB 15 terealisasi sebesar Rp329 juta atau 34,92% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp 942 juta. Realisasi kegiatan berupa Program Bersih-Bersih Pantai Tirang Semarang dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup tahun 2023 dan Program penanaman pohon di 14 Terminal Petikemas dan Penghijauan Terminal 2 TPK New Makassar.

PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA

Pilar Hukum dan Tata Kelola Program TJSL perusahaan dilaksanakan oleh Subdit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang meliputi:

SDG 11: Sustainable Cities and Communities

The implementation of SDG 11 was realized with an expenditure of IDR 1,034 million, or 54.64% of the 2023 budget of IDR 1,893 million. Activities included repairing the Prapat Kurung football field in Surabaya and providing facilities for mosques.

SDG 12: Responsible Consumption and Production

The implementation of SDG 12 was realized with an expenditure of IDR 540 million, or 69.04% of the 2023 budget of IDR 782 million. Activities included installing solar panel packages at the Waste Education Village and sharing costs for waste management on Doom Island at TPK Sorong.

SDG 13: Climate Action

The implementation of SDG 13 was realized with an expenditure of IDR 109 million, or 28.95% of the 2023 budget of IDR 377 million. Activities included providing assistance for earthquake victims in Jayapura.

SDG 14: Life Below Water

The implementation of SDG 14 was realized with an expenditure of IDR 1,575 million, or 120.9% of the 2023 budget of IDR 1,303 million. Activities included planting 100,000 mangroves by the Sumber Barokah Community in Bangkalan Madura, coral reef transplantation and mangrove planting on Pramuka Island in the Thousand Islands in collaboration with Smiling Coral Indonesia, and mangrove planting in Tambaksarioso, Surabaya by Pokdarwis Sontoh Laut and TPK Kendari.

SDG 15: Life on Land

The implementation of SDG 15 was realized with an expenditure of IDR 329 million, or 34.92% of the 2023 budget of IDR 942 million. Activities included the Clean-Up Program at Tirang Beach, Semarang for World Environment Day 2023, and tree planting at 14 Container Terminals and Terminal 2 TPK New Makassar.

LEGAL AND GOVERNANCE PILLAR

The Legal and Governance Pillar of the TJSL Program is managed by the Social and Environmental Responsibility Subdivision and includes:



TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)

Pelaksanaan TPB 16 terealisasi sebesar Rp 67,75 juta atau 9,65% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp 702 juta. Realisasi kegiatan berupa bantuan sarana dan prasarana untuk Polda Jawa Timur

Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa [OJK F.26]

SPTP menyadari bahwa kebutuhan dan harapan konsumen terhadap produk dan layanan Perseroan terus berkembang sesuai dengan tuntutan terkini. Untuk itu, SPTP berupaya semaksimal mungkin melakukan inovasi dan pengembangan produk/jasa agar mampu memenuhi tuntutan dan harapan konsumen tersebut. Tak sekadar memberikan pilihan yang lebih variatif, inovasi serta pengembangan produk dan jasa/layanan juga bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih mudah, efektif, dan efisien bagi konsumen. Inovasi dan pengembangan yang dilakukan Perseroan tidak semata-mata terkait produk dan jasa/layanan, tetapi juga menyangkut bidang pemasaran dan sebagainya.

Produk yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Konsumen [OJK F.27]

Pelayanan terbaik kepada konsumen/pengguna jasa dilakukan SPTP melalui berbagai kebijakan. Selain melakukan berbagai inovasi layanan, Perseroan juga memberikan perhatian terhadap faktor keamanan bagi konsumen/pelanggan. Untuk mewujudkan hal itu, selain mengadopsi SMK3 dan Sertifikasi ISO 45001 : 2018, Perseroan juga menerapkan International Ship and Port Security (ISPS) Code. guna mengidentifikasi ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap peristiwa keamanan yang berakibat kepada kapal atau fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan internasional. Penerapan ISPS Code sesuai Amandemen SOLAS 74 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.33 Tahun 2002, pemberlakuan amandemen SOLAS 74 di Indonesia dimulai tanggal 1 Juli 2004. Penerapan ISPS Code dilakukan sesuai dengan standar internasional yang mengacu kepada peraturan

SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions

The implementation of SDG 16 was realized with an expenditure of IDR 67.75 million, or 9.65% of the 2023 budget of IDR 702 million. Activities included providing facilities and infrastructure support to the East Java Regional Police (Polda Jawa Timur).

Innovation and Product/Service Development [OJK F.26]

SPTP recognizes that consumer needs and expectations regarding the company's products and services are continually evolving to meet current demands. To address this, SPTP strives to innovate and develop products/services to fulfill these consumer expectations. This involves not only offering more varied options but also aiming to provide services that are easier, more effective, and efficient for consumers. The company's innovation and development efforts extend beyond products and services to include marketing and other areas.

Products Evaluated for Consumer Safety [OJK F.27]

SPTP ensures top-notch service to its consumers/users through various policies. In addition to innovating services, the company pays close attention to consumer/customer safety. To achieve this, SPTP adopts Occupational Health and Safety Management System (SMK3) and ISO 45001:2018 certification, as well as the International Ship and Port Security (ISPS) Code. The ISPS Code is designed to identify security threats and take preventive measures against security incidents affecting ships or port facilities used for international trade. The implementation of the ISPS Code complies with the SOLAS 74 amendments and the Minister of Transportation Decree No. KM.33 of 2002. The adoption of SOLAS 74 amendments in Indonesia began on July 1, 2004. The ISPS Code is implemented in accordance with international standards set by the International Maritime Organization (IMO), of which Indonesia is a member.

International Maritime Organization (IMO) di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Dampak Produk/Jasa [OJK F.28]

Bidang usaha manajemen terminal peti kemas merupakan salah satu layanan penting bagi Indonesia yang kawasannya terdiri dari ribuan pulau. Dengan adanya layanan jasa tersebut, mobilitas orang dan barang dapat dilakukan dengan mudah. Oleh karena jenis layanan ini memiliki banyak manfaat, maka pemerintah terus berupaya untuk menambah jumlah pelabuhan di Tanah Air. Hingga akhir tahun 2022, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, pada tahun 2022, terdapat 3.672 pelabuhan dan terminal di Indonesia.

Sejalan dengan komitmen pemerintah mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur, termasuk pelabuhan, maka pembangunan pelabuhan baru atau merenovasi pelabuhan lama terus dilakukan. Dengan pembangunan pelabuhan yang berkelanjutan tersebut, masyarakat memetik dampak positif atas konsistensi SPTP mengelola usaha manajemen terminal peti kemas secara profesional karena memudahkan lalu lintas barang di seluruh area operasi Perseroan. Walau demikian, dalam proses pembangunan tersebut, Perseroan menyadari adanya risiko potensial dan faktual yang terjadi baik dari sisi lingkungan maupun sosial.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Perseroan, dampak dan risiko operasional manajemen terminal peti kemas –termasuk pembangunan yang sedang berjalan adalah sebagai berikut:

Impact of Products/ Services [OJK F.28]

Terminal container management is a crucial service for Indonesia, an archipelago consisting of thousands of islands. This service facilitates the easy movement of people and goods. Given its significant benefits, the government continues to work towards increasing the number of ports across the country. As of the end of 2022, data from the Ministry of Transportation shows there were 3,672 ports and terminals in Indonesia.

In alignment with the government's commitment to improving infrastructure, including ports, new port construction and renovation of existing ports are ongoing. This sustainable port development brings positive impacts to the community through SPTP's consistent professional management of container terminal operations, which facilitates the movement of goods across the company's operational areas. However, the company acknowledges potential and factual risks associated with this development, both environmental and social.

Based on the company's mapping, the impacts and risks associated with container terminal management operations—including ongoing development—are as follows:

Potensi Dampak dan Risiko Teridentifikasi Identified Potential Impacts and Risks	Tindakan Penanggulangan Mitigation Actions	
Pencemaran Udara Air Pollution	- Pengendalian operasi dan Pengendalian baku mutu emisi. - Pemantauan emisi gas buang secara periodik	- Operational Control and Emission Quality Standard Control - Periodic Monitoring of Exhaust Gas Emissions
Pencemaran Air Water Pollution	- Pengendalian operasi dan pengelolaan limbah cair. - Pemantauan secara rutin baku mutu limbah cair.	- Operational Control and Management of Liquid Waste - Routine Monitoring of Liquid Waste Quality Standards



Potensi Dampak dan Risiko Teridentifikasi Identified Potential Impacts and Risks	Tindakan Penanggulangan Mitigation Actions	
Pencemaran Limbah B3 Hazardous Waste Pollution	• Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam izin maupun sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Upaya 3R limbah B3 dengan mengajukan izin pemanfaatan limbah B3	• Management of Hazardous and Toxic Waste (B3) in accordance with permit conditions and applicable regulations • 3R Efforts for B3 Waste by applying for B3 waste utilization permits
Keanekaragaman Hayati Biodiversity	Program konservasi dan restorasi berkelanjutan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau instansi setempat.	Ongoing Conservation and Restoration Programs in collaboration with the Environmental Agency or local authorities

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali [OJK F.29]

Produk/jasa yang ditawarkan SPTP dirancang secara matang agar sesuai dengan harapan dan kepentingan pemangku kepentingan, seperti pengguna jasa, regulator maupun pemegang saham. Oleh karena itu, selama tahun pelaporan, tidak terdapat produk/jasa Perseroan yang ditarik kembali dengan alasan apapun.

Number of Products Recalled [OJK F.29]

SPTP designs its products/services carefully to meet the expectations and interests of stakeholders, including service users, regulators, and shareholders. Consequently, during the reporting year, no products/services from the company were recalled for any reason.

Survei Kepuasan Pelanggan [OJK F.30]

SPTP senantiasa memegang komitmen untuk memberikan produk dan layanan terbaik demi mewujudkan kepuasan konsumen/pelanggan yang optimal. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, sekaligus menggali masukan untuk perbaikan, Perseroan secara berkala mengadakan Survei Kepuasan Pelanggan.

Analisis yang dilakukan terhadap Survei Kepuasan Pelanggan Perusahaan tahun 2023 antara lain untuk mengetahui nilai kepuasan pelanggan, nilai ketidakpuasan pelanggan, nilai loyalitas pelanggan, dan mengetahui engagement pelanggan.

Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan yang telah dilakukan, selanjutnya diperoleh indikator kepuasan pelanggan yang meliputi rata-rata harapan (*Importance*), rata-rata pelayanan yang dirasakan pelanggan (*Performance*), nilai GAP, *Customer Satisfaction Index* (CSI) serta keterangan dari nilai CSI. Tabel berikut merupakan hasil data kumulatif kualitas pelayanan

Customer Satisfaction Survey [OJK F.30]

SPTP is committed to delivering the best products and services to ensure optimal customer satisfaction. To gauge customer satisfaction levels and gather feedback for improvements, the company conducts periodic Customer Satisfaction Surveys.

The analysis of the 2023 Customer Satisfaction Survey includes evaluating customer satisfaction scores, dissatisfaction scores, customer loyalty, and engagement.

The survey results provide indicators such as the average expectation (*Importance*), average perceived service (*Performance*), GAP values, Customer Satisfaction Index (CSI), and explanations of CSI values. The following table presents the cumulative data on service quality.

Data Kumulatif Kualitas Pelayanan Tiap Cabang Terminal

Cumulative Data on Service Quality for Each Terminal Branch

No	Terminal	CSI	CDI	CEI	CLI
1	TPK Perawang	4,41	0,00	4,10	4,06
2	TPK Belawan	3,42	0,04	4,18	4,22
3	TPK Nilam	4,62	0,00	4,37	4,27
4	TPK Semarang	4,08	0,00	4,36	4,36
5	TPK Banjarmasin	4,21	0,00	4,49	4,61
6	TPK Kupang	4,38	0,00	4,41	4,38
7	TPK Ambon	3,91	0,00	4,16	4,28
8	TPK Jayapura	4,00	0,00	4,40	4,38
9	TPK Kendari	4,08	0,03	4,24	4,37
10	TPK Pantolokan	3,48	0,03	4,41	4,45
11	TPK Sorong	3,96	0,04	4,04	4,06
12	TPK Tarakan	4,44	0,00	4,40	4,44
13	TPK Bitung	4,08	0,03	4,35	4,25
14	TPK New Makassar	3,70	0,04	4,18	4,27
	Rata-Rata	4,05	0,01	4,29	4,31



INDEKS KONTEN GRI STANDARD 2021

GRI Standard 2021 Content Index

Pernyataan penggunaan Statement of use	PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks konten GRI ini untuk periode 1 Januari 2023–31 Desember 2023 merujuk pada Standard GRI. PT Pertamina Gas has reported the information cited in this GRI content index for the period January 1, 2023 - December 31, 2022, concerning the GRI Standards.
GRI 1	GRI 1: Landasan 2021/ GRI 1: Foundation 2021
GRI Sektor Standards GRI Sector Standards	-

Standard GRI GRI Standards	Pengungkapan Disclosure		Hlm. Pages	
GRI Pengungkapan Umum 2021 GRI General Disclosure 2021	2-1	Detail Organisasi	Organization Details	24, 25
	2-2	Entitas yang tercakup dalam pelaporan keberlanjutan organisasi	Entities covered by an organization's sustainability reporting	6, 38
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi dan titik kontak	Reporting period, frequency, and touchpoints	7, 11
	2-4	Pernyataan ulang informasi	Information restatement	11
	2-5	Penjaminan eksternal	External assurance	11
	2-6	Kegiatan, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya	Other activities, value chains, and business relations	24, 31, 36, 40, 47
	2-7	Karyawan	Employee	39
	2-8	Pekerja yang Bukan Pekerja Langsung	Employees Who Are Not Direct Employees	39
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola	Governance structure and composition	34, 60
	2-11	Pejabat tata kelola tertinggi	The highest governance functionary	60
	2-12	Peran pejabat tata kelola tertinggi dalam memantau dampak manajemen	The role of the highest governance functionary in monitoring the impact of management	62, 63
	2-13	Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak	Delegation of responsibility for managing impact	60
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	The role of the highest governance body in sustainability reporting	64
	2-15	Konflik kepentingan	Conflict of Interest	77
	2-16	Komunikasi keprihatinan kritis	Communication of Critical Concern	76
	2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	The collective knowledge of the highest governance bodies	65
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan	Total Annual Compensation Ratio	78
	2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan	Statement on sustainable development strategy	12
	2-23	Komitmen kebijakan	Policy Commitment	27, 67, 72
	2-24	Komitmen dalam menanamkan kebijakan	Commitment to Policy Implantation	72
	2-25	Proses untuk memulihkan dampak negatif	The process to recover the negative impact	114, 141
	2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan menyampaikan kekhawatiran	Mechanisms for seeking advice and communicating concerns	75, 76, 80
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	Compliance with laws and regulations	115, 123
	2-28	Keanggotaan asosiasi	Association membership	47
	2-29	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan	Approach to stakeholder engagement	80
	2-30	Perjanjian perundingan kolektif	Collective bargaining agreement	128

Topik Material Topic Material				Hlm. Pages
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material	Process for determining material topics	8
	3-2	Daftar topik material	List of material topics	8
PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS / DISCLOSURE OF SPECIAL STANDARDS				
TOPIK EKONOMI/ ECONOMIC TOPICS				
KINERJA EKONOMI / ECONOMIC PERFORMANCE				
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material	Material topic management	9, 90, 91, 100
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 GRI 201: Economic Performance 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	Direct economic value generated and distributed	98
	201-2	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	Pension obligations of fixed benefits and other pension schemes	100
	201-3	Kewajiban pada program imbalan pasti dan program pensiun lainnya	Obligations under defined benefit plans and other pension plans	101
	201-4	Bantuan finansial dari pemerintah	Financial assistance received from the government	101
DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG/ INDIRECT ECONOMIC IMPACT				
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material	Material topic management	9, 142, 144, 146
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impacts	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	Infrastructure investment and service support	147
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	Significant indirect economic impact	147
ANTI-KORUPSI/ ANTI-CORRUPTION				
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material	Material topic management	9, 78
GRI 205: Antikorupsi Anticorruption	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	The operations that are assessed have corruption-related risks	79
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	Communication and training on anti-corruption policies and procedures	79, 80
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	Evidence of corruption incidents and action taken	80
TOPIK LINGKUNGAN/ ENVIRONMENT TOPICS				
ENERGI/ ENERGY				
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material	Material topic management	9, 103, 105, 108
GRI 302: Energi 2016 Energy 2016	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	Energy consumption in the organization	108
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	Energy consumption outside the organization	108, 109
	302-4	Pengurangan konsumsi energi	Reduction of energy consumption	108, 109
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	Reduction in energy required for products and services	109
AIR DAN EFLUEN/ WATER AND EFFLUENT				
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material	Material topic management	9, 103, 105, 111
GRI 303: Air dan Efluen 2018 Water and Effluent 2018	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	Interaction with water as a shared resource	112
	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	Management of impact related to drainage	112
	303-3	Pengambilan air	Water intake	112

Topik Material Topik Material				Hlm. Pages
TOPIK SOSIAL / SOCIAL TOPICS				
KEPEGAWAIAN/ STAFFING				
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material	Material topic management	10, 117, 120
GRI 401: Kepegawaian 2016 Staffing 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	New employee recruitment and employee turnover	120
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu	Benefits provided to full-time employees that are not provided to part-time or part-time employees	120
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA/ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY				
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material	Material topic management	10, 117, 128
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 Occupational Health and Safety 2018	403-1	Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Occupational health and safety management system	130
	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	137
	403-3	Layanan Kesehatan Kerja	Occupational health services	138
	403-4	Partisipasi, Konsultan, dan Komunikasi Pekerja pada Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Participation, consultation, and communication of employees on occupational safety and health	130
	403-5	Pelatihan Bagi Pekerja Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Training for employees on occupational safety and health	136, 137
	403-6	Peningkatan Kualitas Kesehatan Pekerja	Improving the quality of employees' health	138
	403-7	Pencegahan dan Mitigasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang Berdampak Langsung dalam Hubungan Bisnis	Prevention and mitigation of the impact of occupational safety and health that is directly related to business relations	136
	403-8	Pekerja yang Tercakup dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Employees covered by the occupational health and safety management system	130
	403-9	Kecelakaan Kerja	Work accidents	139
	403-10	Penyakit Akibat Kerja	Occupational illnesses	138, 140
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN/ TRAINING AND EDUCATION				
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material	Material topic management	10, 117, 124
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 Training and Education 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	Average training hours per year per employee	124
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	Programs to upskill employees and transition assistance programs	124
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	Percentage of employees who receive regular reviews of performance and career development	126, 127
KEANEKARAGAMAN DAN KESEMPATAN SETARA/ DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY				
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material	Material topic management	10, 117, 120
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016 Diversity and Equal Opportunity 2016	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	Diversity of governance bodies and employees	121
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	Ratio of basic salary and remuneration of women to men	121

DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI POJK 51/2017 [OJK G.4]

List of Disclosures According to POJK 51/2017 [OJK G.4]

No Indeks	Nama Indeks Index Name	Hlm. Pages
Strategi Keberlanjutan/ Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	Sustainability Strategy Explained 15, 91
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan/ Performance Overview of Sustainability Aspects		
B.1	Aspek Ekonomi	Economic Aspect 4
B.2	Aspek Lingkungan Hidup	Environment Aspect 4
B.3	Aspek Sosial	Social Aspect 4
Profil Perusahaan/ Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan	Vision, Mission, and Sustainability Values 27
C.2	Alamat Perusahaan	Company Address 24
C.3	Skala Usaha	Business Scale 24, 33, 36, 39
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	Products, Services, and Business Activities Carried Out 30,31
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi	Membership in the Association 47
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan	Significant Changes in Issuers and Public Companies 47
Penjelasan Direksi/ Board of Directors Explanation		
D.1	Penjelasan Direksi	Board of Directors Explanation 12
Tata Kelola Keberlanjutan/ Sustainability Governance		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan	Person in Charge of Sustainable Finance Implementation 60
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan	Competency Development Related to Sustainable Finance 65
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan berkelanjutan	Risk Assessment of Sustainable Finance 67
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	Relation with Stakeholders 80
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan	Problems with the Application of Sustainable Finance 83
Kinerja Keberlanjutan/ Sustainability Governance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	Activities Building a Culture of Sustainability 86
Kinerja Ekonomi/ Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	Comparison of Production Targets and Performance, Portfolio, Financing Targets, or Investment, Revenue and Profit and Loss 95
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan	Comparison of Portfolio Targets, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects in Line with the Application of Sustainable Finance 96
Kinerja Lingkungan Hidup/ Environment Performance		
Aspek Umum/ General Aspect		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	Environment Cost 106
Aspek Material/ Material Aspect		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	Use of Environmentally Friendly Materials 107
Aspek Energi/ Energy Aspect		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	Amount and Intensity of Energy Used 108

No Indeks	Nama Indeks Index Name		Hlm. Pages
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	Efforts and Achievements in Energy Efficiency and Use of Renewable Energy	108
Aspek Air/ Water Aspect			
F.8	Penggunaan Air	Water Use	112
Aspek Keanekaragaman Hayati/ Biodiversity Aspect			
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	Impacts of Operational Areas Near or in Conservation Areas or Biodiversity	114
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	Biodiversity Conservation Efforts	114
Aspek Emisi/ Emission Aspect			
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	Amount and Intensity of Emissions Produced Based on Type	110
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan	Efforts and Achievements to Reduce Emissions Carried Out	108, 111
Aspek Limbah dan Efluen/ Waste and Effluent Aspect			
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis	Amount of Waste and Effluent Generated Based on Type	113
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen	Waste and Effluent Management Mechanism	113
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada)	Spills That Occur (If Any)	113
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup/ Environmental Complaints Aspect			
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan	Number and Material of Environment Complaints Received and Resolved	115
Kinerja Sosial/ Social Performance			
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/ atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen	Commitment of Financial Institutions, Issuers, or Public Companies to Provide Equivalent Products and/or Services to Consumers	118
Aspek Ketenagakerjaan/ Employment Aspect			
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja	Equality of Employment Opportunities	120
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	Child Employee and Forced Employee	121
F.20	Upah Minimum Regional	Regional Minimum Wages	123
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak Dan Aman	A Decent And Safe Working Environment	128
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	Employee Training and Capacity Development	124, 126
Aspek Masyarakat/ Communities Aspect			
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar	Impact of Operations on Surrounding Communities	140
F.24	Pengaduan Masyarakat	Community Complaints	141
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	Social Environmental Responsibility Activities (TJSL)	142, 147
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan/ Responsibility for Sustainable Product/Service Development			
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan	Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services	152
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan	Products/Services That Have Been Evaluated for Safety for Customers	152
F.28	Dampak Produk/Jasa	Product/Service Impact	153
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	Number of Recalled Products	154
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services	154

No Indeks	Nama Indeks Index Name	Hlm. Pages
Lain-lain/ Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika Ada)	Written Verification from an Independent Party (if Any)
G.2	Lembar Umpan Balik	Feedback Sheet
G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya	Response to Previous Year's Sustainability Report Feedback
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik	List of Disclosures according to POJK 51/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies

VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN [OJK G.1]

Written Verification from an Independent Party [OJK G.1]

Laporan Keberlanjutan ini belum diverifikasi oleh Penyedia Jasa Assurance (*Assurance Services Provider*) yang independen. Namun demikian, PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual.

This Sustainability Report has not been verified by an independent Assurance Services Provider. However, PT Pelindo Terminal Petikemas or SPTP guarantees that all information disclosed in this report is true, accurate, and factual.

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA [OJK G.3]

Response to Previous Year's Report Feedback [OJK G.3]

Selama tahun 2024, PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP tidak menerima tanggapan dari para pemangku kepentingan atas penerbitan laporan keberlanjutan tahun 2023. Dengan demikian tidak terdapat informasi spesifik terkait tanggapan terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

During 2024, PT Pelindo Terminal Petikemas or SPTP did not receive any responses from stakeholders regarding the issuance of the 2023 sustainability report. Thus, there is no specific information regarding the response to feedback on the previous year's report.

LEMBAR UMPAN BALIK [OJK G.2]

Feedback Sheet [OJK G.2]

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara yang telah membaca Laporan Keberlanjutan PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP Tahun 2023. Untuk meningkatkan isi Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang, kami berharap Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk mengisi Lembar Umpan Balik ini dengan melingkari salah satu jawaban dan mengisi titik-titik yang tersedia, kemudian mengirimkannya kepada kami.

Thank you to all of you who have read the Sustainability Report of PT Pelindo Terminal Petikemas or SPTP 2023. To improve the content of the Sustainability Report in the coming years, we hope that you are willing to fill out this Feedback Sheet by circling one of the answers and filling in the dots provided, then sending it to us.

Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan?/This Sustainability Report provides clear information regarding the economic, social and environmental performance of the Company?

- a. Setuju/ **Agree** b. Tidak Setuju/ **Don't Agree** c. Tidak tahu/ **Don't Know**

Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan?/ Does this Sustainability Report provide clear information regarding the fulfillment of the Company's social and environmental responsibilities?

- a. Setuju/ **Agree** b. Tidak Setuju/ **Don't Agree** c. Tidak tahu/ **Don't Know**

Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini mudah dimengerti dan dipahami? / Are the materials and data in this Sustainability Report easy to understand and comprehend?

- a. Setuju/ **Agree** b. Tidak Setuju/ **Don't Agree** c. Tidak tahu/ **Don't Know**

Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah cukup lengkap?/ Are the materials and data in this Sustainability Report complete enough?

- a. Setuju/ **Agree** b. Tidak Setuju/ **Don't Agree** c. Tidak tahu/ **Don't Know**

Apakah desain, tata letak, grafis dan foto-foto dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah bagus?/ Are the design, layout, graphics and photographs in this Sustainability Report good?

- a. Sudah bagus/ **Already good** b. Belum Bagus/ **Not good yet** c. Tidak tahu/ **Don't Know**

Informasi apa yang paling bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?/ What information is most useful from this Sustainability Report?

Informasi apa yang dinilai kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?/ What information is considered less useful from this Sustainability Report?

Informasi apa yang dinilai masih kurang dari Laporan Keberlanjutan ini dan perlu ditambahkan pada Laporan Keberlanjutan mendatang?/ What information is considered lacking in this Sustainability Report and needs to be added to future Sustainability Reports?

IDENTITAS PENGIRIM/SENDER IDENTITY

Nama/Name :
 Email :

Identifikasi menurut kategori pemangku kepentingan

Identification by stakeholder category

(beri tanda ✓ yang sesuai/mark ✓ as appropriate):

- | | |
|---|---|
| ☐ Pemegang saham/ Shareholders | ☐ Pegawai/ Employee |
| ☐ Pelanggan/ Customer | ☐ Masyarakat/ Public |
| ☐ Mitra Kerja/ Work partners | ☐ Lainnya/ Other |
| ☐ Pemerintah/ Government | |

Mohon Lembar Umpan Balik ini dikirimkan ke:
 Please send this Feedback Sheet to:

Sekretaris Perusahaan

PT Pelindo Terminal Petikemas
 Jl. Perak Timur No. 478,
 Surabaya 60165, Indonesia
 Situs Web: www.pelindotpk.co.id
 Surel : info.tpk@pelindo.co.id

PELABUHAN BERKELANJUTAN LANGKAH MENUJU MASA DEPAN HIJAU

KANTOR PUSAT

Jl. Perak Timur No. 610
Surabaya 60165 - Indonesia
Telp: +62 31 3298631
Layanan Pelanggan:
info@pelindotpk.com

KANTOR PERWAKILAN

Gedung Tamansari Parama Office Lt. 7
Jl. Wahid Hasyim No. 84-86
Jakarta Pusat 10340
Telp: +62 21 22346068

www.pelindotpk.com

